PERUBAHAN RKPD

(Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2025

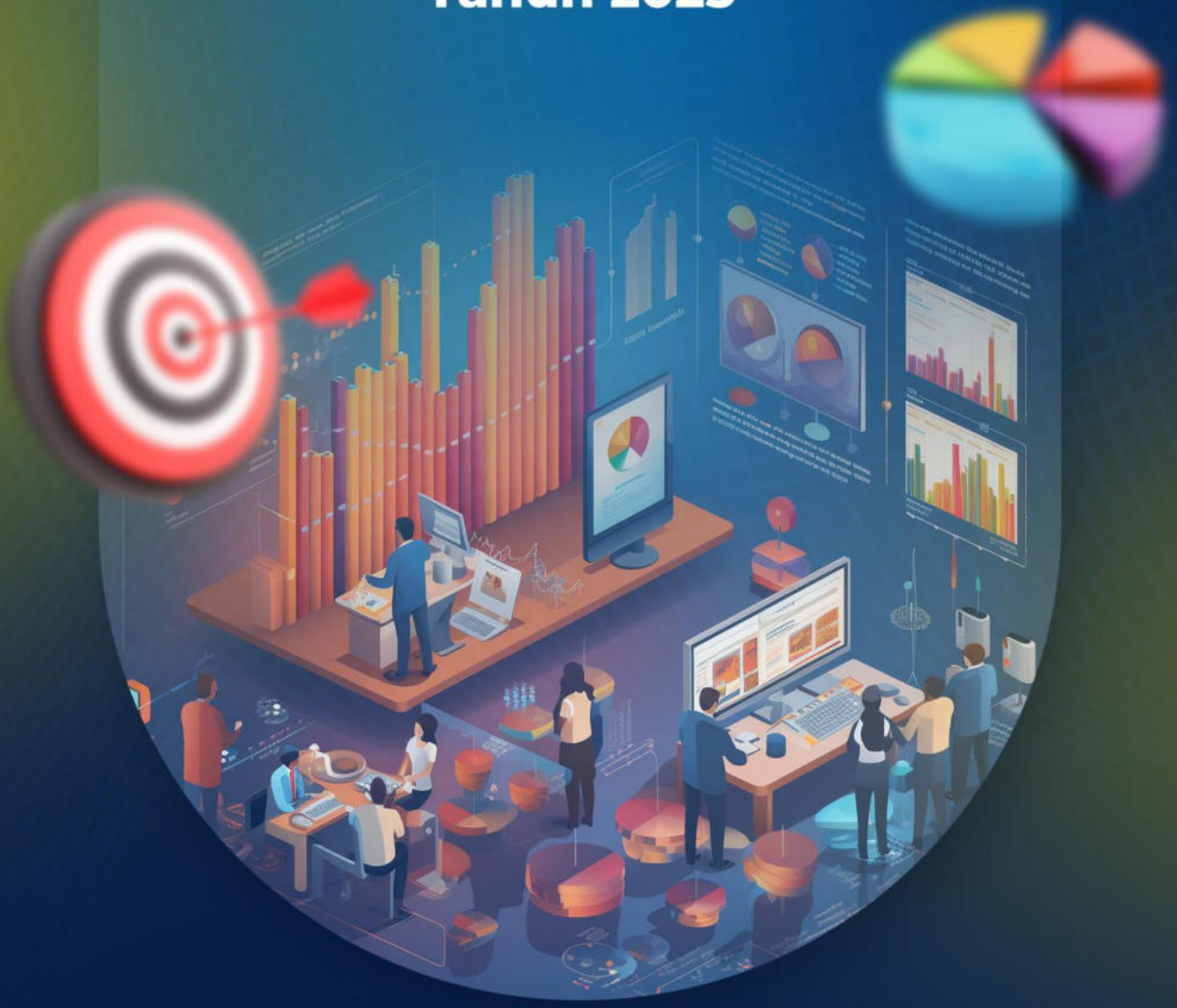

PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan saat ini, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan jika berdasarkan evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 diperlukan suatu pengaturan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856););
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah
15. Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
    Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 103 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah.
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program/kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana APBD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Perubahan RKPD ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 dalam rangka menciptakan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan Daerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi anggaran dan alokasi sumber daya dalam pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan umum perubahan APBD dan Perubahan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan

APBD Tahun 2025.

BAB III
ISI DAN SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah dengan mendorong pastisipasi masyarakat untuk percapaian arah pembangunan yang tepat sasaran.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    BAB I : Pendahuluan
    bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD yang teridiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Perubahan RKPD;
    BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (dua) Tahun 2025
    bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025;
    BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
    bab ini memuat arah kebijakan ekonomi Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah;
    BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
    bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana;
    BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
    bab ini memuat rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
    BAB VI : Penutup
(3) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
FUNGSI PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD DAN RKA-PD

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Perubahan RKPD 2025 berfungsi sebagai:
a. pedoman dalam penyusunan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS; dan
b. pedoman Perangkat Daerah membuat RKA-PD

berdasarkan perubahan PPAS.

BAB V
PERUBAHAN RKPD SEBAGAI LAPORAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja atas pelaksanaan RKA-PD yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja tiap-tiap program kegiatan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 20 Juni 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ANENG

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 20 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 842

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan Taufik, Hidayah, serta Kasih Sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan, sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dokumen Perubahan RKPD disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah yang mengalami perubahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan RKPD tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya. Selanjutnya Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD menjadi dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Kepada para pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini diucapkan terima kasih, semoga apa yang dirumuskan dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Billahi Taufik Wal Hidayah.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tarempa, 20 Juni 2025
Bupati Kepulauan Anambas,

Aneng

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Hubungan Antar Dokumen 5
1.5 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 8
2.1 Aspek Pelayanan Umum 8
2.1.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 8
2.1.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 53
2.2 Evaluasi Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 55
2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Tri Wulan I Tahun 2025 57
2.4 Realisasi Anggaran Belanja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 251
2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 257
2.4.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Daerah 258

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 290
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 290
3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional 290
3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau 293
3.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas 297
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 298
3.2.1 Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah 2021-2026 308
3.2.3 Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024 & Asumsi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 318

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 321
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan RPJMD 321
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 344
5.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 344
5.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 383
5.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah 441
BAB VI PENUTUP **536**

DAFTAR TABEL

Tabel II- 1 Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas 2024 9

Tabel II- 2 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024 10

Tabel II- 3 Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024 10

Tabel II- 4 Kondisi Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024 12

Tabel II- 5 Klasifikasi Kerusakan Rumah Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024 13

Tabel II- 6 Komponen Pendukung Penanggulangan Kebakaran dan Kedaruratan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024 14

Tabel II- 7 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kelompok Rentan 15

Tabel II- 8 Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan 18

Tabel II- 9 Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024 21

Tabel II- 10 Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024 32

Tabel II- 11 Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024 35

Tabel II- 12 Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024 37

Tabel II- 13 Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024 45

Tabel II- 14 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024 54

Tabel II- 15 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024 54

Tabel II- 16 Evaluasi Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021–2026 56

Tabel II- 17 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Per-OPD S.D Triwulan I Tahun 2025 251

Tabel III- 1 Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas 297

Tabel III- 2 Penetapan APBD T.A 2025 dan Proyeksi Belanja Tahun 2025 299

Tabel III- 3 Belanja Wajib Yang Ketentuannya Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Mandatory Spending) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 301

Tabel IV- 1 Penjabaran Prioritas Perubahan RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2025 323

Tabel IV- 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 324

Tabel IV- 3 Program Prioritas RKPD Tahun 2025 326

Tabel IV- 4 Program RKPD Pendukung Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 340

Tabel IV- 5 Dukungan Program RKPD Tahun 2025 Terhadap Pencapaian Target SDGs 341

Tabel V- 1 Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 344

Tabel V- 2 Pendanaan Program Perangkat Daerah RKPD 2025 terhadap RKPD Perubahan 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas .. 346

Tabel V- 3 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030 384

Tabel V- 4 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030 386

Tabel V- 5 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pendidikan 441

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. RKPD Perubahan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun sebagai penyesuaian atas RKPD murni Tahun 2025, mengingat adanya dinamika pembangunan yang memerlukan penguatan responsivitas perencanaan, baik dari aspek keuangan, capaian kinerja, maupun kebijakan nasional dan daerah.

Perubahan ini dilatarbelakangi oleh evaluasi atas capaian semester pertama Tahun 2025 yang menunjukkan perlunya penyesuaian sasaran dan program kegiatan, serta adanya perubahan asumsi makro dan kebijakan fiskal daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Selain itu, RKPD Perubahan juga mempertimbangkan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta kondisi faktual di lapangan seperti perubahan kebutuhan masyarakat, pergeseran prioritas pelayanan dasar, serta faktor eksternal seperti inflasi dan cuaca ekstrem yang mempengaruhi pelaksanaan program di wilayah kepulauan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahap-tahap penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Tahapan ini merupakan awal dari proses penyusunan rancangan perubahan RKPD yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai

dengan triwulan II tahun berkenaan. Proses-proses perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup antara lain: analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan triwulan II tahun berkenaan, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah dan perumusan program, kegiatan beserta pagu indikatif.

2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Tahapan ini disusun berdasarkan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi. Rancangan Akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

3. Penetapan Perubahan RKPD

Penetapan perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) dan diundangkan dalam Berita Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2i Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan

Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta penganggaran program dan kegiatan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah. Sementara **tujuan** penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2025 adalah :

1. Menyesuaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Semester I;
2. Menyesuaikan kapasitas riil pendanaan daerah berdasarkan perubahan kebijakan fiskal;
3. Menyesuaikan arah kebijakan nasional dan provinsi yang berdampak pada pemerintah daerah;
4. Menyelaraskan kebutuhan pembangunan aktual dengan target RPJMD dan isu strategis terkini.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026. Penyusunan RKPD Perubahan ini mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah serta menyesuaikan dengan berbagai kebijakan perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan daerah.

Dokumen ini memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD, yang pada gilirannya mengacu pada arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005–2025. Seluruh program dan kegiatan dalam RKPD juga diselaraskan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang kemudian diturunkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD).

RKPD Perubahan 2025 juga disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023–2043 agar program pembangunan tetap sesuai dengan arah pemanfaatan ruang wilayah. Sinkronisasi dilakukan pula dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026

serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 agar tercipta keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Selain itu, penyusunan RKPD juga mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses serta memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs sebagai prinsip pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan demikian, RKPD Perubahan Tahun 2025 menjadi dokumen strategis yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

1.5 Sistematika Penulisan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menentukan sistematika dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Perubahan RKPD.

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan tentang : (1) Arah kebijakan ekonomi daerah, dan (2) Arah kebijakan keuangan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Menjelaskan tentang rencana kerja program dan kegiatan prioritas. Baik kegiatan lanjutan tahun 2024, pergeseran kegiatan pada setiap OPD, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan pada perubahan RKPD tahun 2025.

Bab VI Penutup

Merumuskan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD 2024 serta tindak lanjut yang diperlukan dalam implementasi Perubahan RKPD tahun 2024 sebagai acuan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

BAB II
EVALUASI RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, salah satunya yaitu bidang urusan pendidikan. Indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut:

PENDIDIKAN

Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Kualitas Pendidikan masyarakat suatu daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk, semakin besar kontribusinya terhadap kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, melalui penyelenggaraan sistem pendidikan yang terpadu, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, diharapkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat meningkat secara optimal.

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kepulauan Anambas tertinggi adalah tingkat Pendidikan SD/Sederajat sebesar 99,8 persen, sedangkan angka terendah berada pada tingkat Pendidikan SMA/Sederajat sebesar 77,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perlu menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan akses sarana dan prasarana dalam mendukung partisipasi sekolah masyarakat hingga ke tingkat SMA/Sederajat. Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 1
Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas 2024

Jenjang Pendidikan	APK	APM
SD/MI	104,48	99,8
SMP/MTs	101,57	83,88
SMA/SMK/MA	93,10	77,67

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi murni di Kepulauan Anambas masih didominasi pada jenjang SD/MI, diikuti dengan SMP/MTS, dan angka terkecil ditempati oleh jenjang SMA/SMK/MA. Hal ini menunjukkan bahwa ada selisih kesenjangan antara jumlah angka partisipasi murni menurut jenjang Pendidikan di Kepulauan Anambas. Selisih kesenjangan ini akan memengaruhi indeks Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini dikarenakan indeks Pendidikan merupakan komponen penting dalam membangun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mesikupun angka partisipasi murni/kasar di Kabupaten Kepulauan Anambas masih terdapat selisih kesenjangan antara jenjang Pendidikan, namun indeks Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan tren yang positif dengan ditandainya nilai indeks meningkat dari 59,48 (2020) menjadi 61,38 (2024) menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2025. Data ini menunjukkan bahwa akses Pendidikan di Kepulauan Anambas mengalami perbaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

KESEHATAN

Dalam upaya meningkatkan derajat dan status kesehatan masyarakat, ketersediaan serta keterjangkauan fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan merupakan faktor kunci yang sangat menentukan. Keberadaan Puskesmas, Puskesmas Keliling (baik darat maupun laut), serta Puskesmas Pembantu berperan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, karena memiliki kemampuan untuk menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok dan pulau-pulau terpencil. Jumlah puskesmas mengalami peningkatan dari 8 unit pada 2020-2021 menjadi 10 unit sejak tahun 2022-2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya penguatan

layanan Kesehatan dasar. Rasio puskesmas per satuan penduduk menunjukkan anomal: dari 1, 39 (2020) dan 1,35 (2021) menurun drastis menjadi 0,2 (2022-2023), lalu melonjak tajam menjadi 4,01 di tahun 2024. Kesenjangan ini bisa menjadi tren positif dibantu dengan adanya fasilitas Rumah Sakit Umum sejumlah 3 unit.

Tabel II- 2
Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024

Fasilitas Kesehatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
Jumlah	3	0	10	44

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2025

Selain itu, keberadaan tenaga kesehatan yang memadai sangat penting dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun jumlah tenaga kesehatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel II- 3
Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024

Tenaga Kesehatan	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian
Jumlah	54	6	258	188	29

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2025

Hal penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang diupayakan agar persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya). Berdasarkan data tenaga kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020–2024 dari dokumen Kepulauan Anambas Dalam Angka 2024, terlihat pola fluktuatif dan ketimpangan dalam distribusi jenis tenaga kesehatan. Jumlah dokter umum mengalami penurunan drastis dari 49 orang di tahun 2023 menjadi 40 orang di tahun 2024, yang berimplikasi serius terhadap rasio layanan kesehatan dasar. Meskipun jumlah dokter spesialis tetap stabil di angka 14 sejak 2021, angka tersebut masih tergolong rendah untuk daerah kepulauan yang membutuhkan layanan rujukan lebih kompleks. Kondisi serupa juga dialami oleh tenaga dokter gigi yang jumlahnya menurun dari 10 menjadi 6 selama rentang waktu lima tahun, menunjukkan perlunya strategi mobilisasi dan

rekrutmen tenaga muda. Di sisi lain, jumlah perawat meningkat signifikan hingga mencapai 258 orang di tahun 2024, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat layanan keperawatan dan promotif preventif. Jumlah bidan juga kembali meningkat di 2024, mengindikasikan perhatian terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau.

Peningkatan jumlah tenaga farmasi dari 13 ke 29 menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan obat dan layanan kefarmasian, meskipun tetap perlu penyesuaian dengan kebutuhan masing-masing fasilitas kesehatan. Sementara itu, jumlah ahli gizi tidak menunjukkan tren konsisten dan justru menurun di 2024, sehingga perlu evaluasi terhadap beban kerja dan target penurunan stunting. Yang paling mengkhawatirkan adalah rasio dokter terhadap populasi yang menurun tajam menjadi 0,121 di tahun 2024, jauh dari standar ideal WHO sebesar 1:1000. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan kekurangan tenaga medis, tetapi juga menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera menyusun strategi rekrutmen, pemetaan beban kerja, dan pemberian insentif berbasis wilayah. Data ini sangat relevan untuk dijadikan dasar perencanaan SDM kesehatan dalam RPJMD 2025 agar distribusi tenaga kesehatan lebih proporsional dan responsif terhadap kebutuhan geografis dan demografis daerah kepulauan.

PEKERJAAN UMUM

Sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur dasar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu memperhatikan kondisi fisik prasarana air minum dan sanitasi. Infrastruktur SPAM baik yang berbasis jaringan maupun non-jaringan mengalami degradasi teknis yang mempengaruhi efektivitas layanan. Data kondisi infrastruktur menunjukkan bahwa sebagian besar unit memerlukan perbaikan ringan hingga berat, yang berdampak pada kontinuitas distribusi air bersih dan pengelolaan limbah yang aman. Kebutuhan revitalisasi, pemeliharaan berkala, serta peningkatan kualitas teknis menjadi prioritas untuk menjamin kelayakan layanan.

Sebagai bagian dari evaluasi terhadap penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dasar, dilakukan pendataan terhadap kondisi fisik berbagai jenis infrastruktur yang mendukung layanan dasar masyarakat. Infrastruktur tersebut mencakup sistem penyediaan air minum (SPAM) baik yang berbasis jaringan perpipaan maupun non-perpipaan, serta instalasi pengolahan limbah. Penilaian kondisi infrastruktur ini penting untuk mengetahui tingkat keberfungsian aset serta sebagai dasar dalam perencanaan pemeliharaan

dan rehabilitasi ke depan. Adapun rincian jumlah dan kondisi infrastruktur dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II- 4
Kondisi Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024

Jenis Infrastruktur	Jumlah Unit	Kondisi Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
SPAM Jaringan Perpipaan	12	7	4	1
SPAM Non-Perpipaan	10	5	3	2
Instalasi Pengolahan Limbah	3	1	1	1

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2025

Berdasarkan data pada tabel, dapat diketahui bahwa jenis infrastruktur dengan jumlah unit terbanyak adalah SPAM Jaringan Perpipaan, yaitu sebanyak 12 unit. Dari jumlah tersebut, 7 unit (58,3%) berada dalam kondisi baik, 4 unit (33,3%) mengalami kerusakan ringan, dan 1 unit (8,3%) dalam kondisi rusak berat.

Sementara itu, SPAM Non-Perpipaan tercatat sebanyak 10 unit, dengan 5 unit (50%) dalam kondisi baik, 3 unit (30%) rusak ringan, dan 2 unit (20%) mengalami kerusakan berat. Adapun Instalasi Pengolahan Limbah memiliki jumlah unit paling sedikit, yaitu hanya 3 unit. Dari total tersebut, masing-masing kondisi terbagi merata: 1 unit (33,3%) dalam kondisi baik, 1 unit rusak ringan, dan 1 unit rusak berat.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar infrastruktur masih dalam kondisi baik, terdapat proporsi yang cukup signifikan dari unit-unit yang memerlukan perhatian, khususnya yang berada dalam kondisi rusak ringan dan berat. Hal ini menandakan perlunya upaya pemeliharaan dan rehabilitasi secara berkala, terutama pada sistem SPAM Non-Perpipaan dan Instalasi Pengolahan Limbah, guna menjamin keberlanjutan pelayanan dasar kepada masyarakat.

PERUMAHAN DAN PENGAWASAN PEMUKIMAN

Penyediaan rumah layak huni merupakan bagian integral dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan pembangunan inklusif. Berdasarkan profil kerusakan rumah warga yang tergolong tidak layak huni, mayoritas mengalami kerusakan sedang hingga berat. Kondisi ini mengindikasikan

urgensi program perbaikan rumah berbasis pemberdayaan masyarakat serta dukungan teknis dari pemerintah pusat maupun daerah. Pendekatan berbasis klaster kerusakan dapat membantu perencanaan intervensi yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Sebagai bagian dari upaya identifikasi kondisi hunian masyarakat, dilakukan pendataan terhadap tingkat kerusakan rumah yang terdampak oleh berbagai faktor, baik akibat bencana, kondisi alam, maupun usia bangunan. Pendataan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan, serta sebagai dasar perencanaan intervensi pemerintah ke depan. Adapun klasifikasi kerusakan rumah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Rincian jumlah dan persentase rumah berdasarkan tingkat kerusakannya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II- 5
Klasifikasi Kerusakan Rumah Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024

Kategori Kerusakan	Jumlah Rumah	Persentase (%)
Rusak ringan	148	32,5
Rusak sedang	203	44,6
Rusak berat	104	22,9

Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2025

Berdasarkan data yang disajikan, jumlah rumah yang mengalami kerusakan terbanyak berada pada kategori rusak sedang, yaitu sebanyak 203 unit atau sekitar 44,6% dari total rumah terdampak. Selanjutnya, rumah dengan kategori rusak ringan tercatat sebanyak 148 unit (32,5%), sedangkan rumah dengan tingkat kerusakan berat berjumlah 104 unit atau 22,9%.

Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas hunian mengalami kerusakan pada tingkat sedang, yang umumnya memerlukan perbaikan struktural namun belum sampai pada tingkat pembongkaran total. Sementara itu, rumah yang mengalami rusak berat memerlukan penanganan lebih lanjut, termasuk kemungkinan relokasi atau pembangunan kembali. Temuan ini menjadi dasar penting dalam menetapkan prioritas penanganan, di mana intervensi dapat difokuskan pada rumah dengan kerusakan berat dan sedang terlebih dahulu, tanpa mengabaikan upaya perbaikan pada kategori rusak ringan.

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kapasitas kelembagaan Satpol PP masih terbatas terutama dalam hal ketersediaan personel bersertifikasi, jumlah pos jaga aktif, serta peralatan pendukung operasi. Sarana dan prasarana seperti armada pemadam kebakaran dan alat komunikasi darurat perlu ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun kualitas. Penguatan kelembagaan Satpol PP sangat diperlukan untuk mendukung penegakan perda, penanganan bencana, dan perlindungan masyarakat yang responsif dan profesional.

Sebagai bagian dari evaluasi kapasitas kelembagaan dalam mendukung upaya penanggulangan kebakaran dan kedaruratan, dilakukan pendataan terhadap sumber daya yang tersedia pada unit pemadam kebakaran. Komponen yang didata meliputi jumlah personel aktif, personel bersertifikat, sarana pos jaga, armada operasional, serta peralatan pendukung. Informasi ini penting untuk mengukur kesiapsiagaan dan efektivitas respon dalam menghadapi potensi kejadian kebakaran dan keadaan darurat lainnya. Rincian data terkait komponen yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 6
Komponen Pendukung Penanggulangan Kebakaran dan Kedaruratan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024

Komponen	Jumlah
Jumlah personel aktif	86
Personel bersertifikat	28
Pos jaga terpadu	7
Armada mobil pemadam	2
Peralatan pendukung (HT, APAR, dll.)	43

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran

Dari data yang tersedia, tercatat sebanyak 86 personel aktif yang saat ini tergabung dalam unit pemadam kebakaran. Namun demikian, hanya 28 personel (32,6%) yang telah memiliki sertifikasi, yang mengindikasikan masih perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi teknis.

Fasilitas fisik pendukung terdiri dari 7 pos jaga terpadu, yang menjadi titik sentral dalam operasional pemantauan dan respon cepat terhadap kejadian

kebakaran. Untuk armada, hanya terdapat 2 unit mobil pemadam kebakaran, yang relatif terbatas jika dibandingkan dengan potensi wilayah pelayanan. Sementara itu, tersedia 43 unit peralatan pendukung seperti HT (*Handy Talkie*), APAR (Alat Pemadam Api Ringan), dan perlengkapan lainnya, yang menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas penanganan di lapangan.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat struktur kelembagaan dan sarana pendukung dasar, namun masih terdapat sejumlah keterbatasan, terutama dalam hal jumlah armada dan personel tersertifikasi. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan kebakaran di masa mendatang.

SOSIAL

Pelayanan sosial bagi kelompok rentan tidak hanya bergantung pada capaian kuantitatif, namun juga kesiapan sistem dukungan yang meliputi sarana fisik, pendamping sosial, dan ragam layanan. Ketersediaan bantuan disesuaikan dengan jenis kebutuhan masing-masing kelompok, seperti alat bantu mobilitas untuk penyandang disabilitas, layanan reunifikasi untuk anak, dan fasilitas hunian sementara bagi lansia dan korban bencana. Data berikut mencerminkan distribusi jenis bantuan sosial yang telah disalurkan selama tahun berjalan.

Sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan, telah dilakukan pendistribusian bantuan sosial yang menyasar beberapa kategori penerima, antara lain penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia (lansia) terlantar, serta korban bencana. Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok, baik dalam bentuk barang, layanan, maupun dukungan psiko-sosial. Rincian jumlah penerima serta jenis bantuan utama yang diberikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 7
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kelompok Rentan

Kelompok Sasaran	Jumlah Penerima	Jenis Bantuan Utama
Disabilitas terlantar	7	Permakanan, alat bantu mobilitas
Anak terlantar	3	Layanan reunifikasi, pendidikan

Kelompok Sasaran	Jumlah Penerima	Jenis Bantuan Utama
Lansia terlantar	12	Permakanan, tempat tinggal
Korban bencana	9	Permakanan, sandang, trauma healing

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Berdasarkan data yang tersedia, kelompok lansia terlantar merupakan penerima bantuan sosial terbanyak, yaitu sebanyak 12 orang, dengan jenis bantuan utama berupa permakanan dan penyediaan tempat tinggal. Selanjutnya, korban bencana tercatat sebanyak 9 orang yang menerima bantuan dalam bentuk permakanan, sandang, serta layanan trauma healing sebagai bagian dari dukungan pemulihan psikologis pascakejadian.

Kelompok disabilitas terlantar menerima bantuan sebanyak 7 orang, dengan bantuan utama berupa permakanan serta alat bantu mobilitas, yang sangat penting untuk menunjang aktivitas harian dan kemandirian. Adapun kelompok anak terlantar yang berjumlah 3 orang, mendapatkan dukungan dalam bentuk layanan reunifikasi keluarga serta akses terhadap pendidikan, sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak dasar anak.

Data ini menunjukkan bahwa intervensi bantuan sosial telah diarahkan secara tepat kepada kelompok rentan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Namun, jumlah penerima yang relatif kecil mengindikasikan bahwa cakupan layanan masih terbatas dan perlu ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun keberlanjutan program.

2.1.1.1 Data Capaian SPM Tahun 2024

A. Bidang Urusan Pendidikan

Capaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan hasil yang bervariasi antar jenjang, dengan kecenderungan capaian yang cukup baik pada pendidikan dasar, namun masih terdapat tantangan signifikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan. Pada jenjang PAUD, tingkat layanan telah mencapai 96,72% dari total sasaran, mencerminkan akses yang relatif luas. Namun demikian, berbagai indikator mutu belum memenuhi target. Angka partisipasi sekolah dan partisipasi murni masing-masing hanya mencapai 63,69%, sementara hanya 46% satuan PAUD yang telah terakreditasi minimal B. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi minimal S1/D-IV baru mencapai 60%, dan hanya

15% pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang bersertifikat. Selain itu, rasio pengawas sekolah untuk PAUD sangat rendah (14,9%), dan kecukupan formasi guru ASN hanya 30%. Indeks distribusi guru tergolong baik (80%), namun proporsi guru penggerak sangat minim, hanya 8% dari target.

Pada jenjang pendidikan dasar, baik di tingkat SD maupun SMP, capaian kinerja tergolong tinggi, terutama dalam hal akses dan hasil belajar peserta didik. Di tingkat SD, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi sekolah masing-masing mencapai 98,80% dan 99,20%. Kemampuan literasi mencapai 99,86%, sedangkan numerasi 91,50%. Indikator lainnya seperti perbedaan skor literasi dan numerasi juga cukup baik, meskipun perlu peningkatan, terutama pada skor numerasi (69,87%). Indeks iklim keamanan dan kebhinekaan juga tinggi, di atas 94%. Ketersediaan guru ASN mencapai 70%, dengan distribusi 80%, dan proporsi PTK bersertifikat 75%. Namun demikian, jumlah guru penggerak masih rendah (25%). Di tingkat SMP, capaian indikator partisipasi dan hasil belajar juga tergolong tinggi. Angka partisipasi kasar mencapai 91,5% dan partisipasi sekolah 98,8%. Kemampuan literasi dan numerasi mendekati target maksimal, yakni 99,35% dan 96,60%. Skor iklim sekolah baik, dengan nilai di atas 97% untuk aspek keamanan dan kebinekaan. Sementara itu, proporsi guru bersertifikat berada pada angka 50%, dan guru penggerak mencapai 60%.

Berbeda dengan dua jenjang sebelumnya, capaian kinerja pada pendidikan kesetaraan masih sangat rendah. Dari total sasaran 1.208 peserta, hanya 458 yang terlayani (38%). Sebagian besar indikator capaian masih jauh dari target, bahkan beberapa tidak menunjukkan pencapaian sama sekali, seperti kemampuan numerasi, perbedaan skor literasi, indeks keamanan, kebinekaan, dan formasi guru ASN yang seluruhnya berada pada angka 0%. Meskipun demikian, terdapat beberapa capaian moderat seperti angka partisipasi kasar (63,69%), literasi (65,60%), dan distribusi guru (70%). Rendahnya capaian pada sektor ini menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk mendorong akses dan kualitas layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang belum tersentuh pendidikan formal.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat pencapaian yang membanggakan terutama pada pendidikan dasar, berbagai tantangan masih harus dihadapi, terutama terkait kualitas tenaga pendidik, ketersediaan formasi ASN, dan perluasan layanan pada pendidikan kesetaraan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi intervensi yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk menjamin

pemerataan layanan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh jenjang di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel II- 8
Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
1.	**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**	**1800**	**1741**	**96,72**
	1) Angka partisipasi sekolah	100	63,69	63,69
	2) Angka partisipasi murni	100	63,69	63,69
	3) Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	100	46	46,00
	4) Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma empat (D-IV)	100	60	60.00
	5) Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	100	14,9	14,9
	6) Kecukupan formasi guru ASN	100	30	30.00
	7) Indeks distribusi Guru	100	80	80.00
	8) Proposi PTK yang Besertifikat	100	15	15.00
	9) Proporsi PTK bergerak	50	4	8.00
2.	**PENDIDIKAN DASAR**	**10.803**	**10**	**0,09%**
	SD			
	1) Angka partisipasi kasar	100	98,80	98,80
	2) Angka partisipasi sekolah	100	99,2	99,20
	3) Kemampuan literasi	70	69.9	99,86
	4) Kemampuan numerasi	60	54,9	91,50
	5) Perbedaan skor literasi	80	79,44	99.30
	6) Perbedaan skor numerasi	80	41,92	69,87
	7) Indeks iklim keamanan	75	70,53	94,04
	8) Indeks iklim kebinekaan dan Inklusivitas	75	72,51	96,68
	9) Indeks iklim inklusivitas	75	54,85	73,13
	10) Kecukupan formasi guru ASN	100	70	70.00
	11) Indeks distribusi guru	100	80	80.00
	12) Proposi PTK yang Besertifikat	100	75	75.00
	13) Proporsi PTK bergerak	100	25	25.00
	SMP			
	1) Angka partisipasi kasar	100	91,5	91,50
	2) Angka partisipasi sekolah	100	98,8	98,80
	3) Kemampuan literasi	77	76,5	99,35
	4) Kemampuan numerasi	70	67,62	96,60

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	5) Perbedaan skor literasi	70	68,32	97,60
	6) Perbedaan skor numerasi	57	57,26	100.00
	7) Indeks iklim keamanan	70	69,73	99,61
	8) Indeks iklim kebinekaan	75	73,32	97,76
	9) Indeks iklim inklusivitas	100	65,65	87,53
	10) Kecukupan formasi guru ASN	100	70	70.00
	11) Indeks distribusi guru	100	85	85.00
	12) Proporsi PTK bersertifikat	50	25	50.00
	13) Proporsi PTK penggerak	50	30	60.00
3.	**PENDIDIKAN KESETARAAN**	**1208**	**458**	**38%**
	1) Angka partisipasi kasar	100	63,69	63,69
	2) Angka partisipasi sekolah	100	63,69	63,69
	3) Kemampuan literasi	70	45,92	65.60
	4) Kemampuan numerasi	0	0	0
	5) Perbedaan skor literasi	0	0	0
	6) Perbedaan skor numerasi	70	42,21	60.30
	7) Indeks iklim keamanan	0	0	0
	8) Indeks iklim kebinekaan	0	0	0
	9) Indeks iklim inklusivitas	70	43.06	61,51
	10) Kecukupan formasi guru ASN	0	0	0
	11) Indeks distribusi guru	100	70	70.00
	12) Proporsi PTK bersertifikat	0	0	0
	13) Proporsi PTK penggerak	0	0	0

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Secara umum, bidang urusan Pendidikan telah berjalan secara baik, hal ini dilatarbelakangi oleh urusan Pendidikan termasuk program prioritas yang termasuk dalam *mandatory spending* sebesar 20% dari APBD sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1)

B. Bidang Urusan Kesehatan

Pelayanan kesehatan ibu hamil menunjukkan capaian cukup tinggi, yaitu sebesar 96,42%, namun jika dirinci lebih lanjut terdapat beberapa indikator dengan capaian rendah seperti pemeriksaan *Glukoprotein Urin* yang hanya mencapai 22,58% dari target, serta skrining *triple* eliminasi (Hepatitis B, Sifilis, dan HIV) yang hanya 48,62%. Ini menandakan perlunya peningkatan dukungan alat dan tenaga untuk deteksi dini faktor risiko pada kehamilan. Sementara itu, tenaga kesehatan untuk ibu hamil secara umum sudah

terpenuhi 100%, menunjukkan ketersediaan SDM yang baik. Pelayanan ibu bersalin juga mencapai 95,10%, namun indikator yang sama seperti media promosi dan tenaga kesehatan kembali menunjukkan capaian maksimal, menandakan kesiapan sistem yang kuat pada aspek non-medis dan dukungan tenaga.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir menunjukkan capaian ideal, yakni 100% secara umum, meskipun vaksin hepatitis B hanya 72,73%, menjadi catatan penting terkait distribusi vaksin. Pelayanan balita juga cukup baik dengan capaian 87,47%, tetapi cakupan imunisasi dasar masih di bawah target nasional, seperti BCG (62,5%), polio (65,71%), dan DPT-HB-Hib (65,04%), menunjukkan perlunya intervensi lebih intensif dalam program imunisasi. Pelayanan pada usia pendidikan dasar telah mencapai 100%, namun keterlibatan tenaga non-kesehatan seperti guru dan kader masih nihil, padahal keberadaan mereka penting dalam promosi kesehatan di lingkungan sekolah.

Pelayanan pada usia produktif memiliki capaian 80,31%, dengan beberapa komponen alat pemeriksaan dan pemantauan seperti tes gula darah dan Hb yang masih belum tersedia atau digunakan optimal. Hal ini menandakan bahwa meskipun edukasi dan tenaga kesehatan tersedia, akses terhadap alat diagnostik masih menjadi tantangan. Pada pelayanan lansia, belum terdapat data capaian sehingga menjadi area kosong yang perlu segera ditindaklanjuti dalam sistem pelaporan dan pencatatan.

Pelayanan untuk penderita hipertensi dan diabetes melitus telah menunjukkan capaian yang cukup baik masing-masing sebesar 72,31% dan 93,47%. Namun, distribusi alat diagnostik dan bahan medis habis pakai masih menjadi kendala dalam konsistensi pemantauan kondisi pasien. Sementara itu, pelayanan untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat telah menunjukkan capaian penuh 100%, menandakan sistem penanganan dan pencatatan yang telah berjalan baik.

Secara keseluruhan, capaian pelayanan kesehatan sudah baik pada aspek SDM dan edukasi, namun masih terdapat tantangan besar pada ketersediaan alat diagnostik dan upaya deteksi dini pada kelompok-kelompok risiko tinggi, terutama ibu hamil, balita, serta kelompok usia produktif. Pemantauan rutin, distribusi alat kesehatan, dan keterlibatan lintas sektor menjadi aspek penting untuk ditingkatkan guna mencapai pelayanan kesehatan yang lebih merata dan optimal.

Tabel II- 9
Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
1.	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**893**	**861**	**96,42%**
	1) Vaksin Tetanus Difteri (Td)	778	752	77,33%
	2) Tablet tambah darah	778	677	87,02%
	3) Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	778	752	96,66
	4) Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	778	778	100,00
	5) Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	778	752	96,66
	6) Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	155	35	22,58
	7) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	778	377	48,62
	8) Kartu ibu/rekam medis ibu	778	752	96,66
	9) Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	778	752	96,66
	10) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	215	215	100,00
	11) Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	0	0	0,00
	12) Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	3	3	100,00
	13) Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	162	162	100,00
	14) Tenaga kesehatan: Bidan (angka ideal: dengan rasio 1:1000 penduduk)	128	128	100,00
	15) Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	14	14	100,00
	16) Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	15	15	100,00

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	17) Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	778	478	61,44
2.	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	**734**	**698**	**95,10**
	1) Formulir partograf	734	698	95,10
	2) Kartu ibu/rekam medis ibu	734	698	95,10
	3) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)(Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	734	698	95,10
	4) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	215	215	100,00 %
	5) Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	3	3	100,00
	6) Tenaga kesehatan: Bidan (angka ideal: dengan rasio 1:1000 penduduk)	128	128	100,00
	7) Tenaga kesehatan: Perawat (angka ideal: dengan rasio 1:885 penduduk)	162	162	100,00
	8) Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	14	14	100,00
	9) Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	15	15	100,00
3.	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	**737**	**737**	**100 %**
	1) Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	737	536	72,73
	2) Vitamin K1 injeksi	737	737	100
	3) Salep/tetes mata antibiotik	737	737	100
	4) Formulir bayi baru lahir	737	737	100
	5) Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	737	737	100
	6) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	737	737	100

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	7) Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70	70	100
	8) Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	4	4	100
	9) Tenaga kesehatan : Bidan	128	128	100
	10) Tenaga Kesehatan : Perawat	162	162	100
	11) Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	14	14	100
	12) Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan	21	21	100
	13) Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	15	15	100
	14) Kader kesehatan	675	675	100
4.	**PELAYANAN KESEHATAN BALITA**	**3.655**	**3.197**	**87,47%**
	1) Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	3655	3197	87,47
	2) Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	3655	3197	87,47
	3) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3655	3197	87,47
	4) Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	612	580	94,77
	5) Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	2779	2744	98,74
	6) Vaksin imunisasi dasar: BCG	904	565	62,50
	7) Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	904	594	65,71
	8) Vaksin imunisasi dasar: IPV	904	638	70,58
	9) Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB – Hib	904	588	65,04
	10) Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	904	597	66,04
	11) Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB-Hib	604	538	89,07
	12) Vaksin imunisasi lanjutan : Campak – Rubella	604	615	100
	13) Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	9000	7157	79,52
	14) Peralatan Anafilaktik	10	11	100
	15) Formula Terapi Gizi Buruk	15	13	100
	16) Tenaga kesehatan : Dokter	23	23	100
	17) Tenaga kesehatan : Bidan	128	128	100

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	18) Tenaga kesehatan : Perawat	162	162	100
	19) Tenaga kesehatan : Ahli Giz	15	15	100
	20) Guru Paud	0	0	0
	21) Kader Kesahtan	0	0	0
5.	**Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**	**8408**	**8408**	**100**
	1) Form pencatatan/buku kesehatanku (Sesuai peserta didik sekolah/madrasah/pesantren)	8408	8408	100.
	2) Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	8408	8408	100.
	3) Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	108	108	100
	4) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantre)	0	0	0
	5) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	54	54	100
	6) Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota	1293	1293	100

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	7) Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	10	10	100
	8) Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	770	770	100
	9) Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	10	10	100
	10) Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	1261	1079	85,57
	11) Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	23	23	100
	12) Tenaga kesehatan : Bidan	128	128	100
	13) Tenaga kesehatan : Perawat	162	162	100
	14) Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	15	15	100
	15) Tenaga Kesehatan : Kefarmasian	14	14	100
	16) Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	21	21	100
	17) Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	0	0	0
	18) Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	0	0	0
6.	**Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**	**32.437**	**26.050**	**80,31 %**
	1) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	10	10	100%
	2) Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	10	10	100%
	3) Alat : Tensimeter	10	10	100%
	4) Alat : Glukometer	20	24	80
	5) Alat : Pemeriksa Hb	0	0	0

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	6) Alat : Tes strip gula darah,lancet, kapas alcohol	32.437	9,575	29,60
	7) Alat : KIT IVA Tes	10	10	100
	8) Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	0	0	0
	9) Kit Opthalmologi Komunitas	0	0	0
	10) Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	10	10	100%
	11) Alat Pelayanan KB	0	0	0
	12) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	0	0	0
	13) Vaksin Tetanus Difteri (td)	0	0	0
	14) Tenaga kesehatan : Dokter	10	10	100
	15) Tenaga kesehatan : Bidan	10	10	100
	16) Tenaga kesehatan : Perawat	10	10	100
	17) Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	10	10	100
	18) Tenaga Kesehatan Masyarakat	10	10	100
	19) Tenaga kesehatan Terlatih dan mempunyai Kualifikasi tertentu	0	0	0
7.	**Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**			
	1) Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	0	0	
	2) Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	0	0	
	3) Alat pemeriksaan kolesterol	0	0	
	4) Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	0	0	
	5) Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	0	0	

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	6) Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	0	0	
	7) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	0	0	
	8) Tenaga kesehatan : Dokter	0	0	
	9) Tenaga kesehatan : Bidan	0	0	
	10) Tenaga kesehatan : Perawat	0	0	
	11) Tenaga kesehatan : Ahli Gizi			
	12) Tenaga Kesehatan Masyarakat	0	0	
	13) Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	0	0	
8.	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**	**3.923**	**3.546**	**72,31%**
	1) Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	10	10	100
	2) Obat hipertensi	3.923	3.546	72,3`
	3) Tensimeter	10	10	100
	4) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sehat Indonesia (ASIK)	10	10	100
	5) Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	10	10	100
	6) Tenaga kesehatan : Dokter	10	10	100
	7) Tenaga kesehatan : Bidan	10	10	100
	8) Tenaga kesehatan : Perawat	10	10	100
	9) Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	10	10	100
	10) Tenaga Kesehatan : Tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku	10	10	100
	11) Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	10	10	100
	12) Tenaga kesehatan : Tenaga Masyarakat	10	10	100
9.	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus**	**812**	**759**	**93,47%**
	1) Obat Diabetes Melitus	812	759	93,47

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	2) Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	30	24	80.00
	3) BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	812	759	93,47
	4) 4) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas	10	10	100
	5) 5) Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	10	10	100
	6) Tenaga kesehatan : Dokter	10	10	100
	7) Tenaga kesehatan : Bidan	10	10	100
	8) Tenaga kesehatan : Perawat	10	10	100
	9) Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	10	10	100
	10) Tenaga Kesehatan Masyarakat	10	10	100
	11) Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	10	10	100
10.	**Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**	**38**	**38**	**100 %**
	1) Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik	10	10	100

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	2) Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	10	10	100
	3) Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	10	10	100
	4) Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	10	10	100
	5) Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	10	10	100
	6) Tenaga kesehatan : Dokter	10	10	100
	7) Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	10	10	100
	8) Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	0	0	0
	9) Tenaga profesional lainnya	0	0	0
11.	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis**	**1.172**	**1.196**	**100.00 %**
	1) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	10	10	100
	2) Reagen Zn TB	75	75	100
	3) Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	6,205	2,500	40,29
	4) Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	2,344	2,392	100
	5) Catridge Tes Cepat Molekuler	1581	1196	75,65
	6) Formulir Pencatatan dan Pelaporan	275	275	100
	7) Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	13	13	100
	8) Tuberkulin	40	40	100
	9) Dokter/ Dokter Spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	13	13	100
	10) Tenaga Kesehatan : Perawat	13	13	100

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	11) Tenaga Kesehatan : Kefarmasian	13	13	100
	12) Tenaga kesehatan masyarakat	0	0	0
	13) Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	13	13	0
	14) Tenaga kesehatan : Radiografer	0	0	0
	15) Kader Kesehatan	0	0	0
	16) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	0	0	0
12.	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)**	**1.045**	**520**	**49,76**
	1) Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	10	10	100
	2) Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	1045	520	49,76
	3) Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	1045	520	49,76
	4) Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	13	13	100
	5) Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	0	0	0
	6) Tenaga Kesehatan :Tenaga Perawat	13	13	100
	7) Tenaga Kesehatan: Bidan	13	13	100
	8) Tenaga Kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	13	13	100
	9) Tenaga kesehatan masyarakat	0	0	0
	10) Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	0	0	0

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Capaian urusan bidang Kesehatan sudah selaras dengan perhitungan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pelayanan Kesehatan yang maksimal dan merata membuat program dan kegiatan di urusan bidang Kesehatan bermanfaat dan mendukung tercapai indikator keberhasilan dalam upaya meningkatkan Kesehatan Masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan Kesehatan yang berkualitas, perbaikan gizi, dan kemajuan dalam teknologi medis. Angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024 ialah 73,77 tahun, naik dari periode sebelumnya yakni 72,98 tahun sesuai data BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2025.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Urusan Pekerjaan Umum merupakan indikator krusial dalam mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam menyediakan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat. Infrastruktur ini meliputi berbagai sektor vital seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, penyediaan sistem irigasi untuk mendukung sektor pertanian, akses terhadap air minum yang aman dan mencukupi, serta sistem sanitasi yang higienis dan ramah lingkungan. Semua aspek tersebut berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal. Tingkat keberhasilan suatu daerah dalam memenuhi target SPM menunjukkan efektivitas pemerintah daerah dalam menjamin keterjangkauan, kualitas, dan keberlanjutan layanan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, pencapaian ini sekaligus menjadi cerminan nyata atas komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah yang adil, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Bidang Air Minum dan Sanitasi menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan layanan dasar yang mendukung kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan data capaian, akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan menunjukkan kinerja cukup baik, dengan persentase pencapaian sebesar 68,28% untuk aspek kuantitas dan kualitas. Namun, capaian akses air minum melalui SPAM non-jaringan perpipaan masih tergolong rendah, hanya mencapai 25,35%. Sementara itu, pelayanan pengolahan air limbah domestik menunjukkan capaian yang sangat rendah, yakni hanya 13,93% untuk indikator

kepemilikan akses pengolahan limbah domestik, dan belum terdapat capaian pada indikator akses sanitasi aman dan layak. Capaian ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam penyediaan air bersih perpipaan, masih diperlukan upaya serius untuk meningkatkan layanan air minum non-perpipaan dan sanitasi, guna menjamin kesetaraan akses terhadap infrastruktur dasar yang layak dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Tabel II- 10
Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
1.	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari**	**12.760**	**11.945**	**74,89**
	Jumlah yang harus dilayani	12.760	8.712	68,28 %
	1) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	12.760	8.712	68,28 %
	2) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak Berbau	12.760	8.712	68,28 %
	Bukan Jaringan Perpipaan			
	3) Ukuran kuantitas Air Minum,Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas	12.760	3.233	25,35%

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	(kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)			
	4) Ukuran kuantitas Air Minum , Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh,tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	12.760	3,233	25,35%
2.	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**			
	1) Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	12.760	1.781	13,93%
	2) Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala,	0	0	0

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T			
	3) Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	0	0	0

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Pelaksanaan bidang pekerjaan umum dan tata ruang memegang peranan penting dalam memastikan kelancaran fungsi infrastruktur. Sejalan dengan visi yang tertuang dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kebijakan tata ruang diarahkan untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, produktif, serta berkelanjutan.

Pertumbuhan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan akan perumahan dan permukiman. Secara umum, kondisi permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas tergolong baik, meski masih ditemukan kawasan dengan kondisi memprihatinkan, seperti area permukiman nelayan. Tingkat kepadatan bangunan bervariasi: permukiman padat terkonsentrasi di pusat kegiatan ekonomi dan sosial, sementara permukiman dengan kepadatan sedang hingga rendah tersebar di wilayah perdesaan.

Data menunjukkan adanya perbaikan dalam sektor perumahan: persentase rumah dengan luas lantai di bawah 20 m² menurun dari 2,2% pada tahun 2020 menjadi 0,9% di 2023. Di samping kondisi bangunan, akses terhadap air minum dan sanitasi layak juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Berdasarkan data BPS, akses terhadap air minum layak naik dari 27,53% menjadi 39,9% pada tahun 2021, sedangkan akses terhadap sanitasi layak meningkat signifikan dari 22,04% di 2019 menjadi 30,46% pada 2023.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang perumahan rakyat adalah indikator kunci untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses ke tempat tinggal yang layak, terutama bagi mereka yang terdampak bencana. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan rumah sementara dan permanen bagi korban bencana, yang memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan. Program ini meliputi upaya respons cepat dalam merehabilitasi atau membangun kembali rumah yang rusak atau hancur, serta memastikan hunian yang diberikan dapat memberikan perlindungan yang cukup dan mendukung pemulihan sosial dan ekonomi bagi korban bencana.

Capaian kinerja pada indikator rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana menunjukkan hasil maksimal, dengan seluruh target sebanyak 17 unit rumah berhasil direhabilitasi (100%). Sementara itu, komponen lainnya seperti pembangunan kembali, pemukiman kembali, dan bantuan rumah sewa belum ada pelaksanaan karena tidak terdapat target. Demikian pula, fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi belum berjalan karena tidak ada target maupun realisasi, menunjukkan belum ada kebutuhan atau program yang dirancang pada periode ini.

Tabel II- 11
Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
1.	**Penyediaan dan Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota**	**17**	**17**	**100%**

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	1) Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	17	17	100%
	2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana	-	-	-
	3) Pemukiman Kembali bagi korban bencana	-	-	-
	4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	-	-
2.	**Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**-**	**-**	**-**
	1) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	-	-	-
	2) Penilaian oleh tim penaksir (appraisal)	-	-	-
	3) Proses sosialisasi kepada masyarakat, dan	-	-	-
	4) proses perggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	-	-	-
	5) Banuan akses Rumah Sewa layak Huni	-	-	-

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

E. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian kinerja dalam berbagai bidang pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta kebencanaan menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan sebagian besar indikator mencapai 100%. Untuk pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, seluruh 48.737 warga yang harus dilayani berhasil memperoleh layanan yang diharapkan. Ini mencakup standar operasional prosedur (SOP) penegakan peraturan daerah dan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP yang semua mencapai 100%.

Namun, ada indikator yang tidak ada pelaksanaannya, seperti layanan terhadap kerugian materiil atau pengobatan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda.

Di bidang kebencanaan, semua indikator juga tercapai dengan sempurna. Pemetaan lokasi rawan bencana, identifikasi warga, dan sosialisasi mengenai risiko bencana telah dilaksanakan dengan baik. Penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana dan peningkatan kapasitas SDM juga tercapai 100%. Hal yang sama berlaku untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan berbagai langkah seperti aktivasi sistem komando penanganan darurat, pendataan korban, dan respon cepat darurat bencana yang terlaksana sepenuhnya. Namun, pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, meskipun sebagian besar indikator tercapai 100%, ada satu indikator terkait waktu tanggap yang hanya tercapai 45,45%, menandakan perlu adanya peningkatan dalam hal kecepatan respons.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan yang optimal dalam bidang ketertiban umum dan kebencanaan, meskipun ada beberapa area yang masih perlu perhatian lebih lanjut, terutama terkait respons kebakaran dan penanganan kerugian akibat pelanggaran perda.

Tabel II- 12
Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
1.	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48.737	48.737	100%
	1) Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	30	30	60%

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalanpejabat/orang orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	3	3	100%
	3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (jumlah dan kualitas personil/SDM)	8	8	100%
	4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, asset, pekerjaan, umum, perumahan dan pemukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan Kesehatan) dalam bentuk	0	0	0

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	dokumen yang sah dan legal			
	5) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0	0	0
	6) Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	0	0	0
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	48.737	48.737	100%
	1) Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah/legal	1	1	100%
	2) Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	2	2	100%
	3) Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana,	2000	2000	100%

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	melalui media sosial dan wahana multimedia)			
	4) Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	30	30	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	48.737	48.737	100%
	1) Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, …. dll)	15	15	100%
	2) Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada Di kawasan rawan bencana)	98	98	100%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	48.737	48.737	100%
	1) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi system komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	5	5	100%
	2) Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban	20	20	100%

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	bencana			
	3) Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1	1	100%
	4) Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0	0	0
	5) Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	10	10	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	48.737	48.737	100
	1) Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakukasi (layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	10	10	45,45
	2) Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadam di Pemukiman, dll)	4	4	100

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	3) Sarana prasarana pemadam kebakaran, (pos damkar, dan mobil damkar sebagai contoh; mobil damkar, kapal damkar, mobil penyelamatan, mobil tangka air, mobil komanda, dll), penyelamatan dan evakuasi (helm, petugas penyelamatan, Jaket, dll)	111	111	100
	4) Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (Jumlah apartur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam 1)	114	114	100
	5) Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	1	1	100
	6) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwayang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak social akibat kebakaran)	-	-	-

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Secara keseluruhan, Kabupaten Kepulauan Anambas berhasil melayani seluruh penduduknya sebanyak 48.737 orang untuk lima jenis layanan publik utama, yaitu ketentraman dan ketertiban umum, informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penyelamatan dan evakuasi korban

kebakaran. Masing-masing layanan dicatat memiliki rasio capaian 100% terhadap jumlah warga yang "harus dilayani" dan "terlayani," meski ada variasi kinerja pada sub-indikator tertentu.

Pada layanan ketentraman dan ketertiban umum, seluruh masyarakat terlayani, tetapi kualitas sarana prasarana Satpol PP baru mencapai 60% dari target 30 unit/format. Standar operasional prosedur (SOP) dan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas sama-sama mencapai 100%, menandakan bahwa prosedur penegakan Perda dan pelatihan personil telah berjalan sesuai rencana. Namun sampai batas pelaporan, layanan kompensasi material dan pengobatan bagi korban penegakan Perda/Perkada belum terealisasi sama sekali.

Untuk pelayanan informasi rawan bencana, semua sub-indikator telah mencapai target 100%. Kabupaten Kepulauan Anambas telah menerbitkan satu dokumen Kajian Risiko Bencana, memetakan dua warga di kawasan rawan, menyosialisasikan KIE kepada 2.000 penduduk, serta memasang 30 rambu evakuasi dan papan informasi publik. Capaian sempurna ini mencerminkan komitmen daerah dalam mitigasi risiko di tahap awal.

Pada tahap pencegahan dan kesiapsiagaan, 15 unit sarana-prasarana tanggap darurat—seperti tenda komando, mobil rescue, dan dapur umum—telah tersedia sesuai target. Pelatihan bagi 98 aparat dan warga di area rawan bencana juga selesai 100%, menegaskan kesiapan teknis dan sumber daya manusia dalam menghadapi potensi bencana.

Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana memicu respons penuh di semua sub-indikator: sistem komando darurat diaktifkan lima kali, 20 korban terdokumentasi, satu status darurat ditetapkan, dan sepuluh operasi pencarian serta evakuasi dilaksanakan. Akan tetapi, sistem respon cepat untuk kejadian luar biasa belum diimplementasikan.

Sementara itu, layanan damkar dan penyelamatan kebakaran mencatat 100% terpenuhinya SOP, ketersediaan 111 unit sarana-prasarana, pelatihan 114 personil, serta penanganan satu korban jiwa langsung. Tantangannya terletak pada response time: hanya 45,45% insiden berhasil ditangani dalam kurun 15 menit sesuai standar, dan belum ada laporan terkait layanan penyelamatan trauma sosial bagi korban luka atau dampak psikososial.

Dari keseluruhan capaian, Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan performa kuat terutama dalam prosedur, pelatihan, dan kesiapsiagaan bencana. Titik perbaikan terletak pada peningkatan kecepatan respons

kebakaran, pengadaan sarana Satpol PP, implementasi layanan ganti rugi serta pengobatan korban Perda/Perkada, pengaktifan sistem KLB, dan penyediaan dukungan trauma sosial pasca-kebakaran.

F. Bidang Urusan Sosial

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Urusan Sosial mencakup berbagai upaya rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, dan pengemis. Program rehabilitasi sosial dasar ini berhasil memberikan perlindungan dan bantuan di luar panti sosial, memastikan mereka mendapatkan layanan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, perlindungan sosial juga diberikan kepada korban bencana di daerah kabupaten/kota, dengan memastikan dukungan yang memadai selama dan setelah masa darurat. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan sosial yang layak dan sesuai dengan SPM yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis terhadap data capaian pelayanan rehabilitasi sosial dasar, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar layanan yang diberikan kepada penerima manfaat, seperti penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia, gelandangan, dan pengemis, telah mencapai hasil yang sangat baik, dengan capaian hampir 100%. Layanan utama seperti pengaduan, permakanan, sandang, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta reunifikasi keluarga berhasil dipenuhi dengan sangat baik di semua kelompok penerima. Namun, terdapat beberapa area yang masih perlu perhatian lebih, seperti penyediaan alat bantu, perbekalan kesehatan, serta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, terutama pada kelompok penyandang disabilitas terlantar. Meskipun demikian, capaian yang hampir sempurna dalam layanan lainnya menunjukkan upaya yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti sosial.

Tabel II- 13
Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
1.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Orang**	**2024**	**100%**
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	7	7	100%
	2) Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	1	1	100
	3) Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	7	7	100
	4) Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	1	1	-
	5) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	1	1	-
	6) Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur	7	7	-

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)			
	7) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	0	0	-
	8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	0	0	-
	9) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk kependudukan /Bukti Kepemilikan NIK	1	1	100-
	10) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	1	1	100
	11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	1	1	100
	12) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	1	1	100
	13) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang	7	7	100

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)			
2.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial (Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti)**	**1**	**1**	**100**
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	1	1	100
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	1	1	100
	3) Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	1	1	100
	4) Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	1	1	100
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima	1	1	100

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)			
	7) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar (pemberian bimbingan sosial keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	1	1	100
	8) Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk/ bukti kepemilikan KTP	1	1	100
	9) Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar ((fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	1	1	100
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	1	1	100
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	1	1	100
	12) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	1	1	100
3.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial)**	**1**	**1**	**100%**
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan	1	1	100%

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial			
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	1	1	100%
3)	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	1	1	100%
4)	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	1	1	100%
5)	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	1	1	100%
6)	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100%
7)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar	1	1	100%

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)			
	8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	1	1	100%
	9) Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk/ Bukti kepemilikan NIK	1	1	100%
	10) Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	1	1	100%
	11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	1	1	100%
	12) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	1	1	100%
	13) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	1	1	100%
4.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial (Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitas dasar tuna sosial diluar panti)**	**1**	**1**	**100%**
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan	1	1	100%

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial			
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	1	1	100%
3)	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	1	1	100%
4)	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	1	1	100%
5)	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100%
6)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	1	1	100%
7)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak	1	1	100%

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)			
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	100%
	9) Akses ke layanan pendidikan dan 1 1 100,00 kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	1	1	100%
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	1	1	100%
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	1	1	100%
	12) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	1	1	100%
5.	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota**	**1**	**1**	**100%**
	1) Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	1	1	100%
	2) Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian	1	1	100%

No.	Indikator	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian %
	lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)			
	3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	1	1	100%
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	1	1	100%
	5) Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	1	1	100%

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

2.1.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB

Data menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 6,10%, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 5,53%, dan kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 4,98%. Penurunan ini dapat diasumsikan sebagai dampak dari dinamika eksternal seperti pandemi COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas pertanian dan distribusi hasil produksi. Namun, tren mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2023 dengan kenaikan kontribusi menjadi 5,52%, dan terus meningkat hingga mencapai 6,00%

pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dan penguatan sektor pertanian, baik melalui kebijakan pembangunan daerah, inovasi teknologi pertanian, maupun peningkatan kapasitas petani.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pertanian merupakan sektor penting, namun rentan terhadap gangguan eksternal dan memerlukan intervensi kebijakan yang berkelanjutan dan terfokus. Upaya penguatan sektor ini melalui modernisasi, diversifikasi komoditas, serta pengembangan infrastruktur penunjang menjadi sangat penting untuk memastikan stabilitas dan peningkatan kontribusinya terhadap perekonomian daerah dalam jangka Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 14
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi PDRB	6.10	5,53	4,98	5,52	6,00

Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2025

Tabel II- 15
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan	-2.15	0,76	1,68	2,77	0,49

Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2025

Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dan memegang peranan strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, percepatan pembangunan di sektor pertanian menjadi suatu keharusan guna mendorong peningkatan produktivitas yang lebih optimal. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan kemajuan signifikan dalam pembangunan pertanian, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani. Di samping itu, dalam konteks era perdagangan

bebas, produk-produk pertanian diharapkan mampu menjadi komoditas unggulan yang memiliki daya saing tinggi, baik di pasar domestik maupun global.

2.2 Evaluasi Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD

Selama periode pelaksanaan RPJMD 2021–2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan sejumlah indikator makro dan indikator tujuan serta sasaran sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Evaluasi terhadap capaian indikator tersebut dilakukan berdasarkan target RPJMD serta realisasi kinerja yang tercatat dalam publikasi BPS 2024.

Indikator Makro Pembangunan

Secara umum, capaian indikator makro menunjukkan hasil yang cukup positif meskipun masih terdapat beberapa gap yang perlu diantisipasi pada akhir periode RPJMD Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2023 tercatat sebesar 4,89%, masih berada di bawah target RPJMD sebesar 5,5%. Hal ini dipengaruhi oleh fluktuasi sektor perikanan dan belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berhasil meningkat menjadi 71,23, mendekati target 72,00. Peningkatan terjadi seiring dengan membaiknya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Angka kemiskinan menunjukkan capaian sebesar 7,98%, yang masih berada di atas target 7,50%. Kondisi ini mencerminkan perlunya penguatan program intervensi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 4,37%, mendekati target 4,00%, namun memerlukan upaya strategis melalui peningkatan pelatihan kerja dan perluasan lapangan kerja sektor informal.

Indikator Tujuan RPJMD

Capaian terhadap indikator tujuan RPJMD menunjukkan bahwa sebagian besar program strategis telah berjalan secara progresif, namun masih membutuhkan peningkatan dalam pelaksanaannya seperti: cakupan layanan air bersih mencapai 78%, dari target 85%. Rendahnya akses di beberapa wilayah terpencil menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur dasar. Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk baru mencapai 1,2 dari target 1,5. Distribusi tenaga medis masih belum merata, terutama di wilayah pulau-pulau kecil. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 16–18 tahun mencapai 92,4%, hampir menyentuh target 95%.

Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan menengah atas.

Indikator Sasaran RPJMD

Indikator sasaran RPJMD menggambarkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan oleh perangkat daerah seperti: jumlah desa berkembang/mandiri mencapai 87,5% dari target 100%. Kebutuhan pendampingan dan penguatan kelembagaan desa masih menjadi prioritas pembangunan. Cakupan layanan internet desa sebesar 76%, dari target 90%. Perlu sinergi lebih lanjut dengan program digitalisasi nasional untuk mendorong konektivitas wilayah terpencil. Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah tercatat 21,3%, masih di bawah target 25%. Optimalisasi belanja strategis penting untuk memperkuat infrastruktur dan pelayanan publik. Berikut penjelasan secara terperinci melalui tabel berikut.

Tabel II- 16
Evaluasi Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021–2026

Kategori	Indikator	Target RPJMD 2026	Realisasi 2023 (BPS 2024)	Analisis Capaian
Indikator Makro	Pertumbuhan Ekonomi	5,5%	4,89%	Belum tercapai; dipengaruhi oleh sektor perikanan dan pariwisata yang belum optimal
	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	72,00	71,23	Hampir tercapai; peningkatan pendidikan dan kesehatan berkontribusi positif
	Angka Kemiskinan	7,50%	7,98%	Belum tercapai; perlu penguatan program

				pengentasan kemiskinan
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,00%	4,37%	Mendekati target; perlu peningkatan pelatihan kerja dan sektor informal
Indikator Tujuan RPJMD	Cakupan layanan air bersih	85%	78%	Perlu percepatan pembangunan infrastruktur air bersih
	Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	1,5	1,2	Perlu penambahan tenaga medis dan distribusi merata
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16–18 tahun	95%	92,4%	Capaian baik; perlu intervensi untuk kelompok rentan
Indikator Sasaran RPJMD	Jumlah desa dengan status berkembang/mandiri	100%	87,5%	Perlu penguatan kapasitas desa dan pendampingan pembangunan
	Cakupan layanan internet desa	90%	76%	Perlu sinergi dengan program digitalisasi nasional
	Realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah	25%	21,3%	Belum optimal; perlu efisiensi dan prioritas belanja strategis

Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2024

2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Tri Wulan I Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah dan menjadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaannya, dinamika sosial, ekonomi, politik, serta kebijakan nasional dapat memicu kebutuhan akan penyesuaian RKPD.

Oleh karena itu, mekanisme perubahan RKPD menjadi aspek strategis guna menjaga relevansi dan responsivitas dokumen perencanaan tersebut terhadap perubahan situasi dan kondisi yang terjadi.

Pentingnya memulai proses perubahan RKPD sejak Triwulan I Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ. SE tersebut menekankan bahwa pemerintah daerah harus proaktif dalam melakukan evaluasi awal terhadap pencapaian kinerja pembangunan serta mempertimbangkan potensi perubahan asumsi makro, prioritas pembangunan, serta arah kebijakan nasional dan daerah. Hal ini bertujuan agar penyesuaian terhadap RKPD dapat dilakukan secara terencana, terukur, dan tidak mengganggu kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Melalui perubahan RKPD di awal tahun, pemerintah daerah dapat mengantisipasi dan mengakomodasi perkembangan strategis seperti kebijakan fiskal nasional terbaru, perubahan dalam alokasi dana transfer ke daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya. Dengan demikian, dokumen RKPD hasil perubahan akan mencerminkan kondisi faktual dan menjamin efektivitas intervensi pembangunan daerah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, perubahan RKPD pada Triwulan I memberi ruang yang memadai untuk penyelarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga proses penyusunan Perubahan APBD (APBD-P) dapat dilakukan secara komprehensif. Hal ini penting untuk menghindari ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran, yang kerap menjadi kendala dalam pelaksanaan program prioritas. Dengan demikian, kinerja pembangunan daerah akan lebih optimal dan tepat sasaran.

Secara yuridis, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ memberikan legitimasi dan arahan teknis bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah-langkah perubahan RKPD. SE ini berfungsi sebagai pedoman normatif dan administratif agar proses perubahan RKPD mengikuti tahapan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi dari surat edaran ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif.

Dengan memperhatikan landasan hukum serta urgensi perubahan RKPD pada awal tahun anggaran, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih sigap dalam menghadapi tantangan pembangunan. Keberhasilan proses ini akan berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah secara lebih sinergis dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian pelaksanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ**.

1. Perubahan Asumsi Makro dan Kebijakan Nasional

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi capaian pelaksanaan pembangunan adalah perubahan pada indikator makroekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, serta harga komoditas strategis. SE Mendagri No. 900.1.1/640/SJ menggarisbawahi pentingnya antisipasi terhadap perubahan asumsi makro tersebut karena dapat berdampak langsung pada proyeksi pendapatan daerah, belanja prioritas, dan daya dukung fiskal. Ketidaksesuaian antara asumsi awal RKPD dengan kondisi aktual dapat menyebabkan target kinerja tidak tercapai atau pelaksanaan program menjadi tidak optimal.

2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Faktor kedua yang turut memengaruhi capaian pelaksanaan adalah tingkat realisasi pendapatan dan efektivitas belanja daerah. Keterlambatan penerimaan dana transfer dari pusat, rendahnya penyerapan anggaran, atau ketidaktepatan belanja terhadap prioritas daerah merupakan kendala yang sering dihadapi. Dalam SE tersebut, pemerintah daerah diimbau untuk melakukan evaluasi dini atas proyeksi pendapatan dan belanja, serta segera melakukan penyesuaian melalui perubahan RKPD jika ditemukan deviasi yang signifikan.

3. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya

Capaian pembangunan juga sangat bergantung pada hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Ketika ada kegiatan yang tidak mencapai output atau outcome yang ditargetkan, perlu dilakukan koreksi strategi dan pengalokasian ulang sumber daya. Surat Edaran Mendagri menekankan pentingnya evaluasi kinerja secara kuantitatif dan kualitatif pada awal tahun sebagai dasar dalam menetapkan perubahan RKPD, agar program pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien.

4. Perubahan Prioritas dan Kebutuhan Daerah

Kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah yang dinamis dapat mengubah prioritas pembangunan. Misalnya, munculnya bencana alam, fluktuasi harga bahan pokok, atau dinamika politik lokal dapat menyebabkan perlunya perubahan kebijakan yang bersifat mendesak. Oleh karena itu, SE Mendagri menekankan bahwa pemerintah daerah harus tanggap terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan menyelaraskannya dengan dokumen perencanaan melalui mekanisme perubahan RKPD.

5. Sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional dan Regional

Ketidaksinkronan antara RKPD dengan dokumen perencanaan nasional atau provinsi juga bisa menghambat capaian pelaksanaan pembangunan. SE Mendagri mendorong agar perubahan RKPD dilakukan dengan memperhatikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP), hasil Musrenbang Nasional/Provinsi, serta kebijakan tematik nasional. Tujuannya adalah memastikan bahwa intervensi pembangunan daerah mendukung target nasional secara integratif.

6. Kesiapan Perangkat Daerah dan Sistem Informasi Perencanaan

Faktor internal berupa kapasitas teknis perangkat daerah dan kesiapan sistem informasi juga berperan penting. SE tersebut mengingatkan pentingnya dukungan kelembagaan dan penguatan kapasitas aparatur dalam proses evaluasi dan revisi perencanaan. Ketidakmampuan perangkat daerah dalam melakukan input, analisis, dan pemantauan data perencanaan bisa menghambat kualitas dokumen perubahan RKPD, yang pada akhirnya akan memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terlihat bahwa sebagian besar program menunjukkan progres yang cukup baik meskipun belum seluruhnya mencapai target tahunan. Data capaian kinerja tersebut disajikan secara terperinci pada tabel-tabel evaluasi masing-masing urusan pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketentraman dan ketertiban umum, serta urusan sosial lainnya.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan perubahan RKPD Tahun 2025, baik dari sisi penyesuaian target, pengalihan lokasi kegiatan, pergeseran anggaran, maupun perubahan indikator kinerja. Dengan demikian, perubahan RKPD 2025 diharapkan dapat lebih responsif terhadap

kebutuhan riil masyarakat serta mampu menjawab dinamika pembangunan daerah secara tepat dan efektif.

Secara umum, pelaksanaan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas hingga triwulan I tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup berarti di beberapa bidang, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani. Peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta adaptasi terhadap dinamika ekonomi menjadi faktor kunci dalam mendorong pencapaian yang lebih optimal. Evaluasi yang dilakukan secara berkala, koordinasi yang solid antar OPD, serta perbaikan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran akan sangat mendukung dalam mengatasi berbagai hambatan dan menjamin pelaksanaan RKPD yang lebih efisien ke depannya. Evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun 2024 juga mencakup analisis posisi dan capaian kinerja pembangunan daerah, yang dirangkum dalam rekapitulasi hasil evaluasi RKPD 2024 dan pencapaian indikator kinerja misi RPJMD tahun keempat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pengelolaan	92 %	89 %	6,03 %				12 %	0			Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Pendidikan Yang Terpenuhi											
1	1	3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum	74 %	-	-	-			-	-			Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode				Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
								I	II	III	IV					
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
					Muatan Lokal											
1	1	4		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Ketersediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	74 %	67 %									Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
1	1	5		Program Pengendalian	Persentase Lembaga	94 %	89 %									Dinas Pendidikan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Perizinan Pendidikan	Pendidikan (PAUD Pendidikan Dasar Non Formal Yang Memiliki Izin											, Pemuda Dan Olahraga
1	**2**														

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Terpenuhi	77,24%	76,25 %	5%				94 %	121 %			Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Yang Terlatih Sesuai Dengan Mutu Dan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	90 %	100 %	3%				93%	93,28 %			Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Dan Minuman	Persentase Ketersediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Dan Minuman	92 %	86 %					66%	71,74 %			Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
1	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pembinaan Kesehatan	83,73 %	79,63 %	0 %				87%	103%			Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air (SDA)	100 %	88,8 %	0				0	0			Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Dan Kawasan Permukima N
1	3	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum	56,9 %	56,7 %	0				0	0			Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Penyediaan Air Minum	Jaringan Perpipaan											Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1	3	4	Program Pengembangan Sistem Dan	Persentase Rumah Tangga Yang	-	17,52 %	0				0	0			Dinas Pekerjaan Umum

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Pengelolaan Persampahan Regional	Menempati Hunian Dengan Akses Sampah Yang Terkelola Dengan Baik Di Perkotaan											Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
1	3	5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Minum Limbah	59,73 %	58,35 %	0				0	0			Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Domestik) Aman											Permukima N
1	3	6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Penambahan Panjang Saluran Drainase Yang Dibangun	100 %	80 %	0				500%	500%			Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumaha N Rakyat

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Dan Kawasan Permukima N
1	3	7	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Penambahan Panjang Jalan Lingkungan	100 %	80 %									Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Yang Dibangun											Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1	3	8	Program Penataan	Persentase Peningkatan Bangunan	100 %	100 %	0				10000 %	10000 %			Dinas Pekerjaan Umum

Kode		Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
						I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Bangunan Gedung	Gedung Yang Mendapatkan Pembangunan Rehabilitasi Dan Renovasi Sarana Prasarana											Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
	3			Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	100 %	100 %	0				10000 %	10000 %			Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Permukima N
1	3	9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Kawasan Yang Ditangani Penataannya Dalam Bentuk Pembangunan	-	100 %	0				0	0			Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Rehabilitasi Dan Renovasi Sarana Prasarana											Dan Kawasan Permukima N
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pembangunan Jalan Dan	100 %	90 %									Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Jembatan (Km)											Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
1	3	1 1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penambahan Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terampil	100 %	80 %									Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Permukima N
1	3	1 2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Ruang	100 %	90 %									Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Dan Kawasan Permukima N
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Bagi Rumah Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi	100 %	80 %	0				0	0			Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Permukima N
1	4			Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh	100 %	100 %	0				0	0			Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumaha N Rakyat

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Rumah Layak Huni											Dan Kawasan Permukima N
1	4			Persentase Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi	100 %	100 %									Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Akibat Program Pemerintah Daerah Kab/Kota Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan											Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Rumah Yang Layak Huni											
1	4	3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	100 %	80 %	0				10000 %	10000 %			Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Dan Kawasan Permukima N
1	4	4	Program Perumahan Dan Kawasan	Persentase Penangan Rumah MBR Yang	100 %	80 %									Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Permukiman Kumuh	Mendapat Bantuan PSU											Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana,	Persentase Penanganan PSU Pada	100 %	80 %	0				200%	200%			Dinas Pekerjaan Umum

Kode		Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
						I	II	III	IV					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
		Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Perumahan Komersial											Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	5	2	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjut	95 %	92 %	24,49 %				124%	131%			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode				Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
								I	II	III	IV					
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
					i Dan Terselesaikan											
					Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan	100 %	100 %	26,62 %				126%	126%			

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Hukum Perda Dan Perkada											
1	5	3	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana	100 %	87 %	0				0	0			Badan Penanggul Angan Bencana Daerah

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	100 %	0				100%				Badan Penanggul Angan Bencana Daerah

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	100 %	100 %	0				100%				Badan Penanggul Angan Bencana Daerah

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Terhadap Bencana											
1	5	4	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan	Tingkat Waktu Tanggap Response Time Kejadian Kebakaran	100 %	100 %	0				0	0			Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
					I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
	Penyelamatan Non Kebakaran												
		Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi	100 %	100 %	0				0	0			Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Korban Kebakaran											
1	6														
1	6	2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS Yang Berpartisipasi Dalam	86,54 %	80,77 %									Dinas Sosial, Pemberday Aan Perempuan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Penanganan PPKS											Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
1	6	4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	75 %	75 %									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas	100 %	100 %									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Yang Memperoleh Rehabilitas Sosial Di Luar Panti											Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti	100 %	100 %									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang	100 %	100 %									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti											Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Persentase Jumlah Warga Negara Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar	100 %	100 %									Dinas Sosial, Pemberdaya An Perempuan Dan Perlindun Gan Anak Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Tuna Sosial Di Luar Panti											Pemberdayaan Masyarakat Desa
1	6	5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pendampingan Bantuan Sosial Dan	73,40 %	72,34 %									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Kesejahteraan Keluarga											Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota Yang Memperoleh Perlindungan	100 %	100 %									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Dan Jaminan Sosial											Pemberdayaan Masyarakat Desa
1	6	6	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang	86,54 %	82,69 %									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah											Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode				Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
								I	II	III	IV					
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
					Kabupaten/ Kota											
					Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi	100 %	100 %									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindun

Kode				Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
								I	II	III	IV					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Korban Bencana												Gan Anak Dan Pemberday Aan Masyaraka T Desa
2																

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**7**														
2	**7**	**2**	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Direncanakan Setiap Tahun	100 %	75 %									Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp, Transmigrasi Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Tenaga Kerja
2	**7**	**3**	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih Berdasarkan Kompetensi	90 %	87 %									Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp, Transmigrasi Dan

Kode				Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
								I	II	III	IV					
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
					Dibagi Target Per Tahun											Tenaga Kerja
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,03 %	2,42 %									Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp, Transmigrasi Dan

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Tenaga Kerja
2	**7**	**4**	Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan Koordinasi Dan Pengembangan Bursa Kerja	100 %	95 %									Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp, Transmigrasi Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Tenaga Kerja
2	**7**	**5**	Program Hubungan Industrial	Persentase Besaran Kasus Yang Diselesaikan	100 %	81,19 %									Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp, Transmigrasi Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Tenaga Kerja
2	**8**														
2	**8**	**2**	Program Pengarusutamaan Gender Dan	Persentase Perangkat Daerah Memiliki	90 %	81 %									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Pemberdayaan Perempuan	Focal Point Aktif											Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,62 %	90,57 %									Dinas Sosial, Pemberdaya Aan Perempuan Dan Perlindun Gan Anak Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,75 %	65,47 %									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	9,45 %	8,95 %									
2	**8**	**3**	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Pendampingan Khusus	87 %	73 %									Dinas Sosial, Pemberday

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Kekerasan Terhadap Perempuan											Aan Perempuan Dan Perlindun Gan Anak Dan Pemberday Aan

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Masyarakat Desa
2	**8**	**5**	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Tersedia Data Terpilah	85 %	83 %									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindun

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Gan Anak Dan Pemberday Aan Masyaraka T Desa

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**8**	**6**	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Kecamatan Layak Anak	100 %	90 %									Dinas Sosial, Pemberdaya Aan Perempuan Dan Perlindun Gan Anak Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Peringkat Kabupaten Layak Anak	Madya	Madya									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**8**	**7**	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perlindungan Khusus Kekerasan Terhadap Anak	87,50 %	75 %									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Pemberdaya Aan Masyaraka T Desa
2	**9**														
2	**9**	**3**	Program Peningkatan Diversifikasi	Persentase Peningkatan	100 %	84 %									Dinas Perikanan Pertanian

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi Pangan											Dan Pangan
2	**9**	**4**	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	83,3 %	55,6 %									Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**9**	**5**	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan Yang Diterbitkan	100 %	80 %									Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan
2	**10**														

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**10**	**2**	Program Pengelolaan Izin Lokas	Persentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah	100 %	80 %									Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Daerah Kabupaten											Permukima N
2	**10**	**4**	Program Penyelesaia N Sengketa Tanah Garapan	Mediasi Dan Fasilitasi Potensi Sengketa, Konflik Tanah Dan Ruang	100 %	80 %									Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumaha N Rakyat

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Dan Kawasan Permukima N
2	**10**	**5**	Program Penyelesaia N Ganti Kerugian Dan Santunan	Mediasi Dan Fasilitasi Penyelesaian Ganti Rugi Dan Santunan	100 %	80 %									Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Tanah Untuk Pembanguna N	Tanah Untuk Pembanguna N											Perumaha N Rakyat Dan Kawasan Permukim a N
2	**10**	**6**	Program Redistribusi Tanah, Dan	Terlaksanany A Redistribusi	100 %	80 %									Dinas Pekerjaan Umum

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Tanah Bidang Tanah											Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**10**	**8**	Program Pengelolaa N Tanah Kosong	Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penguasaan Dan Pemafaatan Tanah Kosong	100 %	80 %									Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumaha N Rakyat Dan Kawasan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Permukima N
2	**10**	**9**	Program Pengelolaa N Izin Membuka Tanah	Penetapan Tanah Terlantar Dan Peruntukan Tanah	100 %	80 %									Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumaha N Rakyat

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Cadangan Umum Negara											Dan Kawasan Permukima N
2	**10**	**10**	Program Penataguna An Tanah	Persentase Pencapaian Penataan Ulang Ketimpangan	100 %	80 %									Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah											Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
2	**11**														

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**11**	**2**	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	-	-									Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**11**	**3**	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	57,1 &	57 %									Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**11**	**4**	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pelaksanaan Penghijauan Sumber Air Baku	100 %	95 %									Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**5**	Program Pengendalian Bahan	Jumlah Aksi Pengendalian	100 %	100 %									Dinas Perhubungan Dan

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	B3 Dan Limbah B3											Lingkungan Hidup

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**11**	**6**	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan	Persentase Pembinaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	96 %									Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Lingkungan Hidup (Pplh)												
2	**11**	**8**	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan	Persentase Peran Serta Sekolah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan	100 %	80 %									Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Hidup Untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup											
2	**11**	**10**	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	100 %									Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**11**	**11**	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah	17,50 %	17,50 %									Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup
				Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di	-	-									Dinas Perhubungan Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Wilayah Kab/Kota Yang Meliputi:											Lingkungan Hidup
				A. Persentase Jumlah Pengurangan	6 %	6 %									Dinas Perhubungan Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Timbulan Sampah											Lingkungan Hidup
				B. Persentase Jumlah Penanganan Timbulan Sampah	18,78 %	17,52 %									Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**12**														
2	**12**	**2**	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP El (%)	100 %	100 %									Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**12**	**3**	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Akte Kelahiran 0-18 Tahun (%)	100 %	100 %									Dinas Kependud Ukan Dan Pencatata N Sipil
2	**12**	**4**	Program Pengelolaan	Persentase Informasi	100 %	100 %									Dinas Kependud

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Informasi Administrasi Kependudukan	Database Kependudukan Yang Disampaikan											Ukan Dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**5**	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Publikasi Profil	100 %	100 %									Dinas Kependud Ukan Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Kependudukan											Pencatatan Sipil
2	**13**														
2	**13**	**2**	Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa	90,38 %	80,77 %									Dinas Sosial, Pemberdayaan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0	0									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	13,5 %	7,7 %									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**13**	**3**	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa Yang Melakukan Kerjasama	25 %	25 %									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	**13**	**4**	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Pemerintahan Desa	77 %	73 %									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**13**	**5**	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	42 %	42 %									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	**14**														

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**14**	**2**	Program Pengendalian Penduduk	Indeks Advokasi Dan Pengendalian Penduduk	66,75 %	65,74 %									Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Laju Pertumbuhan Penduduk	2,00 %	2,01 %									Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Total Fertility Rate (TFR)	2,77 %	2,78 %									Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**14**	**3**	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Indeks Pembinaan Keluarga Berencana	65,53 %	65,53 %									Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Modern	59,4 %	59,34 %									Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Unmet Need	7,35 %	7,42 %									Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	22,2 %	21,56 %									Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**14**	**4**	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Angka Fertilitas Menurut Umur/Age Specific Fertility Rates (ASFR)	13,51 %	13,51 %									Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Usia Kawin Pertama (UKP)	22	22									Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**15**														
2	**15**	**2**	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Ratio Kejadian Kecelakaan	0,80	0,83									Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**15**	**3**	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketersedian Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut	58,80 %	58,80 %									Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup
2	**16**														

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**16**	**2**	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100 %	100 %									Dinas Komunikas I, Informatik A Dan Statistik
2	**16**	**3**	Program Pengelolaan	Persentase Layanan	100 %	100 %									Dinas Komunika

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Aplikasi Informatika	SPBE Pemerintah Yang Diterapkan Oleh Perangkat Daerah											s I, Informatik A Dan Statistik

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**17**														
2	**17**	**2**	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Aktif Yang Melakukan Izin Usaha	100 %	95,24 %									Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagang An Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Simpan Pinjam											Perindustrian
2	**17**	**3**	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif Yang Patuh Terhadap Peraturan	100 %	92,31 %									Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Perundang Undangan											Perindustrian
2	**17**	**4**	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi Aktif	100 %	85,71 %									Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Perindustrian
2	**17**	**5**	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mendapatkan Pelatihan	100 %	85,71 %									Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Perindustrian
2	**17**	**7**	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,	Persentase UMKM Yang Mendapatkan Pembinaan	100 %	83,33 %									Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Dan Usaha Mikro (Umkm)												Perindustrian
2	**17**	**8**	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pengembangan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	100 %	95,16 %									Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Perindustrian
2	**18**														
2	**18**	**2**	Program Pengembangan Iklim	Ratio Peningkatan	1.108	1.090									Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp,

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Penanaman Modal	Investasi PMA Dan PMDN											Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
2	**18**	**3**	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Yang	100%	100%									Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp, Transmigr

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Berinvestasi Di Daerah											Asi Dan Tenaga Kerja
2	**18**	**4**	Program Pelayanan Penanaman Modal	Tingkat Penyelesaian Pelayanan Perizinan	24 PMDN dan 3 PMA	22 PMDN dan 3 PMA									Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp, Transmigr Asi Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				(PMA Dan PMDN)											Tenaga Kerja
2	**18**	**5**	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Kepatuhan Perusahaan Dalam Menyampaikan LKPM	90%	85%									Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp, Transmigrasi Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Tenaga Kerja
2	**18**	**6**	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Sistem Informasi	96%	85%									Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp, Transmigrasi Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Penanaman Modal												Tenaga Kerja
2	**19**														
2	**19**	**2**	Program Pengembangan Kapasitas Daya	Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Di	85,50%	76,50 %									Dinas Pendidikan, Pemuda

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Saing Kepemudaan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2016-2021 Persentase Pembinaan Kapasitas Kepemudaan											Dan Olahraga

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**19**	**3**	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Prestasi Keolahragaan	53%	51%									Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
2	**19**	**4**	Program Pengembangan	Persentase Pemenuhan Pengembanga	100%	81 %									Dinas Pendidikan, Pemuda

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Kapasitas Kepramukaan	n Kapasitas Kepramukaan											Dan Olahraga
2	**20**														
2	**20**	**2**	Program Penyelenggaraa	Persentase Laju	100%	100%									Dinas Komunikas I, Informatik

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			n Statistik Sektoral	Pemanfaatan Data Sektoral											A Dan Statistik
2	**21**														
2	**21**	**2**	Program Penyelenggaraan Persandian	Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital	29,03%	22,5%									Dinas Komunikas I, Informatik

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Untuk Pengamanan Informasi	Perangkat Daerah											A Dan Statistik
2	**22**														

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**22**	**2**	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pelaku Seni Untuk Mengenal, Memahami, Menghargai Dan Ikut Melestarikan Nilai Budaya	100%	88%									Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**22**	**3**	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pertunjukan Kesenian Tradisional Di Kecamatan	100%	90%									Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2	**22**	**4**	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Keikutsertaan Dalam	100%	90%									Dinas Pariwisata Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Pendidikan Dan Pelatihan Sejarah											Kebudayaan
2	**22**	**5**	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan Dan Dikelola	100%	75%									Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**22**	**6**	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan Museum Yang Terpenuhi	100%	90%									Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2	**23**														

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**23**	**2**	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Cakupan Pelayanan Keperpustakaan	100%	83,33 %									Sekretariat Daerah
2	**24**														

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
2	**24**	**2**	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Tersusunnya Arsip Yang Sesuai Standar	55%	48%									Sekretariat Daerah
3															
3	**25**														

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
3	**25**	**3**	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	6%	5%									Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan
3	**25**	**4**	Program Pengelolaan	Persentase Produksi	75%	65%									Dinas Perikanan Pertanian

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Perikanan Budidaya	Perikanan Budidaya											Dan Pangan
3	**25**	**6**	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Produksi Pengolahan Perikanan	100%	83,30 %									Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
3	**26**														
3	**26**	**2**	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata Yang Dilakukan Peningkatan	100%	80%									Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
3	**26**	**3**	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Objek Destinasi Dan Event Pariwisata Yang Dipasarkan	100%	83%									Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
3	**26**	**5**	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Menerima Pengembangan Kompetensi	100%	75%									Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
3	**27**														
3	**27**	**2**	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian	100%	80%									Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
3	**27**	**3**	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian	100%	88,20 %									Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan
3	**27**	**4**	Program Pengendalian	Persentase Kesehatan	90%	86%									Dinas Perikanan

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Hewan Ternak Dan Kesmavet											Pertanian Dan Pangan
3	**27**	**5**	Program Pengendalian Dan Penanggulanga	Persentase Kinerja Pengendalian Dan	80%	75%									Dinas Perikanan Pertanian

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			n Bencana Pertanian	Penanggulan Bencana Pertanian											Dan Pangan
3	**27**	**6**	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Tani	100%	95%									Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
3	**30**														
3	**30**	**2**	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan,	100%	73%									Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagang An Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Dan Izin Usaha Toko Swalayan Yang Diterbitkan											Perindustrian
3	**30**	**3**	Program Peningkatan Sarana	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan	100%	80%									Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro,

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Distribusi Perdagangan	Yang Dikelola Dengan Baik											Perdagangan Dan Perindustrian
3	**30**	**4**	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	Persentase Kestabilan Harga Barang	0,71%	0,71%									Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagang

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Pokok Dan Barang Penting												An Dan Perindustrian
3	**30**	**5**	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengikuti Pembinaan	100%	92%									Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagang An Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Promosi Dagang Lokal											Perindustrian
3	**30**	**6**	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peralatan Yang Terstandarisasi	100%	96%									Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Perindustrian
3	**31**														
3	**31**	**2**	Program Perencanaan Dan	Persentase Pertumbuhan	1	0,88									Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro,

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Pembangunan Industri	Pelaku Usaha Industri											Perdagangan Dan Perindustrian
3	**31**	**3**	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri Yang Diterbitkan	100%	90%									Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagang

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															An Dan Perindust Rian
3	**31**	**4**	Program Pengelolaan Sistem Informasi	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Industri	100%	80%									Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagang An Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Industri Nasional												Perindustrian
3	**32**														
3	**32**	**4**	Program Pengembangan	Persentase Kawasan	95%	79%									Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp,

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Kawasan Transmigrasi	Transmigrasi Yang Dibina											Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
4															
4	**1**														

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
4	**1**	**2**	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Tercapainya Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Dalam Membentuk Akhlakul Karimah	100%	100%									Sekretariat Daerah

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
4	**1**	**3**	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Yang Diterbitkan Dalam Pengendalian Perekonomian Dan Pembangunan	100%	83%									Sekretariat Daerah

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
4	**2**														
4	**2**	**2**	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Capaian Penetapan Perda	100%	100%									Sekretariat Dprd
5															

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
5	**1**														
5	**1**	**2**	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD	100%	100%									Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan Daerah

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
5	**1**	**3**	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Berkualitas	100%	94%									Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan Daerah
5	**2**														

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
5	**2**	**2**	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Silpa Terhadap APBD	5,00%	5,50%									Badan Keuangan Daerah
5	**2**	**3**	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Aset Daerah	100%	93,30 %									Badan Keuangan Daerah

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
5	**2**	**4**	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Tingkat Pertumbuhan PAD	4,62%	4,47%									Badan Keuangan Daerah
5	**3**														

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
5	**3**	**1**	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Jumlah Pemenuhan ASN Berdasarkan Anjab Dan ABK	86%	80%									Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
5	**4**														
5	**4**	**2**	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Cakupan Pengembangan Aparatur	68%	65%									Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
															Daya Manusia
5	**5**														
5	**5**	**2**	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang	100%	82%									Badan Penelitian, Pengembangan Dan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Digunakan Untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan											Perencanaan Daerah
5	**6**														

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
5	**6**	**2**	Program Pengelola Perbatasan	Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Lokpri	43%	39%									Badan Pengelola Perbatasan Daerah
6															

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
6	**1**														
6	**1**	**2**	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan	100% 31 OPD	83,87 % 26 OPD									Inspektorat

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
6	**1**	**3**	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase (%) Perangkat Daerah Yang Sudah Di Nilai SPIP	100% 31 OPD	80,65 % (25 OPD)									Inspektorat
7															
7	**1**														

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
7	**1**	**2**	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%									Kecamatan
7	**1**	**3**	Program Pemberdayaan	Persentase Partisipasi	100%	100%									Kecamatan

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan											
7	**1**	**6**	Program Pembinaan Dan Pengawasan	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan	100%	100%									Kecamatan

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa											
7	**1**	**4**	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	100%	100%									Kecamatan

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
7	**1**	**5**	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%									Kecamatan
8															
8	**1**														

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
8	**1**	**2**	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	77	76,69									Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
8	**1**	**3**	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan	Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu/Pilkada/ Pilkades (Votes Turnout)	84%	84%									Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Pengembangan Etika Serta Budaya Politik												
8	**1**	**4**	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang	79	78,50									Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Kemasyarakatan	Organisasi Masyarakat											
8	**1**	**5**	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,	IKM Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama	77,50	77									Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Sosial, Dan Budaya												
8	**1**	**6**	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi	Persentase Pencegahan Terkait Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	85%	85%									Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode			Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
			Penanganan Konflik Sosial	Yang Melibatkan Aparatur Dan Masyarakat Dalam Rangka Pemahaman Akan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan											

Kode		Urusan/Program		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
							I	II	III	IV					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
				Konflik Di Daerah											
0	**0**	**1**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											

Kode		Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja S.D Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Tri Wulan				Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025*	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2026	Perangkat Daerah
						I	II	III	IV					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
		Kabupaten/Kota												

2.4 Realisasi Anggaran Belanja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, total alokasi anggaran belanja untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai Rp. 834.857.221.946,95. Anggaran ini tersebar pada 34 OPD, mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan daya saing daerah.

Namun, berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi anggaran hingga akhir triwulan I tahun 2025, diketahui bahwa serapan anggaran belanja langsung OPD baru mencapai Rp. 550.795.326.050 atau sekitar 65,97% dari total anggaran yang telah dialokasikan. Tingkat serapan ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi program dan kegiatan yang perlu diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan pencapaian target pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Rincian lebih lanjut mengenai realisasi anggaran belanja langsung per OPD hingga triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut, yang menyajikan data secara terperinci untuk setiap OPD. Data ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk evaluasi kinerja anggaran, identifikasi hambatan, serta perumusan strategi percepatan serapan anggaran pada semester berikutnya, sehingga seluruh target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.

Tabel II- 17
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Per-OPD S.D Triwulan I Tahun 2025

No	OPD	Pagu	Tri Wulan I	
			%	Keu
1	Sekretariat Daerah	38.266.058.216,63	12,77%	5.196.811.694
2	Sekretariat DPRD	24.791.407.561,00	17,37%	4.306.814.919,00
3	Inspektorat	12.388.366.387,76	16,62%	2.058.936.299,00
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	7.426.583.467,11	17,43%	1.320.095.058,00

No	OPD	Pagu	Tri Wulan I	
			%	Keu
	Sumber Daya Manusia			
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.612.601.662,00	14,10%	932.566.391,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.571.333.728,00	14,86%	1.422.503.179,00
7	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.436.173.416,31	14,52%	498.909.874,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	304.357.441.215,63	23,73%	31.179.770.151,00
9	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	10.981.679.037,60	12,29%	1.349.835.993,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.183.226.180,15	17,20%	1.451.875.552,00
11	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	169.777.700.585,40	23,78%	12.260.393.987,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	11.588.145.291,12	23,78%	1.160.944.408,00
13	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro,	7.862.503.815,72	23,78%	1.411.489.098,00

No	OPD	Pagu	Tri Wulan I	
			%	Keu
	Perdagangan Dan Perindustrian			
14	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	5.534.974.687,00	23,78%	902.220.125,00
15	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	26.417.815.909,40	23,78%	5.690.287.115,00
16	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	7.541.370.790,73	23,78%	1.110.083.634,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.611.293.693,35	23,78%	764.652.237,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.598.993.625,08	23,78%	511.905.884,00
19	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	234.992.106.233,79	23,78%	31.881.470.244,00
20	Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup	13.832.656.622,13	23,78%	1.897.479.545,00
21	Dinas Perikanan, Pertanian Dan Pangan	12.585.993.889,29	23,78%	2.172.262.863,00

No	OPD	Pagu	Tri Wulan I	
			%	Keu
22	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	3.985.368.301,79	23,78%	547.829.363,00
23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6.369.451.680,18	15.06	991.034.543
24	Satuan Polisi Pamong Praja	9.680.408.613,32	14,43%	1.440.064.242,00
25	Kecamatan Siantan	4.976.249.577,41	16,35%	821.476.236,00
26	Kecamatan Siantan Utara	2.337.489.852,05	16,37%	382.540.760,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	2.849.329.935,88	16,50%	470.044.857,00
28	Kecamatan Siantan Timur	2.163.272.086,93	15,52%	335.707.972,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	2.501.307.217,91	16,23%	405.891.014,00
30	Kecamatan Palmatak	4.278.725.103,11	17,84%	763.286.239,00
31	Kecamatan Kute Siantan	3.546.215.925,08	16,10%	571.021.643,00
32	Kecamatan Jemaja	5.750.494.836,80	14,80%	851.090.068,00
33	Kecamatan Jemaja Timur	2.752.855.036,71	14,25%	392.329.989,00
34	Kecamatan Jemaja Barat	2.096.520.790,63	11,14%	233.507.017,00
Total APBD Berdasarkan Pergeseran Ke-IV		**978.646.114.973**	**14,10%**	**117.687.132.193**

Sumber: Data realisasi OPD per Mei 2025

Dari data-data sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi, yakni :

1. Rendahnya serapan anggaran pada sebagian besar PD. Dari total 34 OPD dan kecamatan, sebagian besar masih menunjukkan capaian realisasi di bawah 20%. Terdapat OPD strategis seperti Bappeda (12,29%) dan Sekretariat Daerah (12,77%) yang menunjukkan realisasi rendah meskipun memiliki peran penting dalam perencanaan dan koordinasi program pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam proses pencairan anggaran.
2. Ketimpangan realisasi antar PD dengan ditemukan kesenjangan realisasi yang cukup mencolok antar PD. Misalnya, OPD seperti Dinas Pendidikan dan BPKPD telah menyerap anggaran di atas 23%, sementara OPD lain seperti Kecamatan Jemaja Barat baru menyerap 11,14%. Ketimpangan ini bisa mengindikasikan perbedaan kapasitas pelaksanaan, kesiapan program, atau kendala administratif di masing-masing PD.
3. Pola Realisasi Seragam Tanpa Variasi. Terdapat sejumlah OPD yang mencatat persentase realisasi yang identik, yaitu 23,78%, di antaranya Dinas Kesehatan, Pendidikan, PU, dan beberapa dinas teknis lainnya. Hal ini menimbulkan indikasi bahwa data realisasi kemungkinan belum sepenuhnya mencerminkan progres riil pelaksanaan fisik, melainkan bersifat administratif atau berbasis target sistem. Potensi kesalahan pelaporan atau keterlambatan updating sistem keuangan daerah juga perlu menjadi perhatian.
4. Realisasi Rendah di Tingkat Kecamatan. Kecamatan secara umum masih mencatat realisasi yang rendah, dengan rata-rata di bawah 17%. Faktor penyebab dapat meliputi terbatasnya kapasitas SDM dan pengelolaan keuangan, Keterlambatan penyaluran anggaran ke tingkat kecamatan dan Belum optimalnya koordinasi antara OPD teknis dengan kecamatan sebagai pelaksana program di wilayah.
5. OPD dengan Pagu Besar Belum Optimal Menyerap Anggaran. Beberapa OPD dengan pagu besar belum menunjukkan performa penyerapan yang optimal. Sekretariat Daerah memiliki pagu Rp 38,27 miliar, namun baru menyerap 12,77%. Bappeda dan Inspektorat juga menunjukkan serapan yang belum signifikan meski berperan penting dalam pengendalian dan evaluasi program.

Alternatif-alternatif solusi yang dapat diupayakan untuk mengatasi ragam permasalahan yang teridentifikasi adalah :

1. Meningkatkan Kesiapan Perencanaan dan Dokumen Kegiatan.
    - Memastikan seluruh OPD telah menyusun dokumen pendukung kegiatan (RKA, DPA, TOR, RAB) secara lengkap dan tepat waktu.
    - Mendorong penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih realistis dan disesuaikan dengan siklus pengadaan dan ketersediaan anggaran.
    - Mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran agar proses implementasi tidak tertunda di awal tahun.
2. Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
    - Mendorong OPD untuk mengawal percepatan proses lelang sejak awal tahun, terutama untuk kegiatan bersifat fisik dan bernilai besar.
    - Menyusun jadwal pengadaan tahunan yang terintegrasi di LPSE dan didampingi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
    - Memanfaatkan e-katalog dan pengadaan langsung untuk kegiatan yang memenuhi syarat guna mempercepat serapan.
3. Optimalisasi Fungsi Monitoring dan Evaluasi
    - Memperkuat fungsi pengawasan dan pelaporan secara berkala terhadap realisasi keuangan dan fisik melalui sistem informasi kinerja daerah.
    - Memberikan peringatan dini kepada PD yang progresnya tertinggal atau stagnan.
    - Mendorong pelaksanaan review internal secara berkala oleh Inspektorat terhadap PD yang mengalami hambatan teknis.
4. Penguatan Kapasitas SDM dan Tata Kelola Keuangan
    - Menyelenggarakan pelatihan teknis pengelolaan anggaran, khususnya bagi OPD dan kecamatan dengan capaian realisasi rendah.

- Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan tata cara pencairan dana, pelaporan keuangan, serta manajemen risiko pelaksanaan kegiatan.
- Penempatan SDM keuangan yang kompeten di masing-masing OPD dan kecamatan.

5. Peningkatan Koordinasi Antar-OPD dan Antara Tingkat Pemerintahan

- Mengintensifkan rapat koordinasi mingguan/bulanan antara TAPD, OPD teknis, dan kecamatan guna mengidentifikasi hambatan pelaksanaan.
- Mendorong integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat kolaboratif.
- Memberikan ruang fleksibilitas pengelolaan anggaran di tingkat pelaksana melalui revisi kegiatan yang adaptif terhadap kebutuhan lapangan.

2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencapai prioritas dan target pembangunan tahun 2024 dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama yang secara langsung berkaitan dengan kebijakan serta isu strategis yang telah ditetapkan. Berikut adalah rincian permasalahan tersebut :

- Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk memperluas akses ke layanan kesehatan yang memadai, serta meningkatkan infrastruktur pendidikan dan ketersediaan tenaga pengajar. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih menjadi kendala utama, yang berdampak pada rendahnya daya saing masyarakat lokal dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global. Untuk itu, diperlukan langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pendidikan, menyediakan pelatihan keterampilan, dan memastikan pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah.
- Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor perikanan dan pariwisata bahari. Namun, ketergantungan yang tinggi pada sektor perikanan dan kelautan,

tanpa adanya diversifikasi ke sektor ekonomi lainnya, membuat perekonomian daerah rentan terhadap gejolak pasar global. Selain itu, rendahnya minat investasi juga dipengaruhi oleh regulasi yang kurang mendukung dan keterbatasan infrastruktur dasar, sehingga menghambat perkembangan ekonomi daerah secara keseluruhan.

- Keterbatasan infrastruktur dasar, termasuk jalan, pelabuhan, dan transportasi antar-pulau, masih menjadi kendala utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Anambas. Minimnya konektivitas antar wilayah menyebabkan tingginya biaya logistik dan menghambat arus distribusi barang serta jasa. Selain itu, akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan telekomunikasi masih belum merata, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan perluasan infrastruktur dasar menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
- Tantangan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Anambas mencakup perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk memastikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas birokrasi, peningkatan transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, stabil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara umum, permasalahan daerah yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu, dengan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelolaan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta perbaikan infrastruktur untuk mencapai target pembangunan yang telah ditentukan.

2.4.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Daerah

2.4.2.1 Urusan Pendidikan

Dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas, pada RKPD Perubahan ini akan menjabarkan ada beberapa permasalahan yang masih perlu ditangani. Berikut ini adalah beberapa masalah yang terjadi:

1. **Keterbatasan Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas**

   Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari pulau-pulau kecil menyebabkan masih terdapat ketimpangan dalam akses terhadap layanan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini (PAUD). Beberapa wilayah terpencil masih kekurangan satuan pendidikan yang layak dan tenaga pendidik yang memadai.

2. **Rendahnya Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Pendidikan**

   Banyak sekolah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Anambas mengalami kerusakan bangunan, keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Hal ini berdampak pada rendahnya mutu pembelajaran dan belum optimalnya penerapan kurikulum merdeka belajar.

3. **Kekurangan dan Ketidaksebaran Tenaga Pendidik Berkualitas**

   Masih terdapat kekurangan guru di beberapa mata pelajaran strategis, serta masih belum meratanya distribusi guru antar kecamatan. Selain itu, jumlah guru bersertifikasi profesi masih perlu untuk terus dioptimalkan, karena ini merupakan hal yang berpengaruh terhadap mutu pembelajaran. Peningkatan kualitas pendidikan guru melalui pelatihan, pengembangan profesional, dan pemenuhan kebutuhan guru yang cukup dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan

4. **Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah di Jenjang Tertentu**

   Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang PAUD dan SMA/SMK masih relatif rendah dibandingkan target nasional dan provinsi, antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, keterbatasan sarana transportasi antarpulau, dan minimnya motivasi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

5. **Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Pembelajaran**

   Implementasi pembelajaran digital di sekolah-sekolah belum merata, baik dari sisi infrastruktur maupun kompetensi guru dalam menggunakan teknologi. Hal ini menyulitkan proses akselerasi transformasi digital di bidang pendidikan.

6. **Keterbatasan Anggaran untuk Intervensi Program Prioritas Pendidikan**

   Alokasi anggaran pendidikan dalam APBD masih terfokus pada pembiayaan rutin, sementara anggaran untuk program peningkatan mutu, pengembangan kapasitas guru, serta inovasi pembelajaran masih terbatas. Hal ini berdampak pada lambatnya pencapaian indikator kinerja pembangunan bidang pendidikan.

7. **Keterbatasan Dukungan terhadap Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)**

   Belum tersedianya sekolah inklusi secara merata dan terbatasnya tenaga pendidik khusus untuk ABK. Pemerintah daerah perlu memperhatikan pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus. Ini melibatkan penyediaan layanan pendidikan yang inklusif, fasilitas pendukung, dan pelatihan bagi guru agar dapat mengakomodasi kebutuhan individu setiap siswa.

8. **Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan**

   Keterlibatan masyarakat, termasuk orang tua, komite sekolah, dunia usaha, dan tokoh masyarakat dalam mendukung program-program pendidikan masih perlu ditingkatkan. Masih minimnya peran serta dalam pengawasan, perencanaan, serta pendanaan alternatif (partisipatif) menjadikan pelaksanaan pendidikan belum sepenuhnya berbasis pada sinergi multipihak. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan juga memengaruhi keberhasilan program di tingkat lokal. Perlu intervensi dari pemerintah untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pendidikan dan dibutuhkan kampanye literasi pendidikan dan peningkatan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak.

2.4.2.2 Urusan Kesehatan

Permasalahan dan apa yang harus dilakukan dalam urusan kesehatan pada dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini, dengan pendekatan yang sejalan dengan karakteristik daerah kepulauan dan tantangan pelayanan dasar di wilayah ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Keterbatasan Akses Pelayanan Kesehatan di Wilayah Terpencil dan Terluar**

Karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan terpencar menyebabkan masih terdapat kesenjangan dalam akses pelayanan kesehatan dasar. Beberapa wilayah belum terjangkau layanan Puskesmas secara rutin dan masih terkendala transportasi medis. Beberapa hal yang perlu keseriusan pemerintah dalam penguatan layanan kesehatan ini misalnya dengan adanya Puskesmas Keliling (Pusling), pengadaan kapal ambulans laut, serta peningkatan logistik dan komunikasi untuk menjangkau wilayah kepulauan.

2. **Kekurangan dan Ketidaksebaran Tenaga Kesehatan**

   Masih terdapat kekurangan tenaga medis dan paramedis di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di Puskesmas pembantu dan Poskesdes di pulau-pulau kecil. Distribusi tenaga kesehatan belum merata, dan motivasi untuk bertugas di daerah terpencil masih rendah. Perlu dilakukan beberapa solusi seperti penyediaan insentif khusus, redistribusi tenaga berbasis kebutuhan wilayah, serta optimalisasi program penugasan melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan stakeholder lainnya.

3. **Masih Tingginya Angka Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM)**

   Penyakit menular masih menjadi masalah di beberapa wilayah, sementara tren penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes terus meningkat, dan Kabupaten Kepulauan Anambas juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan penyakit tertentu yang lebih umum di daerah tersebut. Contohnya adalah penyakit tropis, seperti malaria dan demam berdarah. Tentu yang diperlukan adalah strategi pencegahan dan pengendalian yang khusus. Pemerintah dapat melakukan deteksi dini dan memperkuat edukasi kesehatan agar tidak memperburuk situasi. Penguatan promotif dan preventif melalui Posyandu dan kampanye hidup sehat, peningkatan cakupan imunisasi, serta layanan deteksi dan manajemen kasus secara rutin merupakan beberapa cara yang dapat dikerjakan untuk meningkatkan layanan kesehatan.

4. **Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**

Masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman dan kebiasaan hidup sehat, termasuk dalam hal sanitasi, gizi, dan pencegahan penyakit. Ini berdampak pada tingginya beban layanan kuratif. Apa yang harus dilakukan pemerintah misalnya dengan mengedukasi kesehatan berbasis masyarakat dan sekolah, pelibatan tokoh lokal dalam promosi kesehatan, dan revitalisasi program Desa Siaga dan Posyandu Aktif.

5. **Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan**

   Banyak fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas dan Pustu mengalami kerusakan, kekurangan alat kesehatan, serta belum memenuhi standar pelayanan minimal.
   Tentu pemerintah dapat mengatasinya dengan rehabilitasi dan pemenuhan alat kesehatan, penguatan sistem rujukan, dan pengembangan layanan telemedisin untuk wilayah sulit dijangkau.

6. **Rendahnya Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi**

   Masih ditemukan kasus gizi buruk, stunting, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak yang belum optimal, terutama di wilayah dengan keterbatasan tenaga dan fasilitas. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan KIA dan gizi, penyediaan fasilitas persalinan yang aman dan terjangkau, serta peningkatan kunjungan rumah dan pemantauan tumbuh kembang menjadi hal utama yang perlu dioptimalkan dalam permasalahan ini.

7. **Masih Terbatasnya Anggaran untuk Program Kesehatan Prioritas**

   Pembiayaan untuk program promotif dan preventif, termasuk penanganan stunting, sanitasi, dan imunisasi, masih terbatas. Banyak program bergantung pada pendanaan dari pusat atau provinsi. Pemerintah tentu dapat mengoptimalisasi pemanfaatan DAK fisik/non-fisik dan dana kapitasi JKN, serta dorongan pelibatan sektor swasta melalui skema CSR untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat.

2.4.2.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas, ada beberapa permasalahan yang perlu ditangani. Berikut adalah beberapa masalah yang terjadi:

1. **Masih Terbatasnya Ketersediaan dan Konektivitas Infrastruktur Jalan Antarwilayah**

   Ketersediaan jalan yang menghubungkan antar desa maupun antar kecamatan di pulau-pulau utama masih terbatas. Sebagian besar jalan belum beraspal, dalam kondisi rusak, atau belum terhubung secara fungsional. Hal ini menghambat mobilitas orang dan barang, serta meningkatkan disparitas wilayah. Perlu dilakukan peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan strategis antarwilayah, pembangunan jembatan penghubung, serta penguatan konektivitas jalan lingkungan berbasis prioritas akses ekonomi dan pelayanan dasar.

2. **Keterbatasan Infrastruktur Dasar Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi**

   Banyak permukiman di wilayah pesisir dan pulau kecil belum memiliki akses terhadap jaringan air bersih yang memadai dan sistem sanitasi yang layak. Sarana pengelolaan air limbah dan persampahan juga masih terbatas. Perlu Peningkatan pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), pengembangan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), dan revitalisasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan akhir (TPA) secara bertahap.

3. **Belum Optimalnya Penataan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah**

   Pemanfaatan ruang di beberapa kecamatan belum sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Terjadi alih fungsi lahan tanpa izin, permukiman di zona rawan bencana, serta belum sinkronnya pemanfaatan ruang dengan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini perlu penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, percepatan peninjauan dan penyesuaian RTRW, serta penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang sesuai pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis.

4. **Minimnya Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Penanganan Kawasan Rawan Bencana**

   Beberapa wilayah pesisir rawan terhadap abrasi, rob, dan banjir pasang. Infrastruktur pengendalian seperti tanggul laut, drainase, dan sempadan pantai belum memadai untuk menghadapi risiko bencana. Pemerintah dapat pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase lingkungan, pembangunan talud dan sabuk pantai, serta integrasi

program pengurangan risiko bencana berbasis infrastruktur ke dalam penataan ruang dan pembangunan wilayah.

5. **Keterbatasan Anggaran dan Kapasitas Pelaksanaan Program Infrastruktur**

   Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur masih terbatas, sementara kebutuhan belanja modal sangat tinggi. Selain itu, keterbatasan SDM teknis dan dukungan peralatan juga menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan. Perlu penguatan perencanaan berbasis data teknis dan spasial, optimalisasi pendanaan dari pusat dan provinsi (DAK, SBSN), serta peningkatan kemitraan dengan swasta dalam bentuk KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) untuk proyek strategis.

6. **Belum Optimalnya Integrasi Perencanaan Infrastruktur dengan Penataan Ruang dan Lingkungan**

   Pembangunan infrastruktur di beberapa lokasi masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta rencana tata ruang. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik fungsi lahan dan degradasi ekosistem. Integrasi perencanaan infrastruktur ke dalam dokumen RTRW dan KLHS sangat penting dilakukan, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan sistem pengawasan terpadu harus dijalankan dengan optimal.

2.4.2.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas, ada beberapa permasalahan yang perlu ditangani. Berikut adalah beberapa masalah yang terjadi:

1. **Masih Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

   Sebagian masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah dan tinggal di wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil, masih menempati rumah yang tidak layak huni, dengan kondisi bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah perlu melanjutkan dan memperluas program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), melakukan verifikasi dan pendataan ulang rumah tidak layak

huni, serta melibatkan peran CSR dan swadaya masyarakat dalam mendukung pembangunan perumahan layak.

2. Belum Meratanya Akses terhadap Infrastruktur Permukiman Dasar

Banyak kawasan permukiman di wilayah terpencil yang belum memiliki akses memadai terhadap air bersih, sanitasi layak, drainase lingkungan, jalan lingkungan, serta pengelolaan sampah yang terorganisir. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar permukiman berbasis kawasan, dengan prioritas pada wilayah kumuh, desa pesisir, dan daerah rawan banjir, disertai dengan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan sarana permukiman.

3. Masih Adanya Kawasan Permukiman Kumuh, Khususnya di Wilayah Pesisir dan Pulau Padat

Kawasan permukiman kumuh masih ditemukan di beberapa desa pesisir dan pulau padat penduduk, dengan ciri kepadatan tinggi, sanitasi buruk, serta keterbatasan ruang terbuka dan drainase. Pemerintah daerah perlu memperkuat program penanganan permukiman kumuh melalui pendekatan terpadu berbasis wilayah, peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, serta kolaborasi dengan masyarakat lokal untuk mengembangkan pemukiman berbasis kearifan lokal.

4. Belum Tersedianya Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan Permukiman yang Komprehensif

Pertumbuhan permukiman masih berjalan secara sporadis tanpa perencanaan tata ruang yang memadai, sehingga berisiko menimbulkan konflik penggunaan lahan, degradasi lingkungan, dan keterbatasan pelayanan dasar. Untuk itu, diperlukan penyusunan dan penegakan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan permukiman, pengendalian pembangunan melalui perizinan yang ketat, serta integrasi dengan rencana pengembangan sektor lain seperti perhubungan, air bersih, dan energi.

5. Terbatasnya Ketersediaan Rumah Terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Ketersediaan hunian terjangkau bagi MBR masih sangat terbatas, dan belum adanya skema perumahan bersubsidi yang berjalan secara

optimal di daerah. Pemerintah daerah perlu mendorong kolaborasi dengan pengembang, perbankan, dan kementerian PUPR untuk memfasilitasi program perumahan rakyat yang berbasis subsidi dan skema pembiayaan mikro, serta membuka peluang pembangunan rumah susun sederhana di pusat-pusat permukiman padat.

6. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Permukiman

Permukiman yang berkembang tidak selalu mempertimbangkan aspek lingkungan, seperti ruang terbuka hijau, drainase alami, dan pengelolaan sampah terpadu, yang pada akhirnya meningkatkan risiko bencana dan penurunan kualitas hidup. Langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat regulasi pembangunan berbasis lingkungan, meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan permukiman, serta mendorong inisiatif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

2.4.2.5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pada urusan ini, ada beberapa masalah yang terjadi diantaranya sebagai berikut:

1. Masih Terbatasnya Jangkauan dan Kapasitas Penegakan Perda serta Ketertiban Umum

Personel Satpol PP dan sarana prasarana pendukung membuat pengawasan dan penegakan peraturan daerah di wilayah kepulauan belum optimal. Kondisi geografis yang tersebar dan tantangan transportasi antarpulau memperberat mobilisasi petugas. Penambahan dan distribusi personel Satpol PP yang berbasis zonasi pulau, pengadaan sarana transportasi dinas laut, serta peningkatan koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum lokal dapat dilakukan untuk menunjang penyelesaian permasalahan ini.

2. Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Kepatuhan Hukum dan Ketertiban

Masih ditemukan pelanggaran terhadap peraturan daerah seperti bangunan tanpa izin, aktivitas usaha tak berizin, serta pelanggaran ketertiban di ruang publik. Hal ini mencerminkan perlunya edukasi hukum dan pembinaan masyarakat secara intensif.

Perlu adanya sosialisasi peraturan daerah secara masif, penguatan peran tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam pembinaan sosial, serta pendekatan persuasif dalam penegakan hukum berbasis komunitas.

3. **Belum Optimalnya Fungsi Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Tingkat Desa/Kelurahan**

   Fungsi Linmas dalam menjaga ketenteraman lingkungan dan membantu penanggulangan bencana belum berjalan maksimal, karena masih kurangnya pelatihan, pembinaan, dan sarana operasional. Pemerintah dapat mensingkronkan dengan program yang ada di Desa dalam Peningkatan kapasitas dan pelatihan anggota Linmas secara rutin, pengadaan perlengkapan Linmas sesuai standar, dan pelibatan Linmas dalam setiap kegiatan siaga bencana, pemilu, dan keamanan wilayah.

4. **Keterbatasan Fasilitas dan Sistem Pengawasan terhadap Ancaman Gangguan Trantibum**

   Belum tersedia sistem pemantauan berbasis teknologi (CCTV publik, sistem laporan cepat), khususnya di wilayah yang berpotensi rawan konflik sosial, gangguan ketertiban, dan pelanggaran ruang publik. Pengembangan sistem pengawasan dan pelaporan cepat melalui teknologi informasi (termasuk aplikasi mobile), serta pengadaan sarana pemantauan (CCTV, pos jaga terpadu) di lokasi-lokasi strategis dapat dilakukan untuk membuat kondisi ini lebih efektif.

5. **Masih Lemahnya Koordinasi Antarlembaga dalam Penanganan Gangguan Ketertiban dan Penanggulangan Bencana**

   Belum optimalnya sinergi antarinstansi dalam upaya penertiban, pengamanan kegiatan publik, maupun mitigasi bencana menyebabkan respon terhadap insiden kadang lambat dan tidak terintegrasi. Pemerintah dapat melakukan penguatan forum koordinasi terpadu Trantibum dan Linmas, penyusunan SOP bersama lintas sektor, serta peningkatan simulasi penanganan keadaan darurat secara berkala.

6. **Kurangnya Anggaran dan Dukungan Logistik untuk Tugas Operasional**

   Dukungan anggaran untuk operasional, pembinaan, dan pengembangan kapasitas personel masih terbatas, sehingga

berdampak pada minimnya kegiatan patroli, pengawasan rutin, dan penanganan cepat terhadap pelanggaran ketertiban. Penguatan anggaran berbasis program prioritas, pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung kegiatan Linmas di tingkat desa, serta kerja sama dengan lembaga vertikal dan swasta dalam penyediaan sarana penunjang tugas lapangan dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kondisi ini.

7. **Masih Terbatasnya Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**

   Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat, namun penanganannya masih terbatas akibat kurangnya unit layanan terpadu di tingkat lokal serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perlindungan. Perlu adanya pembentukan dan penguatan unit layanan perlindungan perempuan dan anak pada tingkat kabupaten dan kecamatan, koordinasi lintas sektor, dan sosialisasi masif penting dilakukan.

2.4.2.6 Urusan Sosial

Dalam penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas, ada beberapa permasalahan yang perlu ditangani. Berikut adalah beberapa masalah yang terjadi:

1. **Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Kerentanan Sosial di Wilayah Kepulauan**

   Sebagian masyarakat di wilayah terpencil dan pesisir masih hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi dan sosial, dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, pekerjaan layak, dan jaminan sosial. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan penguatan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin, peningkatan cakupan dan ketepatan sasaran bantuan sosial berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta sinergi aktif dengan program bantuan pemerintah pusat dan provinsi seperti PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya.

2. **Belum Optimalnya Layanan Rehabilitasi dan Perlindungan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

   Penanganan terhadap anak terlantar, lansia tidak berdaya, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan masih sangat terbatas akibat kurangnya lembaga rujukan, tenaga sosial profesional, serta

layanan berbasis komunitas. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), pembentukan unit layanan terpadu hingga tingkat kecamatan, pelatihan pekerja sosial masyarakat (PSM), serta penyediaan fasilitas seperti rumah singgah dan layanan pengaduan berbasis masyarakat.

3. Kurangnya Akses dan Sarana Bagi Penyandang Disabilitas

Fasilitas umum dan layanan publik belum sepenuhnya ramah disabilitas, baik secara fisik (aksesibilitas bangunan) maupun dalam hal pelayanan (komunikasi dan pendampingan). Pemerintah daerah perlu mendorong pembangunan yang inklusif dengan menerapkan standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan publik, menyediakan alat bantu yang diperlukan, dan mengedukasi aparatur serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan adil bagi semua kelompok.

4. Rendahnya Kapasitas Kelembagaan Sosial Masyarakat

Lembaga sosial seperti Karang Taruna, Tagana, PSM, dan organisasi keagamaan di tingkat desa belum optimal dalam menjalankan fungsinya, akibat terbatasnya pembinaan dan fasilitasi operasional dari pemerintah daerah. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan sosial melalui pelatihan, pendampingan kegiatan, dan pemberian bantuan operasional guna memperkuat peran aktif lembaga sosial dalam menangani masalah sosial di tingkat komunitas.

5. Belum Terpenuhinya Dukungan bagi Lanjut Usia dan Anak dalam Situasi Khusus

Lansia terlantar dan anak-anak yang kehilangan pengasuhan orang tua akibat perceraian, kematian, atau migrasi kerja belum mendapat perlindungan sosial yang memadai. Pemerintah daerah perlu memperkuat program dukungan lansia berbasis komunitas, menyediakan bantuan khusus bagi anak dalam situasi darurat sosial, serta bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan layanan keluarga asuh atau panti sosial.

6. Kurangnya Data Terpadu dan Mekanisme Pemutakhiran PMKS dan PPKS

Pendataan terhadap kelompok rentan dan potensi sumber daya sosial belum dilakukan secara berkala, sehingga menyulitkan perencanaan

program dan menyebabkan ketidaktepatan sasaran. Langkah yang perlu dilakukan antara lain adalah pemutakhiran rutin DTKS secara partisipatif, pelatihan petugas desa dalam pendataan sosial, serta digitalisasi data sosial yang dapat diakses dan digunakan lintas perangkat daerah.

7. Masih Terbatasnya Respons Cepat terhadap Bencana Sosial dan Bencana Alam

Kemampuan daerah dalam merespons korban bencana masih lemah, baik dari segi logistik, tenaga sosial tanggap darurat, maupun fasilitas rehabilitasi. Untuk itu, perlu ditingkatkan kapasitas personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), penyediaan logistik darurat di wilayah kecamatan yang rawan, serta pelaksanaan simulasi penanganan darurat yang melibatkan masyarakat secara langsung.

2.4.2.7 Urusan Tenaga Kerja

Selanjutnya, urusan tenaga kerja terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka Masih Relatif Tinggi dan Tidak Merata

Meskipun angka pengangguran secara umum menunjukkan tren menurun, namun ketimpangan antarwilayah masih terjadi, terutama di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil yang minim akses terhadap informasi dan peluang kerja. Untuk itu, diperlukan penguatan kebijakan pemerataan kesempatan kerja berbasis wilayah, pengembangan pusat-pusat layanan informasi pasar kerja hingga ke tingkat kecamatan atau desa, serta mendorong investasi padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal.

2. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja Lokal

Mayoritas angkatan kerja di Anambas masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar hingga menengah dengan keterampilan terbatas, yang belum mampu memenuhi kebutuhan industri maupun sektor formal lainnya. Pemerintah daerah perlu memperluas akses dan kualitas pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK), mendorong program pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk membuka peluang magang dan pemagangan.

3. Minimnya Ketersediaan Lembaga Pelatihan Kerja yang Responsif terhadap Kebutuhan Daerah

Ketersediaan lembaga pelatihan kerja masih sangat terbatas dan belum tersebar secara merata, sehingga akses masyarakat terhadap peningkatan keterampilan kerja menjadi terhambat, terutama di pulau-pulau luar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi BLK yang ada, pendirian BLK mini atau pelatihan berbasis desa/kelurahan, serta pelatihan mobile atau daring yang menjangkau wilayah-wilayah sulit akses.

4. Belum Optimalnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Termasuk Pekerja Migran

Mekanisme penempatan kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri, masih menghadapi tantangan dalam hal keterbukaan informasi, proses administrasi, dan perlindungan hak-hak pekerja, khususnya bagi pekerja migran asal Anambas. Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah peningkatan sosialisasi prosedur kerja yang aman dan legal, penguatan peran layanan terpadu satu atap ketenagakerjaan, serta kerja sama lintas sektor dalam perlindungan dan pemantauan kondisi pekerja migran secara berkelanjutan.

5. Rendahnya Minat Wirausaha di Kalangan Pencari Kerja Muda

Kurangnya akses modal, keterampilan manajerial, serta pendampingan usaha menyebabkan rendahnya minat dan keberhasilan usaha mandiri di kalangan generasi muda. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan program pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan UMKM pemula, penyediaan inkubator bisnis, serta pembinaan berkelanjutan terhadap wirausaha baru berbasis potensi lokal.

6. Terbatasnya Data Tenaga Kerja yang Akurat dan Terbarui

Sistem informasi ketenagakerjaan belum berjalan optimal, sehingga perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data masih menemui kendala, termasuk dalam hal profil angkatan kerja, sektor penyerap, dan kebutuhan industri. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pendataan tenaga kerja yang terpadu dan terintegrasi dengan sistem pusat, melakukan updating data secara berkala, serta memberdayakan desa dan kelurahan dalam pendataan potensi SDM dan ketenagakerjaan.

2.4.2.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada RKPD Perubahan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

1. **Masih Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan Pengambilan Keputusan**

   Perempuan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih menghadapi hambatan dalam mengakses ruang partisipasi publik dan ekonomi, termasuk keterwakilan dalam lembaga pemerintahan desa, forum masyarakat, dan sektor usaha. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas perempuan melalui pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, serta fasilitasi pembentukan kelompok perempuan produktif, di samping mendorong regulasi yang mendukung keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.

2. **Masih Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)**

   Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik dalam ranah domestik maupun publik, masih terjadi, namun belum seluruhnya terdeteksi atau tertangani dengan baik akibat rendahnya pelaporan, keterbatasan layanan, serta stigma sosial. Oleh karena itu, perlu diperkuat sistem layanan perlindungan terpadu bagi korban kekerasan, termasuk melalui keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA, penguatan sistem rujukan lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat desa, dan edukasi masyarakat untuk membangun budaya yang menolak kekerasan.

3. **Belum Optimalnya Fasilitas dan Layanan Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak**

   Perempuan dan anak korban kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran belum mendapat perlindungan hukum yang maksimal karena keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, konseling, dan rehabilitasi. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran UPTD PPA sebagai pusat layanan, menyediakan pendamping hukum dan psikologis secara profesional, serta bekerja sama dengan lembaga

bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan perlindungan.

4. Masih Terbatasnya Upaya Pencegahan Perkawinan Anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Fenomena perkawinan usia dini dan meningkatnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan lemahnya sistem pencegahan, edukasi, dan intervensi dini terhadap anak. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi masif mengenai pencegahan perkawinan anak, penguatan peran sekolah dan orang tua dalam perlindungan anak, serta penyediaan layanan pendampingan anak berhadapan dengan hukum berbasis pendekatan restoratif.

5. Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Anak dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Pemenuhan hak-hak dasar anak seperti identitas, kesehatan, pendidikan, partisipasi, dan perlindungan belum merata di seluruh wilayah, serta belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan lintas sektor. Maka dari itu, diperlukan penguatan kebijakan ramah anak di tingkat daerah, pembentukan gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) yang aktif, serta integrasi program pemenuhan hak anak dalam perencanaan pembangunan desa, pendidikan, dan layanan dasar lainnya.

6. Rendahnya Pemahaman Gender dan Perlindungan Anak di Tingkat Masyarakat dan Aparatur

Masih terdapat paradigma yang bias gender dan minim pemahaman tentang hak anak di lingkungan masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa. Untuk mengatasi hal ini, perlu ditingkatkan edukasi dan pelatihan sensitif gender serta hak anak bagi aparatur desa, guru, tokoh masyarakat, dan keluarga, serta mengarusutamakan perspektif gender dan perlindungan anak dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

2.4.2.9 Urusan Pangan

Berikut adalah beberapa masalah yang terjadi pada urusan ini:

1. Ketergantungan Tinggi terhadap Pasokan Pangan dari Luar Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas masih sangat bergantung pada distribusi bahan pangan dari luar wilayah, terutama untuk komoditas

strategis seperti beras, sayuran, dan daging. Ketergantungan ini menyebabkan kerentanan pasokan, fluktuasi harga, dan meningkatnya biaya hidup, khususnya di wilayah pulau-pulau kecil. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan penguatan ketahanan pangan lokal melalui pengembangan pertanian berbasis pekarangan, budidaya komoditas strategis secara terpadu, serta dukungan sarana distribusi pangan antar pulau yang efisien dan berkelanjutan.

2. Belum Optimalnya Produksi Pangan Lokal dan Pemanfaatan Lahan

Potensi lahan pertanian yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal akibat keterbatasan infrastruktur pertanian, minimnya akses permodalan, dan kurangnya pendampingan teknis kepada petani. Pemerintah daerah perlu mendorong intensifikasi dan diversifikasi produksi pangan lokal, menyediakan sarana prasarana pertanian, serta meningkatkan peran penyuluh dan kelembagaan petani untuk mendukung produktivitas secara berkelanjutan.

3. Masih Rendahnya Kesadaran dan Praktik Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)

Pola konsumsi masyarakat masih belum sepenuhnya memperhatikan gizi seimbang dan keberagaman pangan, yang berdampak terhadap angka stunting, kurang gizi, dan penyakit tidak menular. Untuk itu, diperlukan kampanye dan edukasi konsumsi pangan B2SA melalui sekolah, posyandu, dan media lokal, serta mendorong pemanfaatan pangan lokal seperti umbi-umbian, ikan, dan hasil kebun sebagai alternatif yang sehat dan terjangkau.

4. Minimnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Ketersediaan cadangan pangan di tingkat daerah untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana atau gangguan distribusi masih sangat terbatas. Pemerintah daerah perlu membentuk dan mengelola cadangan pangan pemerintah (CPPD) secara terencana, bekerja sama dengan Bulog dan pelaku usaha lokal, serta menyusun sistem logistik pangan tanggap darurat di daerah rawan bencana dan kepulauan.

5. Kurangnya Sistem Informasi Pangan yang Terintegrasi dan Akurat

Data terkait produksi, konsumsi, distribusi, serta kerawanan pangan belum tersedia secara lengkap dan terintegrasi, sehingga menyulitkan proses perencanaan, pengambilan kebijakan, dan pengendalian harga

pangan di pasar. Perlu dibangun sistem informasi ketahanan pangan daerah yang mencakup pemetaan ketersediaan dan kebutuhan pangan, pemantauan harga, serta identifikasi wilayah rentan rawan pangan secara berkala.

6. **Belum Optimalnya Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Ketahanan Pangan**

   Upaya peningkatan ketahanan pangan belum sepenuhnya terintegrasi antara OPD terkait, seperti dinas pertanian, kesehatan, perdagangan, dan sosial, maupun dengan lembaga vertikal dan masyarakat. Diperlukan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat melalui forum ketahanan pangan daerah, integrasi program intervensi stunting dengan program pangan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian harga pangan.

2.4.2.10 Urusan Pertanahan

Berikut adalah beberapa masalah yang terjadi:

1. Masih rendahnya cakupan sertifikasi tanah milik masyarakat, terutama di wilayah pulau-pulau terluar dan kawasan pedesaan, menyebabkan ketidakpastian status hukum atas kepemilikan tanah; oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara merata dengan dukungan koordinasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat.
2. Tumpang tindih pemanfaatan ruang dan konflik agraria antar masyarakat, antar masyarakat dengan pemerintah, maupun dengan pihak swasta masih terjadi akibat keterbatasan data spasial yang akurat dan belum optimalnya penegakan rencana tata ruang; untuk mengatasi hal ini, perlu dikembangkan sistem informasi pertanahan dan pemetaan partisipatif yang terintegrasi dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi pertanahan dan pentingnya legalitas hak atas tanah menyebabkan rendahnya kesadaran dalam melakukan pengurusan sertifikat; oleh karena itu, edukasi hukum pertanahan dan layanan konsultasi gratis perlu diperluas hingga ke desa-desa dan wilayah terluar melalui program jemput bola dan pelayanan terpadu.
4. Lemahnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan berdampak pada lambatnya penyelesaian konflik yang berlarut-larut; untuk itu, dibutuhkan penguatan kelembagaan penyelesaian sengketa berbasis mediasi,

pembentukan tim terpadu lintas sektor, serta fasilitasi musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat dan pihak terkait.

5. Belum optimalnya penyediaan tanah untuk kepentingan umum seperti infrastruktur, fasilitas publik, dan kawasan permukiman baru, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan lahan; oleh sebab itu, perlu dirumuskan kebijakan pemanfaatan dan pengadaan tanah yang berkelanjutan, transparan, dan partisipatif dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberlanjutan lingkungan.
6. Pengelolaan Tanah Pesisir yang tidak sesuai dan berkelanjutan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki wilayah pesisir yang penting secara ekologis dan ekonomis. Pengelolaan yang tidak berkelanjutan, termasuk pembangunan yang tidak terkendali dan eksploitasi sumber daya alam, dapat mengancam kelestarian ekosistem pesisir. Pemerintah daerah perlu mengimplementasikan kebijakan dan perencanaan yang berkelanjutan untuk pengelolaan tanah pesisir, termasuk penetapan kawasan konservasi dan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas manusia di wilayah tersebut.
7. Kepemilikan tanah yang tidak jelas atau tidak memiliki sertifikat dapat menjadi hambatan dalam pengembangan pertanahan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Proses sertifikasi tanah yang kompleks dan biaya yang tinggi dapat menjadi kendala bagi masyarakat dalam mendapatkan sertifikat tanah. Pemerintah daerah perlu mempercepat proses sertifikasi tanah dan menyediakan bantuan atau insentif bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah.

2.4.2.11 Urusan Lingkungan Hidup

Berikut adalah beberapa masalah yang terjadi:

1. Terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah pesisir dan laut akibat aktivitas domestik, perikanan, dan transportasi laut yang tidak dikelola secara berkelanjutan telah menyebabkan penurunan kualitas ekosistem laut, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran, serta pengembangan program edukasi dan penyediaan infrastruktur pengelolaan limbah dan sampah yang layak, terutama di pulau-pulau terluar.

2. Volume timbulan sampah di wilayah daratan dan kepulauan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, sementara sistem pengelolaan sampah masih belum memadai baik dari sisi sarana, prasarana, maupun perilaku masyarakat; oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R (reduce, reuse, recycle), menyediakan tempat

penampungan sementara (TPS), tempat pembuangan akhir (TPA), serta melakukan kampanye perubahan perilaku melalui edukasi lingkungan yang masif.

3. Pengelolaan kawasan konservasi belum optimal dan minimnya data serta pemantauan terhadap keanekaragaman hayati mengakibatkan menurunnya kualitas ekosistem dan meningkatnya risiko terhadap kelestarian flora dan fauna lokal; untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan pengelola konservasi, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi dengan komunitas lokal dan lembaga penelitian dalam pelestarian dan pemantauan ekologis.
4. Dampak perubahan iklim seperti abrasi pantai, banjir rob, dan pergeseran musim mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama nelayan dan petani, yang berdampak langsung pada penghidupan mereka; maka dari itu, pemerintah daerah perlu menyusun dan melaksanakan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk rehabilitasi kawasan pesisir seperti mangrove, konservasi air, serta program pemberdayaan masyarakat yang tangguh terhadap perubahan iklim
5. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan; oleh sebab itu, perlu ditingkatkan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan dan penguatan program kampung iklim, sekolah adiwiyata, komunitas peduli lingkungan, serta pemberian insentif terhadap inisiatif-inisiatif lokal yang mendukung pelestarian lingkungan hidup.

2.4.2.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

Berikut adalah beberapa masalah yang terjadi:

1. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran di beberapa wilayah terutama daerah terpencil dan pulau-pulau kecil masih rendah, sehingga menyebabkan kesulitan dalam akses pelayanan publik dan data kependudukan yang belum lengkap. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan layanan perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan dengan pendekatan jemput bola, pelayanan keliling, dan digitalisasi data yang mudah diakses oleh masyarakat.

2. Sistem pencatatan dan pengelolaan data kependudukan belum terintegrasi secara menyeluruh antar instansi dan perangkat daerah sehingga menyebabkan duplikasi data dan ketidaksesuaian informasi yang dapat menghambat perencanaan dan pelayanan publik. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibangun sistem informasi kependudukan yang terintegrasi dan sinkron antar instansi serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan data.
3. Kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan seperti perpindahan domisili, pernikahan, dan kematian masih rendah, sehingga data yang tercatat sering tidak akurat dan tidak up to date. Oleh sebab itu, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan terkait pentingnya melaporkan perubahan data kependudukan, serta memperkuat layanan administrasi yang mudah dan cepat.
4. Fasilitas dan sarana pendukung administrasi kependudukan di sejumlah kecamatan dan desa masih terbatas sehingga menghambat proses pelayanan yang cepat dan efisien. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan sarana dan prasarana kantor capil, memperluas jaringan layanan, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akses layanan administrasi kependudukan.
5. Masih terdapat kendala dalam penanganan data kependudukan khususnya terkait validasi dan verifikasi dokumen administrasi yang menyebabkan keterlambatan pelayanan. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas sumber daya manusia serta penerapan mekanisme kerja yang jelas dan efisien dalam proses verifikasi dan validasi data kependudukan.

2.4.2.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berikut adalah beberapa masalah yang terjadi:

1. Kapasitas aparatur desa dan lembaga masyarakat di beberapa desa masih terbatas, terutama dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, dan pemanfaatan sumber daya lokal, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial aparatur desa serta penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan.

2. Keterbatasan akses terhadap informasi, teknologi, dan pasar menjadi kendala utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, yang menghambat pengembangan usaha produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu memfasilitasi akses informasi dan teknologi melalui pembangunan infrastruktur digital, penyediaan pelatihan kewirausahaan, serta membuka jaringan pemasaran produk lokal.

3. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa masih kurang optimal karena minimnya sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah desa dengan warga masyarakat, sehingga program yang dirancang kurang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Oleh sebab itu, perlu diterapkan mekanisme partisipatif yang lebih baik dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan evaluasi program.

4. Pendanaan untuk program pemberdayaan masyarakat dan desa masih terbatas dan belum tersalurkan secara optimal, mengakibatkan beberapa kegiatan tidak berjalan sesuai target. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan dana desa dan sumber pembiayaan lainnya, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk meningkatkan efektivitas program.

5. Belum adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan lembaga non-pemerintah dan sektor swasta dalam pemberdayaan masyarakat dan desa menyebabkan potensi kolaborasi belum maksimal. Maka dari itu, perlu dibangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk LSM, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk mendukung program pemberdayaan yang berkelanjutan.

2.4.2.14 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Berikut adalah beberapa masalah yang terjadi:

1. Angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan tekanan pada penyediaan pelayanan dasar dan infrastruktur, sehingga perlu dilakukan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui peningkatan akses dan kualitas layanan keluarga berencana yang terintegrasi dengan program kesehatan masyarakat.

2. Kesadaran masyarakat terutama di wilayah terpencil terhadap pentingnya program keluarga berencana masih rendah, yang menyebabkan tingkat penggunaan alat kontrasepsi belum optimal;

oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan yang menyasar kelompok usia reproduktif dengan pendekatan budaya yang sesuai.

3. Keterbatasan tenaga dan fasilitas pelayanan keluarga berencana di daerah pulau kecil menghambat akses masyarakat terhadap metode kontrasepsi yang aman dan efektif; maka dari itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan fasilitas layanan KB di seluruh wilayah, termasuk melalui mobilisasi layanan keliling.

4. Data kependudukan dan keluarga berencana yang belum akurat dan terintegrasi menyebabkan sulitnya perencanaan dan evaluasi program; oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi keluarga berencana yang berbasis teknologi digital dan memastikan sinkronisasi data dengan instansi terkait.

5. Minimnya peran serta pria dalam program keluarga berencana menjadi tantangan dalam pencapaian target pengendalian penduduk; sehingga perlu dilakukan kampanye dan program yang melibatkan pria secara aktif dalam pengambilan keputusan keluarga terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

2.4.2.15 Urusan Perhubungan

Berikut adalah beberapa masalah yang terjadi:

1. Infrastruktur transportasi darat di Kabupaten Kepulauan Anambas masih terbatas dan kurang memadai, terutama di wilayah pedesaan dan pulau-pulau kecil, sehingga menghambat konektivitas dan mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa; oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, serta sarana transportasi yang sesuai dengan karakter wilayah kepulauan.

2. Transportasi laut yang menjadi tulang punggung konektivitas antar pulau mengalami kendala berupa armada yang terbatas, jadwal yang tidak teratur, dan fasilitas pelabuhan yang belum memadai, sehingga menyulitkan akses masyarakat dan menghambat pengembangan ekonomi lokal; untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pengadaan armada kapal yang memadai, pengaturan jadwal pelayaran yang efektif, serta peningkatan fasilitas pelabuhan dan dermaga.

3. Sistem transportasi umum di daerah masih kurang berkembang dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat luas, khususnya dalam hal tarif yang terjangkau dan keterjangkauan rute; maka dari itu, pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan transportasi umum yang terintegrasi dan memberikan subsidi atau insentif agar tarif dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Kurangnya pengawasan dan pengaturan keselamatan transportasi menyebabkan tingginya risiko kecelakaan dan gangguan keamanan; oleh sebab itu, perlu diperkuat regulasi, peningkatan pengawasan, serta sosialisasi dan pelatihan keselamatan bagi operator dan pengguna transportasi.

5. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem transportasi mengakibatkan kurangnya transparansi dan efisiensi layanan, sehingga perlu diterapkan sistem informasi transportasi digital untuk pemantauan jadwal, tiket elektronik, dan pengelolaan armada secara modern.

2.4.2.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

Berikut adalah beberapa masalah yang terjadi:

1. Infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum merata, terutama di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil, sehingga akses masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informasi masih terbatas; oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan jaringan telekomunikasi berbasis teknologi terbaru serta pembangunan infrastruktur pendukung agar akses dapat dinikmati merata di seluruh wilayah.

2. Literasi digital masyarakat masih rendah, sehingga belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk keperluan pendidikan, pemerintahan, dan kegiatan ekonomi; untuk itu, perlu dilaksanakan program pelatihan dan sosialisasi peningkatan literasi digital yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

3. Pengelolaan data dan informasi pemerintah daerah belum terintegrasi secara optimal, menyebabkan layanan publik dan pengambilan keputusan kurang efektif; maka dari itu, perlu dikembangkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses oleh perangkat daerah maupun masyarakat.

4. Minimnya konten lokal yang mengangkat potensi dan budaya daerah di media digital menyebabkan kurangnya promosi dan pelestarian kearifan lokal; oleh sebab itu, perlu didorong pengembangan konten digital lokal melalui kolaborasi dengan komunitas kreatif dan pelaku seni budaya.

5. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi masyarakat masih belum menjadi prioritas yang memadai, sehingga rentan terhadap ancaman siber dan kebocoran data; oleh karena itu, perlu diterapkan kebijakan keamanan siber yang ketat, pelatihan bagi pegawai pemerintahan, serta sosialisasi kepada masyarakat terkait perlindungan data pribadi.

2.4.2.17 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Berikut adalah beberapa masalah yang terjadi:

1. Koperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum berkembang secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, modal, dan manajemen yang kurang profesional; oleh karena itu, perlu diselenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus koperasi, pendampingan teknis, serta fasilitasi akses pembiayaan untuk memperkuat keberlanjutan koperasi.

2. Usaha kecil dan menengah menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses modal yang memadai dan bersyarat ringan, sehingga menghambat pertumbuhan dan pengembangan usaha; untuk itu, perlu diperluas program pembiayaan mikro dengan bunga rendah dan kemudahan prosedur, serta mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan formal dan non-formal.

3. Keterbatasan akses pasar dan promosi produk lokal menjadi kendala utama dalam meningkatkan daya saing UKM; oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memfasilitasi pemasaran produk UKM melalui penyelenggaraan pameran, promosi digital, serta pengembangan jaringan distribusi yang terintegrasi.

4. Minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam operasional koperasi dan UKM menyebabkan efisiensi dan produktivitas yang rendah; maka dari itu, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk penggunaan platform *e-commerce* dan *digital marketing*.

5. Kurangnya sinergi antara koperasi, UKM, pemerintah daerah, dan sektor swasta menyebabkan potensi pengembangan usaha belum optimal; oleh karena itu, perlu dibangun kemitraan strategis serta program kolaborasi yang mendukung pengembangan kapasitas dan akses pasar bagi koperasi dan UKM.

2.4.2.18 Urusan Penanaman Modal

1. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan aksesibilitas menjadi kendala utama dalam menarik investor.
2. Promosi daerah sebagai tujuan investasi masih belum optimal, ditambah dengan terbatasnya insentif yang menarik bagi calon investor, sehingga minat investasi di daerah ini relatif rendah.
3. Keterbatasan koordinasi antara pemerintah daerah dan investor terhadap aspek pengendalian pelaksanaan ivenstasi
4. Belum terlaksananya penguatan program insentif bagi investor yang kompetitif di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.4.2.19 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1. Fasilitas olahraga yang belum tersedia dan memadai
2. Program pelatihan dan pembinaan kepemudaan serta olahraga masih terbatas

2.4.2.20 Urusan Statistik

1. Akses yang terbatas ke infrastruktur teknologi dan internet sehingga pengumpulan, pengolahan, dan distribusi data statistik belum optimal
2. Keterbatasan tenaga ahli dan pelatihan dalam bidang statistic

2.4.2.21 Urusan Persandian

1. Infrastruktur persandian belum memadai serta keterbatasan sumber daya manusia yang terampil
2. Terdapat risiko tinggi kebocoran data dan gangguan keamanan siber akibat sistem persandian yang masih rentan terhadap serangan digital.

2.4.2.22 Urusan Kebudayaan

1. Upaya pelestarian budaya tradisional, termasuk kesenian dan adat istiadat lokal, masih belum optimal. Hal ini berdampak pada identitas budaya di tengah modernisasi dan arus globalisasi.

2. Fasilitas pendukung untuk kegiatan kebudayaan, seperti museum, pusat seni, dan ruang pameran, masih belum memadai, sehingga kegiatan pelestarian dan promosi budaya belum berkembang secara optimal.

2.4.2.23 Urusan Perpustakaan

1. Perpustakaan yang belum memiliki fasilitas memadai dan koleksi buku yang cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
2. Terdapat kekurangan tenaga pustakawan yang terlatih untuk mengelola perpustakaan dan melaksanakan program-program literasi dengan efektif.

2.4.2.24 Urusan Kearsipan

1. Kendala dalam hal fasilitas dan teknologi yang memadai untuk manajemen arsip yang efisien, seperti perangkat keras dan perangkat lunak kearsipan yang belum memadai.
2. Keterbatasan SDM yang mengakibatkan pengelolaan arsip belum optimal dalam pemeliharaan serta pengorganisasian arsip.

2.4.2.25 Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Overfishing dan praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan menyebabkan penurunan jumlah stok ikan dan merusak ekosistem laut.
2. Kurangnya fasilitas penunjang seperti pelabuhan dan gudang penyimpanan yang memadai yang berpengaruh dalam efisiensi dan keamanan sektor perikanan.
3. Masih rendahnya pengawasan terhadap kegiatan perikanan dan penegakan hukum sebagai upaya pencegahan praktik ilegal dan melindungi sumber daya laut.

2.4.2.26 Urusan Pariwisata

1. Transportasi ke dan dari Kepulauan Anambas masih menjadi tantangan, yang berpengaruh dalam kedatangan wisatawan dan potensi pertumbuhan sektor pariwisata.
2. Fasilitas wisata, seperti penginapan dan pusat informasi, belum memadai untuk mendukung perkembangan pariwisata secara optimal.

3. Belum Optimalnya upaya promosi dan pemasaran daerah menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang potensi wisata di Kepulauan Anambas, yang berdampak pada rendahnya jumlah pengunjung.

2.4.2.27 Urusan Pertanian

1. Terbatasnya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan pertanian, seperti sistem irigasi dan transportasi, yang berpengaruh dalam produktivitas pertanian.
2. Masih rendahnya pelaksanaan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi petani, serta terbatasnya tenaga ahli, mengakibatkan rendahnya penerapan teknologi dan teknik pertanian modern.
3. Tantangan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrem berdampak negatif pada hasil pertanian dan ketahanan pangan.

2.4.2.28 Urusan Perdagangan

1. Infrastruktur yang belum memadai menghambat distribusi barang dan bahan kebutuhan pokok ke wilayah-wilayah terpencil, mengakibatkan harga barang yang tidak stabil dan sulit diakses oleh masyarakat.
2. Pelaku usaha lokal sering kali belum memiliki akses atau pengetahuan tentang teknik pemasaran modern, pengelolaan usaha yang efektif, sehingga mengurangi daya saing produk lokal.

2.4.2.29 Urusan Perindustrian

1. Minimnya fasilitas dan sarana industri yang memadai yang berpengaruh dalam pengembangan sektor perindustrian, yang berdampak pada daya saing produk local.
2. Akses pasar lokal dan regional yang masih belum optimal yang berpengaruh pada distribusi produk industri dan mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi local.
3. Terdapat kekurangan tenaga kerja terampil dalam bidang industri yang mengurangi efisiensi dan kualitas produksi.

2.4.2.30 Urusan Transmigrasi

1. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum di lokasi transmigrasi, yang dapat mempengaruhi akses dan kesejahteraan penduduk.
2. Kurangnya pelatihan yang dilaksanakan untuk penduduk transmigrasi dalam mengembangkan keterampilan dan kapasitas usaha

2.4.2.31 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Sekretariat Daerah

1. Keterbatasan fasilitas dan teknologi yang belum memadai yang brepengaruh dalam proses administrasi dan koordinasi yang efektif.
2. Masalah koordinasi dengan instansi lain dapat menghambat kelancaran dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pengambilan keputusan yang cepat.

Sekretariat DPRD

1. Keterbatasan Anggaran dalam memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan infrastruktur yang diperlukan oleh Sekretariat DPRD.
2. Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang memadai, yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat DPRD.

2.4.2.32 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan

1. Terbatasnya infrastruktur dan sulitnya akses transportasi antarpulau menghambat proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
2. Keterbatasan tenaga ahli di bidang perencanaan dan kurangnya pelatihan serta pengembangan kapasitas SDM lokal mengakibatkan kurang optimalnya perumusan kebijakan dan perencanaan strategis.

Keuangan

1. Terbatasnya sumber pendapatan asli daerah dan ketergantungan pada transfer dari pusat mengakibatkan keterbatasan dalam penyusunan anggaran untuk mendukung program-program pembangunan.

2. Beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan, seperti rendahnya kapasitas SDM di bidang keuangan dan kurang optimalnya sistem pengawasan, berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran.

3. Masih adanya ketimpangan alokasi dana antara sektor prioritas dan sektor lain yang mendukung urusan pemerintahan, sehingga beberapa sektor kurang mendapat perhatian yang memadai.

Kepegawaian

1. Terdapat keterbatasan jumlah dan kualitas pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan daerah, terutama di wilayah terpencil.

2. Proses mutasi dan promosi pegawai belum sepenuhnya berbasis kinerja dan kebutuhan organisasi, yang mengakibatkan penempatan pegawai yang kurang efektif.

Pendidikan dan Pelatihan

1. Jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik serta pelatih masih kurang, menyebabkan kualitas pendidikan dan pelatihan belum optimal.

2. Sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan, seperti ruang kelas, peralatan, dan fasilitas pendukung, masih terbatas atau kurang memadai.

3. Akses ke lembaga pendidikan dan pelatihan sulit dijangkau oleh masyarakat di pulau-pulau terpencil, menghambat kesempatan belajar dan pelatihan.

Penelitian dan Pengembangan

1. Keterbatasan SDM dan fasilitas yang memadai untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara efektif.

2. Terbatasnya dana yang tersedia untuk kegiatan penelitian dan pengembangan menghambat pelaksanaan proyek-proyek yang dapat mendorong kemajuan daerah.

3. Rendahnya tingkat koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah dan institusi penelitian, yang menghambat sinergi dalam melaksanakan program penelitian dan pengembangan.

Pengelola Perbatasan

1. Keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan menghambat upaya pengelolaan dan pengawasan yang efektif
2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat menyebabkan masalah dalam implementasi kebijakan dan pengelolaan perbatasan.

2.4.2.33 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah

1. Inspektorat Daerah menghadapi kendala dalam hal jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan efektif di seluruh wilayah kabupaten yang terdiri dari banyak pulau.
2. Masih terdapat tantangan dalam koordinasi dan kolaborasi antara Inspektorat Daerah dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain, sehingga pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan belum optimal.

2.4.2.34 Unsur Kewilayahan

Kecamatan

1. Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas, baik dari segi transportasi laut maupun udara, yang berdampak pada mobilitas penduduk dan distribusi barang serta jasa.
2. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan jaringan listrik di kecamatan-kecamatan tertentu menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan daerah.

2.4.2.35 Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Terdapat tantangan dalam meningkatkan kapasitas serta koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum secara efektif di daerah kepulauan yang terpencil.

2. Terdapat isu-isu yang berkaitan dengan stabilitas sosial dan keamanan, termasuk penanganan konflik sosial, menjaga ketertiban umum, serta mengantisipasi potensi kerawanan keamanan di wilayah perbatasan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan kembali kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia atau dimiliki, mengalokasikan sumber daya secara efektif sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran pada tahun berjalan sampai dengan triwulan II. Beberapa aspek penting dalam penyusunan anggaran diantaranya adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pembahasan dalam Bab ini menyoroti pentingnya kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2025 berdasarkan evaluasi kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025. Analisis ekonomi daerah dan proyeksi perekonomian daerah digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan alokasi keuangan daerah secara efektif. Pendekatan *money follow* program digunakan untuk mengarahkan pengalokasian anggaran daerah agar lebih efisien. Evaluasi proyeksi anggaran berdasarkan kondisi keuangan eksisting akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab berikutnya mengenai kerangka ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Dalam membuat arah kebijakan ekonomi daerah yang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah maka perlu memperhatikan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi. Upaya dalam mencapai target Pembangunan nasional harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal pusat dan daerah. Pendapatan daerah masih didominasi oleh besarnya ketergantungan dana transfer ke daerah yang mencapai lebih dari 80% rata-rata nasional. Disisi lain secara nasional *local tax ratio* masih sangat rendah yaitu 0,51%. Pajak

dan retribusi daerah yang menjadi sumber PAD belum mampu bahkan untuk pendanaan infrastruktur dan pelayanan dasar lainnya. Dengan adanya ketimpangan antara kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan pendanaan mengakibatkan belum mampunya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan. Adapun struktur APBD sebagian besar dialokasikan untuk belanja rutin yang rata-rata besarnya 67,26% dengan belanja pegawai sekitar 37-40%. Terdapat keragaman dalam kemampuan fiskal daerah juga dalam perbedaan kewenangan, sumber daya, dan karakteristik sehingga memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan pembangunan dan memerlukan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah yang diukur berdasarkan indikator makro Pembangunan yang akan diselaraskan dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif dan berkelanjutan.

Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan tetap stabil, dengan laju pertumbuhan sekitar 5 persen serta tingkat inflasi yang tetap terjaga. Optimisme ini didasari oleh pertumbuhan wilayah yang cukup merata, inflasi yang rendah, dan tingginya permintaan dari dalam negeri. Meski demikian, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketidakpastian geopolitik dan volatilitas harga komoditas global, yang perlu dicermati secara serius.

Tingkat ketidakpastian di pasar keuangan global masih tinggi, meskipun prospek perekonomian dunia pada 2025 tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Diperkirakan, ekonomi global akan tumbuh sebesar 3,2%, lebih rendah dibandingkan rata-rata historis pada periode 2000–2019 yang mencapai 3,7%. Proyeksi ini terutama didorong oleh tetap kuatnya perekonomian Amerika Serikat, yang ditopang oleh konsumsi domestik yang solid, percepatan investasi, serta peningkatan upah riil tenaga kerja, di tengah kebijakan moneter yang relatif longgar dan dukungan kebijakan fiskal yang ekspansif.

Sebaliknya, ekonomi Eropa diperkirakan tumbuh lebih lambat akibat lemahnya permintaan dalam negeri dan penurunan kinerja ekspor, sebagai imbas dari kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat. Di samping itu, ketegangan geopolitik, meningkatnya ketidakpastian politik, serta dinamika

kebijakan publik turut menekan kepercayaan konsumen dan berpotensi menghambat pertumbuhan lebih lanjut.

Sementara itu, negara-negara berkembang diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi sekitar 4,0%, sebagian besar disebabkan oleh masih lemahnya perekonomian Tiongkok akibat ketidakpastian kebijakan perdagangan dan lesunya pasar properti. Meskipun demikian, kebijakan stimulus fiskal yang digulirkan pemerintah Tiongkok diperkirakan mampu meredam perlambatan yang lebih tajam.

Di tengah situasi ekonomi global yang cenderung stagnan, Indonesia akan lebih bertumpu pada kekuatan permintaan domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, serta melanjutkan program bantuan sosial dan subsidi. Di sisi lain, upaya peningkatan ekspor produk bernilai tambah dan pemberian insentif fiskal yang menarik juga akan terus dilakukan. Pemerintah akan mengoptimalkan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan untuk mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan. Pada Triwulan I tahun 2025, perekonomian Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun masih dihadapkan pada tekanan eksternal. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan sangat bergantung pada respons pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan global. Proyeksi pada triwulan ini memperkirakan pertumbuhan dapat mencapai hingga 5%, yang didorong oleh tingginya permintaan dalam negeri dan inflasi yang tetap terkendali. Namun, perlambatan ekspor di sektor riil menjadi salah satu risiko yang perlu diwaspadai.

Pada Maret 2025, tingkat inflasi bulanan (month to month/m-to-m) tercatat sebesar 1,65 persen, sementara inflasi sejak awal tahun (year to date/y-to-d) mencapai 0,39 persen. Untuk komponen inti, inflasi tahunan (year on year/y-on-y) pada bulan yang sama berada di angka 2,48 persen, dengan inflasi bulanan sebesar 0,24 persen dan inflasi kumulatif sejak awal tahun sebesar 0,79 persen.

Kebijakan ekonomi tahun 2025 tetap difokuskan pada upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan agenda pembangunan Asta Cita Pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan secara terpadu melalui tujuh area kebijakan utama, yaitu:

1. penguatan stabilitas nilai tukar Rupiah untuk merespons dinamika global,

2. sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter,
3. peningkatan akses pembiayaan ekonomi melalui Kredit/Lembaga/Model (KLM),
4. percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan,
5. penguatan sektor hilirisasi dan ketahanan pangan,
6. pengembangan ekonomi hijau, ekonomi syariah, dan keuangan inklusif, serta
7. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Beberapa hasil analisis terhadap kondisi perekonomian yang menjadi dasar perumusan kebijakan tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Ketidakpastian global masih berada pada level yang tinggi, antara lain disebabkan oleh semakin meluasnya kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat.
2. Perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang tetap terjaga secara positif meskipun berada dalam situasi global yang penuh ketidakpastian.
3. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap solid dan memberikan kontribusi terhadap penguatan ketahanan sektor eksternal.
4. Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga, seiring dengan implementasi kebijakan stabilisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
5. Tingkat inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Februari 2025 berada pada level rendah dan memberikan dukungan terhadap kestabilan ekonomi nasional.
6. Penguatan strategi dan instrumen operasi moneter yang berpihak pada pasar (pro-market) terus dilakukan guna menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah dan pencapaian target inflasi.
7. Efektivitas transmisi kebijakan moneter berjalan dengan baik, khususnya pada sektor pasar uang.
8. Penyaluran kredit oleh sektor perbankan tetap tinggi dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada tahun 2025 menunjukkan optimisme, dengan rentang 4,8-5,6 persen. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Kepulauan Riau masih memiliki potensi untuk terus berkembang. BI juga memproyeksikan inflasi di Kepulauan Riau masih terkendali dalam sasaran 2,94 menunjukkan bahwa inflasi diperkirakan

tetap stabil dan berada dalam batas aman sesuai kebijakan nasional, yang menunjukkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan tahun, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh solid dengan kisaran pertumbuhan sebesar 4,5% – 5,3% (yoy), yang terutama ditopang oleh kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan besar-eceran. Kinerja sektor industri pengolahan diproyeksikan menguat seiring dengan berlanjutnya aktivitas hilirisasi dan peningkatan ekspor barang hasil industri, terutama di wilayah Batam dan Bintan. Selain itu, sektor perdagangan juga diharapkan meningkat seiring membaiknya mobilitas masyarakat dan peningkatan konsumsi domestik.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dari sisi pengeluaran diperkirakan ditopang oleh permintaan domestik yang tetap solid, khususnya dari konsumsi rumah tangga dan peningkatan investasi. Konsumsi domestik tumbuh seiring membaiknya daya beli masyarakat, yang didukung oleh kebijakan fiskal pemerintah, termasuk program bantuan sosial dan subsidi energi. Selain itu, belanja pemerintah pusat maupun daerah—khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar—juga mendorong pertumbuhan konsumsi.

Investasi diperkirakan meningkat sejalan dengan pengembangan kawasan industri, khususnya di Batam, Bintan, dan Karimun, serta adanya kemudahan berusaha melalui Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Kinerja ekspor antardaerah turut terdorong oleh pertumbuhan konsumsi luar provinsi, serta penguatan konektivitas logistik dan pelabuhan yang memfasilitasi arus barang dan jasa ke wilayah Sumatra dan Singapura.

Permintaan domestik di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 diperkirakan tetap kuat, meskipun mengalami penyesuaian seiring dengan berakhirnya momentum politik nasional dan daerah. Penguatan konsumsi masyarakat didorong oleh berbagai kebijakan fiskal yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, seperti insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan dan otomotif, serta kelanjutan bantuan sosial yang menyasar kelompok rentan.

Selain itu, pemberian subsidi energi dan penguatan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, termasuk manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), turut menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga terus mendorong

efisiensi biaya hidup melalui pengendalian inflasi pangan dan subsidi transportasi antarpulau di wilayah kepulauan.

Pada level provinsi, **Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 4,27%,** lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang naik 3,52%. Kenaikan UMP ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha, serta menjadi faktor penggerak konsumsi rumah tangga di wilayah Kepri.

Kinerja investasi di Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri, realisasi investasi pada tahun 2024 mencapai **Rp47,26 triliun**, mencatatkan peningkatan signifikan dan menempatkan Kepri di posisi ke-13 secara nasional.

Memasuki tahun 2025, kinerja investasi menunjukkan tren positif, tercermin dari capaian pada triwulan I yang telah menembus **Rp13,2 triliun**, atau sekitar 28% dari total realisasi tahun sebelumnya. Wilayah Kota Batam menjadi kontributor utama dengan porsi mencapai 65,2% dari total investasi provinsi, didukung oleh peran vital Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pertumbuhan investasi ini didorong oleh operasionalisasi proyek-proyek industri manufaktur, jasa teknologi, serta logistik di Batam, Bintan, dan Karimun. Pengembangan kawasan industri dan komersial di wilayah tersebut juga memberikan multiplier effect terhadap sektor jasa penunjang dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui DPMPTSP menargetkan peningkatan realisasi investasi tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan mengandalkan daya saing wilayah, perizinan yang lebih efisien, serta promosi investasi terpadu ke mitra strategis nasional maupun internasional.

Inflasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2025 diperkirakan sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap berada dalam rentang sasaran nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (year-on-year). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kepri tercatat sebesar 2,56% pada April 2025, kemudian menurun menjadi 1,73% pada Mei, dan kembali turun menjadi 1,32% pada Juni 2025. Meskipun inflasi masih terkendali, terdapat beberapa risiko yang dapat mendorong kenaikan inflasi,

terutama pada kelompok bahan pangan. Risiko tersebut antara lain berasal dari kenaikan harga produksi seperti pupuk, pakan ternak, serta harga gabah kering giling di tingkat petani yang dapat menciptakan harga keseimbangan baru pada sejumlah komoditas. Selain itu, faktor eksternal seperti inflasi impor akibat kenaikan tarif impor dan fluktuasi harga emas internasional juga memberikan tekanan terhadap harga di tingkat lokal.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki struktur ekonomi yang kuat, terutama ditopang oleh **industri pengolahan, perdagangan,** sektor **pertambangan/energi,** dan **konstruksi.** Sektor-sektor tersebut menjadi pilar utama yang menopang pertumbuhan ekonomi Kepri serta membuat provinsi ini termasuk dalam jajaran ekonomi tercepat di Sumatera.

Gambar 3.1

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Anambas, 2022-2024

Rincian/Description	Satuan/Unit	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/*SOCIAL*				
Penduduk[1]/*Population*[1]	ribu/*thousand*	2.121,5	2.152,6	2.183,29
Laju Pertumbuhan Penduduk[1]/*Population Growth*[1]	%	3,15	1,51	1,49
Angka Melek Huruf Usia 15+/*Literacy Rate Aged 15+*	%	99,20	99,05	99,20
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK[2] *Labour Force Participation Rate-LFPR*[2]	%	68,94	68,68	69,17
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT[2] *Unemployment Rate-UR*[2]	%	8,23	6,80	6,39
Penduduk Miskin[3]/*Poor People*[3]	ribu/*thousand*	151,68	142,50	138,30
Persentase Penduduk Miskin[3] *Percentage of Poor People*[3]	%	6,24	5,69	5,37
Indeks Pembangunan Manusia-IPM[4] *Human Development Index*[4]	–	78,48	79,08	79,89
EKONOMI/*ECONOMIC*				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku[5] *Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price*[5]	triliun rupiah *trillion rupiahs*	308,84	331,64	352,44
Laju Pertumbuhan Ekonomi[6]/*Economic Growth*[6]	%	5,09	5,16	5,02
PDRB Per Kapita Harga Berlaku *Per Capita of GRDP at Current Price*	juta rupiah *million rupiahs*	145,53	154,07	161,42
Inflasi/*Inflation (y-o-y)*	%	5,83[7]	2,76[7]	2,09[8]
Ekspor/Export	Juta/Million US$	19.549,53	18.938,34	19.559,72
Impor/Import	Juta/Million US$	16.640,28	17.795,01	17.059,71

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2025

3.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas

Pada Tahun 2025, kondisi ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas diperkirakan akan fluktuatif dengan melihat tren pendapata daerah yang cenderung menurun, namun kondisi fluktuatif tersebut tren negatif nya bisa dikendalikan dengan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya ialah terealisasinya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Selain itu strategi alternatif yang diupayakan pemerintah daerah seperti memperkuat kemitraan dengan sektor swasta, serta melakukan efisiensi pada belanja operasional dapat menjadi strategi pendukung bagi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Di sisi lain, mengingat struktur perekonomian Anambas sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, pemerintah daerah perlu menjamin keberlanjutan pembayaran gaji pegawai negeri serta pembayaran proyek kepada pihak ketiga guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Selain itu, sektor konektivitas dan sistem logistik juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan, khususnya dalam menjaga kestabilan harga bahan pangan, mengingat kebutuhan pangan sebagian besar masih dipasok dari luar daerah.

Secara keseluruhan, kinerja dan proyeksi indikator ekonomi serta sosial Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun 2024 dan 2025 dapat ditinjau melalui tabel berikut.

Tabel III- 1
Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas

Indikator Makro	Satuan	2023	2024	2025	2025
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,80	74,47	75,49	74,3
Persentase Penduduk Miskin	%	6,95	6,67	5,7	6,48
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,55	2,38	2,42	2,19
Pertumbuhan Ekonomi	%		4,58	3,97	3,26
Indeks Gini	Indeks	0,328	0,296	-	0,290

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

A. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Perencanaan kemampuan pendanaan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dilakukan dengan mengakomodasi proyeksi perbaikan kinerja ekonomi daerah yang diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

Pembiayaan daerah sebagian besar masih bergantung pada Transfer Keuangan Daerah, yang merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Daerah. Transfer ini dirancang untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (secara vertikal) maupun antar daerah (secara horizontal), serta untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang merata. Jenis-jenis Transfer Keuangan Daerah meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam upaya mengurangi ketimpangan fiskal dan meningkatkan pemerataan layanan antar daerah, pengelolaan Transfer Keuangan Daerah difokuskan pada peningkatan kinerja daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat menjamin tersedianya anggaran yang memadai bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sekaligus memperkuat peran serta tanggung jawab daerah dalam memberikan layanan secara efisien dan tertib. Dana Bagi Hasil sendiri disalurkan berdasarkan capaian penerimaan negara tahun sebelumnya, guna memberikan kepastian pendanaan. Di samping itu, pengalokasiannya juga akan mempertimbangkan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara dan upaya perbaikan atas dampak lingkungan dari kegiatan eksploitasi.

Penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) telah direformulasi dengan pendekatan yang lebih adil dan berbasis kebutuhan nyata. Perhitungan kebutuhan fiskal dilakukan dengan mempertimbangkan unit cost serta target layanan, sementara kapasitas fiskal dihitung berdasarkan potensi riil pendapatan daerah. Reformulasi ini tidak hanya menyasar aspek distribusi, tetapi juga aspek pemanfaatan, dengan tujuan mendorong peningkatan kinerja layanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu, salah satu fokus penggunaan DAU diarahkan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat, serta memastikan alokasi Dana Kelurahan yang memadai. Di sisi lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) difokuskan untuk

mendukung pencapaian prioritas nasional di daerah melalui pendekatan berbasis target kinerja, sembari menjaga prinsip pemerataan dan keseimbangan kualitas layanan antarwilayah.

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel III- 2
Penetapan APBD T.A 2025 dan Proyeksi Belanja Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Penetapan Tahun 2025*	Proyeksi Perubahan Tahun 2025*
5.			**BELANJA**	**1.040.859.314.973**	**847.118.199.811**
5.	**1.**		**BELANJA OPERASI**	**784.449.005.090**	**658.692.351.588**
	1.	01	Belanja Pegawai	514.949.159.286	468.252.931.967
	1.	02	Belanja Barang dan Jasa	264.260.065.123	187.040.563.833
	1.	05	Belanja Hibah	5.091.985.681	3.315.884.788
	1.	06	Belanja Bantuan Sosial	147.795.000	82.971.000
5.	**2.**		**BELANJA MODAL**	**142.215.982.236**	**73.098.599.203**
		01	Belanja Modal Tanah	3.808.975.640	0
		02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.919.005.882	19.706.591.330
		03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.619.649.702	29.802.928.599
		04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.907.124.696	22.627.852.958
		05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	924.305.280	924.305.280
		06	Belanja Modal Aset Lainnya	36.921.036	36.921.036
5.	**3.**		**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**8.981.012.989**	**13.147.263.979**
		01	Belanja Tidak Terduga	8.981.012.989	13.147.263.979
5.	**4.**		**BELANJA TRANSFER**	**105.213.314.659**	**102.179.985.041**
		01	Belanja Bagi Hasil	3.096.467.249	4.542.567.672
		02	Belanja Bantuan Keuangan	102.116.847.410	97.637.417.369
6.	**2.**		**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**
6.	2.	02	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	**0**	**0**
6.	2.	04	Pemberian Pinjaman	**0**	**0**

Kode Rekening	Uraian	Penetapan Tahun 2025*	Proyeksi Perubahan Tahun 2025*
	Daerah		
JUMLAH BELANJA		**1.040.859.314.973**	**847.118.199.811**

Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2021 s.d 2024,

** Data penetapan APBD 2025 (tahun berjalan)

Perubahan RKPD tahun 2025 disusun dan dianggarkan dengan komposisi belanja sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Pada Perubahan RKPD tahun anggaran 2025 komponen belanja operasi dialokasikan sebesar Rp. 658.692.351.588,- atau setara dengan 77,76 % dari total pengeluaran belanja sebesar Rp. 847.118.199.811. Belanja barang dan jasa pada belanja operasi menjadi salah satu prioritas belanja pada perubahan RKPD Tahun 2025 dalam pemenuhan penganggaran sebesar 22,08 %, Gaji dan TPP ke-13 ASN, THR ASN, serta gaji PPPK yang dilantik di tahun 2025.

2. Belanja Modal

Pada Perubahan RKPD tahun anggaran 2025 komponen belanja modal dialokasikan sebesar Rp. 73.098.599.203 atau setara dengan 8,63 % dari total pengeluaran daerah sebesar Rp. 847.118.199.811. Belanja Modal juga diprioritaskan pada perubahan RKPD Tahun 2025 dalam pemenuhan mandatory kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan standar layanan dan pembangunan yang merata di daerah.

3. Belanja Tidak Terduga

Pada RKPD Perubahan tahun anggaran 2025 memiliki komponen belanja tidak terduga yang kemudian dialokasikan sebesar Rp. 13.147.263.979,- atau setara dengan 1,55 % dari total penetapan pengeluaran daerah.

4. Belanja Transfer

Pada RKPD tahun anggaran 2025 komponen belanja transfer yang dialokasikan sebesar Rp. 102.179.985.041,- atau setara dengan 12,06 % dari total pengeluaran daerah.

Tabel III- 3
Belanja Wajib Yang Ketentuannya Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan (*Mandatory Spending*) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jenis Belanja *Mandatory Spending*	Pagu Indikatif	Persentase Terhadap Total Belanja Daerah
A	**BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN**			
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	49.405.146.260	4,91
		Program Pengembangan Kurikulum	0	0
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	258.401.000	0,03
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	60.000.000	0,01
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	400.000.000	0,04
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	4.119.178.596	0,41
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	898.642.056	0,09
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	185.021.522.818	18,38
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Program Pembinaan Perpustakaan	1.028.442.572	0,10
		Program Pengelolaan Arsip	105.167.274	0,01
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.152.538.866	0,31
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	280.000.000	0,03
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	0	0
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	0	0
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.310.693.588	0,63
4	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	0
	TOTAL BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN		**251.039.733.030**	**24,94**
B	**BELANJA FUNGSI KESEHATAN**			
1	Dinas	Program Pemenuhan	79.141.193.474	7,86

No	Perangkat Daerah	Jenis Belanja *Mandatory Spending*	Pagu Indikatif	Persentase Terhadap Total Belanja Daerah
	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	552.764.200	0,05
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	310.845.920	0,03
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	105.018.000	0,01
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	118.161.497.982	11,74
	TOTAL BELANJA FUNGSI KESEHATAN		**198.271.319.576**	19,70
C	**BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK**			
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	79.141.193.474	7,86
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	118.161.497.982	11,74
		Jumlah	**197.302.691.456**	**19,60**
2		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	400.000.001	0,04
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.129.356.745	0,11
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	309.450.000	0,03
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	11.560.501.712	1,15
		Program Penataan Bangunan Gedung	7.743.674.001	0,77
		Program Penataan Bangunan dan	0	-

No	Perangkat Daerah	Jenis Belanja *Mandatory Spending*	Pagu Indikatif	Persentase Terhadap Total Belanja Daerah
		Lingkungannya		
		Program Penyelenggaraan Jalan	52.952.107.304	5,26
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	119.995.900	0,01
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	116.979.115	0,01
		Program Pengembangan Perumahan	125.120.286	0,01
		Program KawasanPermukiman	1.251.312.038	0,12
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	487.709.041	0,05
		Jumlah	**76.196.206.143**	**7,57**
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	0	
		Jumlah	0	
4	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	8.337.792.693	0,83
		Jumlah	**8.337.792.693**	**0,83**
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	272.285.877	0,03
		Jumlah	**272.285.877**	**0,03**
6	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	323.811.826	0,03
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1.759.485.834	0,17
		Program Pengelolaan Pelayaran	3.648.043.585	0,36

No	Perangkat Daerah	Jenis Belanja *Mandatory Spending*	Pagu Indikatif	Persentase Terhadap Total Belanja Daerah
		Jumlah	**5.731.341.245**	**0,57**
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	
		Jumlah	0	
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.561.265.456	0,95
		Program Pendaftaran Penduduk	293.241.636	0,03
		Jumlah	**9.854.507.092**	0,98
9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.097.751.864	0,41
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.377.078.356	0,34
		Jumlah	**7.474.830.220**	0,74
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	428.304.000	0,04
		Jumlah	**428.304.000**	0,04
11	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	400.000.000	0,04
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	4.119.178.596	0,41
		Program Pengelolaan Pendidikan	49.405.146.260	4,91
		Jumlah	**53.924.324.856**	5,36
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	427.012.164	0,04
		Jumlah	**427.012.164**	0,04
13	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.152.538.866	0,31
		Jumlah	**3.152.538.866**	0,31
14	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.114.307.002	0,41
		Program Pengelolaan	1.195.896.281	0,12

No	Perangkat Daerah	Jenis Belanja *Mandatory Spending*		Pagu Indikatif	Persentase Terhadap Total Belanja Daerah
		Perikanan Budidaya			
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		104.643.300	0,01
		Jumlah		**5.414.846.583**	**0,54**
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		0	
		Jumlah		0	
16	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		0	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		8.424.044.976	0,84
		Jumlah		**8.424.044.976**	**0,84**
	TOTAL BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK			**376.940.726.171**	**37,45**
D	**BELANJA FUNGSI PENGAWASAN**				
1	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	0,13		0,13
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	0,09		0,09
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,13		1,13
	TOTAL BELANJA FUNGSI PENGAWASAN			**13.628.867.075**	**1,35**
E	**BELANJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		0,09	0,09
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		0,14	0,14
	TOTAL BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			**2.294.466.398**	**0,23**
F	**BELANJA PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**				
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan		49.405.146.260	4,91
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		258.401.000	0,03

No	Perangkat Daerah	Jenis Belanja *Mandatory Spending*	Pagu Indikatif	Persentase Terhadap Total Belanja Daerah
		Jumlah	**49.663.547.260**	**4,93**
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	79.141.193.474	7,86
		Jumlah	**79.141.193.474**	**7,86**
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.129.356.745	0,11
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	309.450.000	0,03
		Program Pengembangan Perumahan	125.120.286	0,01
		Program Kawasan Permukiman	1.251.312.038	0,12
		Jumlah	**2.815.239.069**	**0,28**
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	0	
		Jumlah	**0**	
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	8.337.792.693	0,83
		Jumlah	**8.337.792.693**	0,83
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	**272.285.877**	0,03
		Jumlah	**272.285.877**	0,03
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	274.095.000	0,03
		Program Penanganan Bencana	40.905.000	0,00
		Jumlah	**315.000.000**	**0,03**
	TOTAL BELANJA PEMENUHAN SPM		**1.006.436.460.507,00**	**0,03**

Kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman strategis yang mengarahkan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya fiskal yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat kapasitas fiskal riil daerah secara berkelanjutan dan memastikan efisiensi dalam penggunaannya guna mendorong pembangunan yang inklusif dan akuntabel.

Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, serta mekanisme pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip pembagian kewenangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan dan menjamin ketersediaan dana untuk setiap urusan pemerintahan. Adapun sumber pendanaan daerah bisa mencakup apa saja termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah; dana transfer (termasuk Dana Perimbangan dan Dana Transfer Khusus); dan sumber pendapatan sah lainnya.

Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki posisi yang strategis dalam sistem keuangan daerah sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal, sekaligus menjadi media akuntabilitas publik dalam pelaksanaan program pembangunan. APBD selain sebagai instrumen juga berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal daerah yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta harus mampu merepresentasikan kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal. Proses dari perencanaan serta pelaksanaan anggaran yang terstruktur, tertib, dan disiplin diyakini mampu meningkatkan efektivitas pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, Kabupaten Kepulauan Anambas masih menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, dengan rasio kemandirian fiskal yang berada pada kisaran 4%–5%, jauh di bawah ambang 25%. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kapasitas fiskal daerah dan tingginya risiko fiskal apabila terjadi perubahan kebijakan transfer pusat.

Dalam rangka mengurangi tingkat ketergantungan fiskal dan memperkuat kemandirian daerah, telah dirumuskan sejumlah strategi pengelolaan APBD Tahun 2025, sebagai berikut:

Strategi yang diperlukan dalam Pengelolaan APBD 2025 :

a) Mengelola keuangan daerah secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta mengoptimalkan seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;

b) Meningkatkan efisiensi belanja daerah agar daya serap anggaran optimal dan meminimalkan akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);

c) Memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah guna meningkatkan kontribusi pendapatan dari sektor pajak;

d) Menekan alokasi belanja untuk pembangunan yang berpotensi menimbulkan biaya pemeliharaan tinggi di masa mendatang.

Arah Kebijakan APBD 2025 sebagai berikut:

a) Memperkuat koordinasi dan sinergi antar-stakeholder dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara optimal;

b) Menata belanja daerah melalui pendekatan efisiensi dan pengawasan berkelanjutan agar pelaksanaan pembangunan tidak mengalami keterlambatan atau hambatan;

c) Menyelesaikan pekerjaan yang tertunda dari tahun sebelumnya agar kesinambungan pembangunan daerah tetap terjaga;

d) Melakukan pembaruan dan validasi data wajib pajak secara menyeluruh guna meningkatkan ketepatan target penerimaan pajak daerah;

e) Melakukan prioritisasi pembangunan berdasarkan analisis kebutuhan dan dampak biaya jangka panjang, untuk menghindari pemborosan akibat tingginya biaya operasional dan pemeliharaan.

3.2.1 Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah 2021-2026

Pendapatan Daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, didefinisikan sebagai: “semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

dalam periode tahun anggaran berkenaan". Secara umum, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diartikan sebagai seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi wilayahnya sendiri, yang pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber PAD meliputi :

A. Pajak Daerah, yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

B. Hasil retribusi daerah, yaitu berupa pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang memang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah, antara lain :

   i. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;

   ii. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;

   iii. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

D. Lain-lain PAD yang sah, antara lain :

   i. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

   ii. Jasa giro;

   iii. Pendapatan bunga;

   iv. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

v. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

vi. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

vii. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

viii. Pendapatan denda pajak;

ix. Pendapatan denda retribusi;

x. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

xi. Pendapatan dari pengembalian;

xii. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;

xiii. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

xiv. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pemberian sumber PAD bagi daerah ini memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan, atau yang dikenal juga sebagai Pendapatan Transfer, merupakan jenis penerimaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencakup bagi hasil pajak dan bukan pajak,
2. Dana Alokasi Umum (DAU), dan
3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tujuan utama dari mekanisme dana perimbangan ini adalah untuk:

1. Mengurangi ketimpangan kemampuan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta
2. Mengatasi disparitas pembiayaan antar daerah agar tercapai pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Meliputi: Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi antara lain meliputi bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, bagi hasil air permukaan, dan dana penyesuaian dari otonomi khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi, pada saat nanti ketika evaluasi gubernur atas rancangan APBD.

Kegiatan dapat berupa analisis dan estimasi pendapatan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat capaian serta potensi fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pendanaan pembangunan daerah. Proses ini dilakukan dengan menganalisis tren historis dan proyeksi pendapatan berdasarkan data yang tersedia, yaitu:

1. Realisasi pendapatan tahun 2020,
2. Realisasi pendapatan tahun 2021,
3. Realisasi pendapatan tahun 2022,
4. Realisasi pendapatan tahun 2023,
5. Penetapan target pendapatan tahun 2024, serta
6. Proyeksi pendapatan untuk tahun 2025 sebagai tahun rencana.

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan keuangan daerah, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan fiskal yang tepat dan berkelanjutan.

Tabel 3. 1
Realisasi Pendapatan Tahun 2021

Kode Rekening			Uraian	Realisasi Tahun 2021*
1			2	3
1			**PENDAPATAN**	

1	1		**Pendapatan Asli Daerah**	**33.325.052.262,96**
1	1	1	Hasil Pajak Daerah	13.248.704.027,79
1	1	2	Hasil Retribusi Daerah	4.731.456.914,83
1	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.979.148.878,00
1	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.365.742.442,34
1	2		**Dana Perimbangan**	**624.335.477.614,00**
1	2	1	Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak (SDA)	169.817.097.319,00
1	2	2	Dana Alokasi Umum	368.303.160.000,00
1	2	3	Dana Alokasi Khusus	86.215.220.235,00
1	3		**Lain - lain pendapatan yang sah**	**13.183.312.366,22**
1	3	1	Pendapatan Hibah	13.183.312.366,22
1	3	2	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42.160.395.659,00
1	3	3	Dana Bantuan dan Otonomi Khusus	132.983.320.000,00
1	3	4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13.500.000.000,00
PENDAPATAN DAERAH				**845.562.863.756,18**

Tabel 3. 2
Realisasi Pendapatan Tahun 2022-2024

Kode Rekening			Uraian	Realisasi Tahun 2022*	Realisasi Tahun 2023*	Realisasi Tahun 2024*
1			2	3	4	5
4			**PENDAPATAN**			

4	1		**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**29.686.658.850,51**	**29.362.242.093,73**	**28.300.153.780,06**
4	1	01	Pajak Daerah	15.965.570.313,97	16.310.773.757,00	18.599.426.707,00
4	1	02	Retribusi Daerah	3.984.032.171,00	7.134.834.674,00	1.566.244.153,00
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.623.626.298,00	1.596.888.717,00	1.241.953.264,00
4	1	04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.113.430.067,54	4.319.744.945,73	6.892529.656,06
4.	**2.**		**Pendapatan Transfer**	**783.315.186.389**	**969.008.038.949,00**	**773.804.025.511,00**
4.	2.	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	729.061.340.260	907.065.480.975,00	722.026.979.739,00
4.	2.	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.253.846.129,00	61.942.557.974,00	51.777.045.772,00
4.	**3.**		**Lain - lain pendapatan Daerah yang Sah**	**11.552.146.713,00**	**0,00**	**156.868.663,00**
4.	3.	03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	11.552.146.713,00	0,00	156.868.663,00

			Perundang-Undangan			
6			**PEMBIAYAAN**	**49.198.574.587,26**	**5.849.631.846,59**	**24.933.952.263,35**
	1.		Penerimaan Pembiayaan	49.198.574.587,26	7.849.631.846,00	24.933.952.263,35
		01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.091.005.786,26	6.984.586.830,57	23.949.728.959,68,00
		05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.107.568.801,00	865.045.016,02	984.223.303,67
PENDAPATAN DAERAH				**824.553.991.952,51**	**998.370.281.042,73**	**802.261.047.954,00**

Tabel 3. 3
Penetapan APBD T.A 2025 dan Proyeksi Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Penetapan Tahun 2025**	Proyeksi Tahun 2025***
1			2	3	4
4.			**PENDAPATAN**		
4.	**1**		**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**53.491.122.423**	**54.782.584.564**
4.	1.	01	Pajak Daerah	25.122.015.531	24.281.732.186
4.	1.	02	Retribusi Daerah	6.824.360.000	5.520.710.921
4.	1.	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.500.000.000	2.613.816.304
4.	1.	04	Lain-lain	20.044.746.892	22.366.325.153

			Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
4.	**2.**		**Pendapatan Transfer**	**828.820.943.352**	**1.460.064.889.876**
4.	2.	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	786.212.377.100	1.379.896.293.589
4.	2.	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.608.566.252	80.168.596.287
4.	**3.**		**Lain - lain pendapatan Daerah yang Sah**	168.889.776	14.566.307.446
4.	3.	03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**168.889.7**	**14.566.307.446**
6			**PEMBIAYAAN**	**158.378.359.422**	**-**
	1.		Penerimaan Pembiayaan	158.378.359.422	**-**
		01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	157.878.359.42	-
		05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,0	-
PENDAPATAN DAERAH				**1.040.859.314.973**	**1.529.413.781.886**

Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2021 s.d 2024

** Data penetapan APBD 2025 (tahun berjalan)

*** Data Asumsi RKPD 2025 (tahun rencana)

Perubahan pada asumsi pendapatan daerah ini dihitung berdasarkan penerimaan pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2025.

1. Pendapatan Asli Daerah

Perencanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada proyeksi kondisi perekonomian daerah di tahun perencanaan, serta capaian kinerja penerimaan PAD pada tahun anggaran sebelumnya. Secara khusus, estimasi PAD tahun 2025 mempertimbangkan tren pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi, serta realisasi pendapatan yang tercatat dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa target PAD yang ditetapkan bersifat realistis, akuntabel dan mencerminkan kemampuan fiskal daerah secara aktual, sehingga dapat menjadi pijakan yang kuat dalam mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

a. Hasil Pajak Daerah

   Komponen penerimaan dari pajak daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 ditargetkan mencapai sebesar RP. 25.122.015.531 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan proyeksi penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang sebesar Rp. 24.281.732.186. Di samping itu, kontribusi dari komponen pajak lainnya seperti pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak air tanah juga turut memperkuat proyeksi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan.

b. Hasil Retribusi Daerah

   Target penerimaan dari pos retribusi daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 6.824.360.000, yang nilainya diasumsikan tetap atau sedikit

mengalami penurunan dengan proyeksi penetapan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 5.520.710.92. Sumber utama penerimaan retribusi tersebut berasal dari sektor retribusi jasa umum, khususnya layanan di bidang kesehatan. Secara umum, pendapatan dari retribusi daerah bersumber dari tiga kelompok utama, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, yang secara kolektif berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada RKPD 2025 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diasumsikan meningkat di tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000. Penerimaan tersebut ditunjang atas penyertaan modal pada Bank Riau Kepri, dengan mempertimbangkan penerimaan dengan realisasi laba yang diterima pada tahun berjalan di tahun 2025.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah ditargetkan sebesar Rp. 168.889.776. Nilai tersebut diasumsikan akan mengalami perubahan dibandingkan dengan besaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai proyeksi sebesar Rp. 14.566.307.446. Estimasi ini disusun dengan mempertimbangkan kecenderungan penerimaan pada tahun sebelumnya serta stabilitas sumber pendapatan yang termasuk dalam kategori lain-lain PAD yang sah.

2. Pendapatan Transfer

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Pemerintah Daerah melalui penerimaan daerah yang bersumber dari

pendapatan transfer terdiri atas dua komponen utama, yakni pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan mencapai sebesar Rp. 1.379.896.293.589, sedangkan pendapatan transfer antar daerah diasumsikan sebesar Rp. 80.168.596.287. Estimasi tersebut disusun berdasarkan kecenderungan alokasi dana transfer pada tahun-tahun sebelumnya serta kebijakan fiskal nasional yang berlaku.

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Penerimaan daerah dapat dikategorikan dalam komponen lain-lain dalam pendapatan yang sah, pada dasarnya ditargetkan berasal dari dua sumber utama, yakni dana bagi hasil pajak daerah yang disalurkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah lainnya, serta bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau entitas pemerintahan daerah lainnya. Komponen ini berfungsi sebagai pelengkap sumber pendapatan daerah yang turut mendukung pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah.

3.2.3 Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024 & Asumsi Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada RKPD tahun 2025, terdapat dua komponen utama dalam penerimaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan daerah dari SiLPA dan penerimaan kembali pembiayaan daerah (dana bergulir). Sementara pada komponen pengeluaran pembiayaan pada RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 tidak mengalokasikan anggaran pembiayaan Penyertaan Modal

Daerah pada BUMD (hibah perseroda) dan pembiayaan pinjaman dana bergulir di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 3. 4
Realisasi Pembiayaan Tahun 2023-2024, Penetapan 2025 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Realisasi 2023*	Realisasi 2024*	Penetapan 2025**
1			2	3	4	5
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6	**1**		**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**102.545.555.597**	**24.933.952.263**	**158.378.359.42**
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya	102.045.555.597	23.949.728.959,68	157.878.359.422
6	1	05	Penerimaan Kembali Pemberin Pinjaman (Dana Bergulir)	500.000.000	984.223.303,67	500.000.000
6	**2**		**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**2.000.000.000**	**0**	**0**
	2	02	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	-	-	-
	2	04	Pemberian pinjaman Daerah (Dana Bergulir)	2.000.000.000	0	0
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO				**100.545.555.597**	**24.933.952.263,35**	**158.378.359.422**

Sumber * Realisasi Tahun 2023 dan 2024

** Data Pembiayaan Daerah 2025 (tahun berjalan)

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah telah terealisasikan pada perubahan RKPD 2025 sebesar Rp. 159.878.359.422, dan penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya yang telah terealisasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 157.878.359.422. Penerimaan kembali pemberian pinjaman (Dana Bergulir) sebesar Rp. 500.000.000.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah yang telah terealisasikan pada tahun 2025 sebesar Rp 0.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan RPJMD

Visi, misi dan janji kerja yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode tahun 2025-2030. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.

Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"KEPULAUAN ANAMBAS YANG BERDAYA SAING, INOVATIF, AGAMIS, UNGGUL DI BIDANG MARITIM MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA"

Terdapat lima kata kunci/frasa yang terkandung pada rumusan visi tersebut dengan masing-masingnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Berdaya saing, adalah kondisi ketika sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki produktivitas yang tinggi dan mampu bersaing dengan daerah-daerah serupa lainnya. Kualitas SDM yang baik ini dibentuk dari layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai dan menjangkau seluruh warga. Melalui akses yang baik terhadap pendidikan, maka SDM daerah akan dapat bersaing dengan SDM dari daerah lain sehingga kebutuhan akan tenaga kerja terampil (*high skilled workers*) dapat dipenuhi oleh warga daerah sendiri. Pelaku-pelaku UMKM memiliki daya saing dan produktivitas berbekal kualitas input yang digunakan dan penggunaan teknologi. Daya saing yang meningkat tercermin dari Indeks Daya Saing Daerah.
2. Inovatif, adalah masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang adaptif dengan berbagai pendekatan baru dalam pembangunan sehingga dapat senantiasa kreatif dalam mengembangkan solusi-solusi baru sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Berbagai perkembangan terkini yang menuntut adanya pendekatan yang inovatif

adalah i) ketahanan pangan, energi, dan air (food, energy, and water nexus), dan ii) serta perekonomian daerah yang dikembangkan dengan berbasis pada ekonomi biru.

3. Agamis, adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki keimanan yang kuat, ketaatan dalam beribadah berdasarkan keyakinan yang dianut, serta mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang agamis memparipurnakan SDM yang berdaya saing, karena untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera, tidak cukup hanya berbekal daya saing (produktivitas dan keterampilan) saja, melainkan juga memerlukan moralitas yang tinggi sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
4. Unggul di bidang maritim, adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengoptimalkan karunia yang dimilikinya berupa untaian gugusan pulau-pulau dan kekayaan potensi laut. Berbekal karunia tersebut, maka Kabupaten Kepulauan Anambas akan memajukan wisata bahari yang memanfaatkan lingkungan pantai dan laut sebagai daya tarik utama. Kekuatan dasar dari wisata bahari terletak pada pemandangan, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni dan budaya serta karakteristik masyarakat kepulauan.

Untuk dapat memiliki keunggulan tersebut, maka infrastruktur pendukung usaha haruslah memadai dan prima, baik untuk perikanan (budidaya dan tangkap) maupun pariwisata. Diantara infrastruktur tersebut adalah ketersediaan energi, infrastruktur konektivitas dan logistik. Modernisasi dan digitalisasi harus dilakukan sehingga untuk produk perikanan misalnya, produknya menjadi produk yang memiliki ketelusuran (*traceability*) sebagai permintaan dari pasar dunia. Sertifikasi untuk berbagai produk yang dihasilkan juga harus didapatkan sehingga produk-produk tersebut dapat dijamin kualitasnya bagi konsumen internasional. Pengembangan destinasi dan promosi wisata daerah menjadi hal yang dikedepankan. Tentunya perwujudan berbagai program tersebut.

1. Maju dan sejahtera, adalah ketika masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mencapai taraf hidup yang makmur, sehat, dan damai. Kemakmuran menyangkut pada aspek ekonomi, sementara kesehatan menyangkut pada sisi fisik dan mental manusia. Adapun kedamaian terkait dengan aspek sosial, emosional, dan spiritual. Pengertian tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan bersifat multi-dimensi dan harus

diupayakan pemenuhannya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan usaha-usaha yang cukup untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut melalui penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan-pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan yang tinggi tercermin dari rendahnya angka kemiskinan melalui sumber-sumber penghidupan warga yang berkelanjutan dan ditunjang oleh berbagai program kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan. Untuk dapat mewujudkan kondisi-kondisi yang termuat di dalam pernyataan visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut.

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

Misi 3 : Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif

Misi 4 : Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata

Misi 5 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan

Tabel IV- 1
Penjabaran Prioritas Perubahan RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2025

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	
KEPULAUAN ANAMBAS YANG BERDAYA SAING, INOVATIF, AGAMIS, UNGGUL DI BIDANG MARITIM MENUJU	**Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai- nilai luhur**	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya secara merata		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,864
			Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	68,96
			Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Indeks Kesehatan	74,48

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA			Meningkatnya kualitas Pengembangan kebudayaan	Indeks Pengembangan Kebudayaan	53,7
			Meningkatnya kualitas kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,49
			Meningkatnya stabilitas sosial dan kehidupan beragama yang rukun	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	90
	Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;	Mewujudkan Anambas sebagai hunian yang nyaman	Meningkatnya pemerataan dan kulitas infrastruktur di daerah	Indeks Kota Layak Huni	5,1*
				IDSD pilar infrastruktur	2,57
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,78
			Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	84,37

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029

Tabel IV- 2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

No	Indikator	Target 2025
1	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**75,49**
2	Indeks Pendidikan	75,4
3	Indeks Kesehatan	74,1
4	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	76,9
5	**Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas**	**4,09-5,09**

No	Indikator	Target 2025
6	Pertumbuhan PDRB sektor unggulan	5,42
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,08
8	Pertumbuhan Nilai Investasi	18,9
9	**Indeks RB**	**BB (71)**
10	Nilai Predikat SAKIP	BB (78)
11	Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah	WTP
12	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi (4,25)
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (89)
14	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (51)
15	Indeks Profesionalitas ASN	57,00
16	**Indeks Desa Membangun (IDM)**	**Maju (76,02)**
17	Persentase Desa Berkembang Menuju Desa Mandiri	94,23
18	**Persentase Infrastruktur dalam kondisi Baik**	**63,81**
19	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	63,57
20	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	53,20
21	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	80,00
22	Persentase Permukiman yang Tertata	80,00
23	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	42,26
24	**Rasio Konektifitas Kabupaten**	**0,7**
25	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	1,00
26	Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	1,00
27	Persentase Titik Lokasi/Desa terlayani telpon seluler dan atau internet yang memadai	100,00

Tabel IV- 3
Program Prioritas RKPD Tahun 2025

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Kepulauan Anambas yang berdaya Saing, Inovatif, agamis, Unggul di bidang maritim Menuju masyarakat Maju dan sejahtera	**Misi 1** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur	T1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya secara merata		**T1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**			
		S1.1	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan		**S1.1 Indeks Pendidikan**			
				Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	O1.1.1 Angka partisipasi Sekolah PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
					O1.1.2 Angka partisipasi Sekolah SD/MI			
					O1.1.3 Angka partisipasi Sekolah SMP/MTs			
				Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	O.1.1.4 Indeks Pemerataan Guru	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
					O.1.1.5 Persentase guru memiliki sertifikat pendidik			
		S1.2	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan		**S1.2 Indeks Kesehatan**			
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	O1.2.1 Angka Kematian Ibu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Urusan Pemerintahan	
					O1.2.2 Prevalensi Stunting			

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
							Upaya Kesehatan	Bidang Kesehatan	
					Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	O1.2.3 Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
					Meningkatnya kualitas dan distribusi ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	O1.2.4 Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makan minum	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
					Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	O1.2.5 Persentase Pelayanan kesehatan terakreditasi	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
			S1.3	Meningkatnya kualitas pembangunan kebudayaan		**S1.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan**			

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
					Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	O1.3.1 Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	
					Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembang	O1.3.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	
			S1.4	Meningkatnya kualitas kesetaraan gender		**S1.4. Indeks Pemberdayaan Gender**			
					Meningkatnya keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan	O1.4.1 Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
							Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik	
			S1.5	Meningkatnya stabilitas sosial dan kehidupan		**S1.5 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**			

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
				beragama yang rukun					
					Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	O1.5.1 Jumlah Peristiwa Konflik	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
						O1.5.2 Persentase Organiasi Keagamaan yang dibina	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan	Kecamatan	
	Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang	T2	Mewujudkan Anambas sebagai hunian yang nyaman			**T2.Indeks Kota Layak Huni**			
			S2.1	Meningkatnya pemerataan dan kulitas infrstruktur di daerah		**S2.1 IDSD pilar infrastruktur**			
					Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan	O2.1.1 Persentase jalan berkondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
					Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	O2.1.2 Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Ditangan	Program Kawasan Permukiman	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang	02.1.3 Persentase Permukiman yans Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
					berkualitas		Umum (PSU)		
					Meningkatnya akses masyarakat terhadap stem penyediaan air	02.1.4 Persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih dan akses air minum layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
					Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	02.1.5 Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	Program Pengebangan Permukiman	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
					Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	02.1.6 Rasio Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	Urusan Perhubungan	
			2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		**S2.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**			
						S2.3 Indeks Risiko Bencana			
					Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	O2.2.1 Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup	
						O2.2.2 Indeks Kualitas Udara			

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
					Meningkatnya pengelolaa keanekaragaman hayati	O.2.2.3 Indeks Tutupan Lahan	Program engelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Urusan Lingkungan Hidup	
					Meningkatatnya pengelolaan persampahan	O2.2.4 Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Program Pengeloaan Persampahan	Urusan Lingkungan Hidup	
					Meningkatnya layanan persampahan	O2.2.5 Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
					Meningkatnya akse masayarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	O2.2.6 Persentase peningkatan rumah tanggayang menempati hunian dengan akses sanitasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
					Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	O2.3.1 Persentaase perlindungan kawasan permukiman awan banjir	Program Sumber daya air	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
						O2.3.2 Persentase perlindungan kawasan dari abrasi dan rob			
	Misi 3 Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi	T3	Meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional dan kolaboratif			T3. Indeks Reformasi Birokrasi			
			S3.1 S3.2	Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel		S3.1 Nilai SAKIP			
						S3.2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
	yang inovatif				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	03.1.1 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Unsur Perencanaan	
						O3.1.2 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD			
					Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai	03.1.3 Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Program Kepegawaian Daerah	Unsur Kepegawaian	
					Meningktnya pengawasan internal dalam meminimalisir penyelewengan atau penyimpangan, yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	O3.1.4 Tindaklanjut atas rekomendasi	Program Penyelenggaran Pengawasan	Unsur Pengawasan	
					Meningkatnya tata kelola anggaran	O3.2.1 Persentase tata kelola Belanja anggaran Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Keuangan Daerah	
			S3.3 S3.4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, ramah dan inovatif		S3.3 Indeks Pelayanan Publik			
						S3.4 Indeks Inovasi Daerah			
					Terwujudnya Penataan Organisasi, penataan perundang-undangan, penataan tatalaksana,	03.3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unsur Pemerintahan	

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
					akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas				
					Meningkatnya pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	O3.3.2 Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika	
					Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	O3.4.1 Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Unsur Penelitian dan Pengembangan	
					Meningkatnya kajian yang termanfaatkan dalam pengembangan portensi unggul bidang maritim dan pariwisata	O3.4.2 Persentase penelitian strategis bidang maritim dan pariwisata yang digunakan dalam pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Unsur Penelitian dan Pengembangan	
	Misi 4 Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata	T4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata			T4. Laju Pertumbuhan Ekonomi			
			S4.1 S4.2 S4.3		Meningkatnya kontribusi sektor unggulan berbasis maritim dan pariwisata	S4.1 Kontribusi Perikanan terhadap PDRB (%)			
						S4.2 Kontribusi Penyediaan Akomodasi			

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
						dan Makan Minum terhadap PDRB (%)			
						S4.3 Rasio PDRB industri pengolahan			
					Meningkatnya pemanfatan laut,pesisir dfan pulau-pulau kecil	O4.1.1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Urusan Kelautan dan Perikanan	

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
					sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan				
					Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya	O4.1.2 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Urusan Kelautan dan Perikanan	
					Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	O4.1.3 Luas Kawasan Konservasi	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Urusan Kelautan dan Perikanan	
					Meningngkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	O4.2.1 Nilai Ekspor Barang	Program Pengembangan Ekspor	Urusan Perdagangan	
					Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	O4.2.2 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Urusan Pariwisata	
					Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	O4.2.2 Jumlah Wisatawan	Program Pemasaran Pariwisata	Urusan Pariwisata	

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
					Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif	O4.2.3 Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	Urusan Pariwisata	
					Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	O4.3.1 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatifyang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektua	Urusan Pariwisata	
					Meningkatnya realisasi pembangunan industri	O4.3.2 Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Urusan Perindustrian	
					Meningkatnya kuatlitas pertanian berbasis usaha bidang maritim dan pariwisata	O4.3.3 Persentase koperasi berkualitas	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Urusan Koperasi,Usaha Kecil Menengah	
					Meningkatnya kapasitas UMKM berbasis usaha bidang maritim dan pariwisata	O4.3.4 Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
							Usaha Mikro (UMKM)		
			S4.4	Meningkatnya investasi dan integrasi ekonomi		S4.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)			

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
					Meningkatnya iklim dan kemudahan berinvestasi	O4.4.1 Realisasi total Investasi terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal	
					Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	O4.4.2 Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal	
			S4.5	Menurunkan pengangguran daerah		S4.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
					Meningkatnya produktikvititas tenaga kerja	O4.5.1 Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja	

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
					Meningkatnya penempatan tenaga kerja	O4.5.2 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja	
	Misi 5 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.	T5	Menurunnya angka kemiskinan daerah			**Tingkat Kemiskinan**			
			S5.1 S5.2	Meningkatnya sumber penghidupan berkelanjutan masyarakat miskin		**S5.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan**			
						S5.2 Indeks Keparahan Kemiskinan			
					Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	O5.1.1 Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Urusan Sosial	
						O5.1.2 Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi			
					Meningkatnya pemberdayaan sosial	O5.2.1 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya	Program rehabilitasi sosial	Urusan Sosial	
			S5.3	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa		**S5.3 Indeks Desa**			

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
					Meningaktnya kerjasama antar desa	O5.3.1 Persentase desa yang bekerjasama antar desa	Program peningkatan kerjsama desa	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Program RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel IV- 4
Program RKPD Pendukung Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

No.	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Target SPM	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
1	Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	Program Pengembangan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
2	Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	100%	Program Penguatan Infrastruktur Pendidikan Dasar
3	Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	Program Peningkatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak
4	Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	Program Peningkatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak
5	Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	Program Peningkatan Layanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
6	Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	Program Peningkatan Kesehatan Anak
7	Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	100%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk Usia Produktif
8	Bidang Kesehatan	Pengelolaan kesehatan pada orang terduga Tuberkulosis	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada terduga Tuberkulosis
9	Bidang Perumahan dan Pemukiman	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	100%	Program Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
10	Bidang Pekerjaan Umum	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi MBR dan Korban Relokasi	100%	Program Penyediaan Rumah Layak Huni
11	Bidang Pekerjaan	Penyediaan air	100%	Program pengelolaan

No.	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Target SPM	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
	Umum	minum untuk kebutuhan sehari-hari		dan pengembangan sistem penyediaan air minum, Penyusunan rencana dan kebijakan SPAM
12	Bidang Pekerjaan Umum	Pengelolaan air limbah domestik	100%	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, Pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat
13	Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan fasilitas dan perlindungan masyarakat	100%	Peningkatan kualitas layanan perlindungan masyarakat, penguatan ketertiban umum, dan penanganan bencana
14	Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial untuk Penyandang Disabilitas	100%	Program Rehabilitasi Sosial

Program RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 mendukung pencapaian target SDGs dengan perincian kegiatan masing-masing program telah tercantum dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian target SDGs tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel IV- 5
Dukungan Program RKPD Tahun 2025 Terhadap Pencapaian Target SDGs

Tujuan SDGs	Program RKPD 2025 yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
Tanpa Kemiskinan	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu; pemberdayaan UMKM; pemberian bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu; penguatan akses pembiayaan mikro.
Tanpa Kelaparan	Penguatan ketahanan pangan lokal melalui peningkatan hasil pertanian dan perikanan; program distribusi pangan murah; penyediaan bibit unggul dan alat pertanian.

Tujuan SDGs	Program RKPD 2025 yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Peningkatan layanan kesehatan primer (Puskesmas, Posyandu); penanganan stunting dan gizi buruk; peningkatan cakupan imunisasi dan layanan ibu & anak.
Pendidikan Berkualitas	Rehabilitasi dan pembangunan sekolah; pengadaan sarana prasarana pendidikan; peningkatan kompetensi guru; pemberian beasiswa untuk siswa kurang mampu.
Kesetaraan Gender	Penguatan peran perempuan dalam UMKM; perlindungan perempuan & anak; pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan.
Air Bersih dan Sanitasi Layak	Penyediaan air bersih desa; pembangunan sanitasi berbasis masyarakat; perbaikan sistem drainase dan pengolahan limbah rumah tangga.
Energi Bersih dan Terjangkau	Penyediaan energi terbarukan di pulau-pulau terpencil; perluasan jaringan listrik desa; efisiensi penggunaan energi.
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan sektor pariwisata berbasis komunitas; pelatihan tenaga kerja; peningkatan iklim investasi daerah; pengembangan ekonomi kreatif.
Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Peningkatan akses jalan antar pulau; pembangunan pelabuhan dan sarana transportasi laut; digitalisasi layanan publik dan UMKM.
Berkurangnya Kesenjangan	Afirmasi pembangunan wilayah terpencil; program desa inklusif; penguatan pelayanan dasar di wilayah perbatasan dan pesisir.
Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	Pengembangan kawasan permukiman layak huni; pengendalian tata ruang dan RTRW; pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Program edukasi konsumsi ramah lingkungan; promosi produk lokal

Tujuan SDGs	Program RKPD 2025 yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
	berkelanjutan; pelatihan pengolahan limbah.
Penanganan Perubahan Iklim	Rehabilitasi hutan mangrove; kampanye sadar iklim; program mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
Ekosistem Lautan	Konservasi terumbu karang; penertiban aktivitas penangkapan ikan destruktif; penguatan kelembagaan nelayan ramah lingkungan.
Ekosistem Daratan	Pengawasan kawasan hutan lindung; penanaman kembali lahan kritis; konservasi flora-fauna lokal.
Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Reformasi birokrasi; peningkatan transparansi pelayanan publik; penguatan sistem pengawasan internal daerah.
Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Kemitraan dengan pemerintah pusat, NGO dan sektor swasta; pelibatan komunitas dan akademisi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat tentang rencana program kegiatan beserta kebutuhan penganggaran sebelum dan sesudah perubahan disertai dengan alasan dilakukannya perubahan. Secara prinsip, alasan-alasan dapat dilakukannya perubahan adalah untuk memastikan bahwa belanja-belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta belanja prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian, visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dapat terdanai.

Rencana kerja pendanaan daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan/subkegiatan, indikator kinerja/kegiatan/sub kegiatan, tahun rencana meliputi lokasi, target kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun rekapitulasi pagu anggaran belanja Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel V- 1
Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

NO	OPD	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	249.670.730.771,79
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	178.338.548.101,36
3.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	38.168.815.909,40
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	9.980.408.613,23
5.	Badan Kesatuan Bangsa Politik	6.612.601.662,00
6.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	6.594.451.680,18
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.571.333.728,00
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.442.567.727,15
9.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	13.832.656.622,13
10.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	11.588.145.291,12

NO	OPD	Pagu Anggaran (Rp)
11.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah. Perindustrian dan Perdagangan	8.137.035.806,66
12.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.598.993.625,08
13.	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	12.585.993.889,29
14.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.534.974.687,00
15.	Sekretariat Daerah	43.105.730.216,63
16.	Sekretariat DPRD	24.791.407.561,00
17.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.981.679.037,60
18.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	131.258.840.343,21
19.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7.575.023.467,11
20.	Inspektorat Daerah	12.388.366.387,76
21.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.436.173.416,31
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.144.521.811,70
23.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.541.370.790,73
24.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.985.368.301,79
25.	Kecamatan Siantan	4.976.249.577,41
26.	Kecamatan Jemaja	5.750.494.836,80
27.	Kecamatan Palmatak	4.278.725.103,11
28.	Kecamatan Siantan Timur	2.163.272.086,93
29.	Kecamatan Siantan Selatan	2.501.307.217,91
30.	Kecamatan Jemaja Timur	2.752.855.036,71
31.	Kecamatan Siantan Tengah	2.849.329.935,88
32.	Kecamatan Siantan Utara	2.337.489.852,05
33.	Kecamatan Jemaja Barat	2.096.520.790,63
34.	Kecamatan Kute Siantan	3.546.215.925,08
	Total Belanja Langsung	**847.118.199.810,74**

Total pengeluaran pada Perubahan RKPD 2025 adalah sebesar Rp. 847.118.199.810,74. Penjelasan lebih rinci terkait program, kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Perubahan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel V-…… sedangkan pada Perubahan RKPD terhadap RKPD 2025 terdapat penyesuaian anggaran, sebgai berikut:

Tabel V- 2
Pendanaan Program Perangkat Daerah RKPD 2025 terhadap RKPD Perubahan 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas

Pagu Indikatif (Rp)				
Urusan / Bidang Urusan / Program	**RKPD 2025**	**APBD 2025**	**RKPD Perubahan 2025**	**Bertambah/Berkurang (2-3)**
1	***2***	*3*	*4*	*5*
Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	**271.432.177.396,00**	244.247.376.230,70	249.670.730.771,79	-21.761.446.624,21
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	**255.237.477.517,00**	234.839.045.273,93	242.802.070.593,02	-12.435.406.923,98
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**203.970.521.212,00**	186.795.160.053,78	181.899.221.414,99	3.677.127.751,00
Program Pengelolaan Pendidikan	**49.616.956.305,00**	46.632.867.720,15	59.929.470.928,03	-22.657.913.816,00
Program Pengembangan Kurikulum	**1.100.000.000,00**	1.040.307.000,00	820.065.000,00	0
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	**200.000.000,00**	200.000.000,00	133.403.200,00	100.000.000,00
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	**350.000.000,00**	170.710.500,00	19.910.050,00	-200.000.000,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	**13.444.699.879,00**	8.007.102.517,77	6.221.764.769,77	-13.344.699.879,00
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	**1.550.000.000,00**	585.383.110,00	121.456.000,00	-1.250.000.000,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	**189.850.712.536,00**	182.268.814.739,90	178.338.548.101,36	-11.512.164.434,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**119.782.015.947,00**	120.378.127.160,95	113.829.075.433,19	-927.960.132,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**68.461.597.421,00**	58.372.441.378,95	61.531.426.468,17	62.211.893.698,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	**295.560.000,00**	549.901.000,00	549.901.000,00	257.204.200,00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	**30.000.000,00**	0	0	-30.000.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**30.000.000,00**	84.203.200,00	84.203.200,00	-20.000.000,00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**1.251.539.168,00**	2.884.142.000,00	2.343.942.000,00	1.092.402.832,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	**1.251.539.168,00**	2.884.142.000,00	2.343.942.000,00	1.092.402.832,00
Program Pengendalian Penduduk	**70.100.000,00**	192.000.000,00	192.000.000,00	-10.000.000,00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	**794.439.168,00**	2.179.342.000,00	1.639.142.000,00	-281.770.168,00
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	**387.000.000,00**	512.800.000,00	512.800.000,00	-352.200.000,00

Rsud Tarempa	**189.850.712.536,00**	182.268.814.739,90	178.338.548.101,36	-11.512.164.434,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**119.782.015.947,00**	120.378.127.160,95	113.829.075.433,19	-927.960.132,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**68.461.597.421,00**	58.372.441.378,95	61.531.426.468,17	62.211.893.698,00
Rsud Jemaja	**189.850.712.536,00**	182.268.814.739,90	178.338.548.101,36	-11.512.164.434,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**119.782.015.947,00**	120.378.127.160,95	113.829.075.433,19	-927.960.132,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**68.461.597.421,00**	58.372.441.378,95	61.531.426.468,17	62.211.893.698,00
Rsud Palmatak	**189.850.712.536,00**	182.268.814.739,90	178.338.548.101,36	-11.512.164.434,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**119.782.015.947,00**	120.378.127.160,95	113.829.075.433,19	-927.960.132,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**68.461.597.421,00**	58.372.441.378,95	61.531.426.468,17	62.211.893.698,00
Puskesmas Siantan Tengah	**189.850.712.536,00**	182.268.814.739,90	178.338.548.101,36	-11.512.164.434,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**119.782.015.947,00**	120.378.127.160,95	113.829.075.433,19	-927.960.132,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**68.461.597.421,00**	58.372.441.378,95	61.531.426.468,17	62.211.893.698,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**30.000.000,00**	84.203.200,00	84.203.200,00	-20.000.000,00
Puskesmas Letung	**189.850.712.536,00**	182.268.814.739,90	178.338.548.101,36	-11.512.164.434,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**30.000.000,00**	84.203.200,00	84.203.200,00	-20.000.000,00
Puskesmas Jemaja Timur	**189.850.712.536,00**	182.268.814.739,90	178.338.548.101,36	-11.512.164.434,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**30.000.000,00**	84.203.200,00	84.203.200,00	-20.000.000,00
Puskesmas Palmatak	**189.850.712.536,00**	182.268.814.739,90	178.338.548.101,36	-11.512.164.434,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**119.782.015.947,00**	120.378.127.160,95	113.829.075.433,19	-927.960.132,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**30.000.000,00**	84.203.200,00	84.203.200,00	-20.000.000,00
Puskesmas Tarempa	**189.850.712.536,00**	182.268.814.739,90	178.338.548.101,36	-11.512.164.434,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**119.782.015.947,00**	120.378.127.160,95	113.829.075.433,19	-927.960.132,00
Non Urusan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Xx	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**68.461.597.421,00**	58.372.441.378,95	61.531.426.468,17	62.211.893.698,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**30.000.000,00**	84.203.200,00	84.203.200,00	-20.000.000,00
Puskesmas Siantan Selatan	**189.850.712.536,00**	182.268.814.739,90	178.338.548.101,36	-11.512.164.434,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**119.782.015.947,00**	120.378.127.160,95	113.829.075.433,19	-927.960.132,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**68.461.597.421,00**	58.372.441.378,95	61.531.426.468,17	62.211.893.698,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**30.000.000,00**	84.203.200,00	84.203.200,00	-20.000.000,00
Puskesmas Siantan Timur	**189.850.712.536,00**	182.268.814.739,90	178.338.548.101,36	-11.512.164.434,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**119.782.015.947,00**	120.378.127.160,95	113.829.075.433,19	-927.960.132,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**68.461.597.421,00**	58.372.441.378,95	61.531.426.468,17	62.211.893.698,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**30.000.000,00**	84.203.200,00	84.203.200,00	-20.000.000,00
Balai Pengelola Farmasi Dan Alat Kesehatan (Bpfak)	**189.850.712.536,00**	182.268.814.739,90	178.338.548.101,36	-11.512.164.434,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**119.782.015.947,00**	120.378.127.160,95	113.829.075.433,19	-927.960.132,00
Puskesmas Jemaja Barat	**189.850.712.536,00**	182.268.814.739,90	178.338.548.101,36	-11.512.164.434,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**119.782.015.947,00**	120.378.127.160,95	113.829.075.433,19	-927.960.132,00
Non Urusan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Xx	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**30.000.000,00**	84.203.200,00	84.203.200,00	-20.000.000,00
Puskesmas Siantan Utara	**189.850.712.536,00**	182.268.814.739,90	178.338.548.101,36	-11.512.164.434,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**68.461.597.421,00**	58.372.441.378,95	61.531.426.468,17	62.211.893.698,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**30.000.000,00**	84.203.200,00	84.203.200,00	-20.000.000,00
Puskesmas Kute Siantan	**189.850.712.536,00**	182.268.814.739,90	178.338.548.101,36	-11.512.164.434,64

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**119.782.015.947,00**	120.378.127.160,95	113.829.075.433,19	-927.960.132,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**68.461.597.421,00**	58.372.441.378,95	61.531.426.468,17	62.211.893.698,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**30.000.000,00**	84.203.200,00	84.203.200,00	-20.000.000,00
Laboratorium Kesehatan Masyarakat	**189.850.712.536,00**	182.268.814.739,90	178.338.548.101,36	-11.512.164.434,64
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**188.599.173.368,00**	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**119.782.015.947,00**	120.378.127.160,95	113.829.075.433,19	-927.960.132,00
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	**319.371.142.392,00**	124.959.934.452,55	38.168.815.909,40	-281.202.326.482,60
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**318.821.142.392,00**	124.348.064.462,55	38.168.815.909,40	-280.652.326.482,60

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**311.191.142.392,00**	86.627.246.622,55	37.154.518.270,40	-274.036.624.121,60
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**19.957.547.870,90**	17.052.018.378,02	12.196.324.087,47	256.799.396,68
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	**8.250.829.938,00**	5.396.730.565,00	0	54.245.289.378,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	**5.700.000.000,00**	1.492.060.000,00	564.851.234,00	19.700.000.000,00
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	**17.570.520.514,00**	237.778.000,00	150.000,00	-17.570.520.514,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	**1.709.200.000,00**	342.228.000,00	87.712.200,00	790.800.000,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	**11.556.175.708,00**	1.449.631.955,00	381.089.728,00	-11.556.175.708,00
Program Pengembangan Permukiman	**450.000.000,00**	100.000.000,00	0	-450.000.000,00
Program Penataan Bangunan Gedung	**124.763.278.166,10**	15.260.769.613,00	3.947.187.573,93	-4.513.278.166,10
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	**5.535.000.000,00**	649.141.298,00	0	-5.535.000.000,00
Program Penyelenggaraan Jalan	**113.598.590.195,00**	44.344.217.400,03	19.977.203.447,00	26.401.409.805,00
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	**670.000.000,00**	160.000.000,00	0	-470.000.000,00

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	**1.430.000.000,00**	142.671.413,50	0	-730.000.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	**7.630.000.000,00**	37.720.817.840,00	1.014.297.639,00	-6.615.702.361,00
Program Pengembangan Perumahan	**200.000.000,00**	75.000.000,00	2.000.000,00	-200.000.000,00
Program Kawasan Permukiman	**7.070.000.000,00**	150.000.000,00	200.150.000,00	-7.070.000.000,00
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	**150.000.000,00**	0	0	-150.000.000,00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**550.000.000,00**	611.869.990,00	0	-550.000.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	**550.000.000,00**	611.869.990,00	0	-550.000.000,00
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	**15.000.000,00**	0	0	-15.000.000,00
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	**45.000.000,00**	500.051.990,00	0	-45.000.000,00
Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	**20.000.000,00**	0	0	-20.000.000,00
Program Pengelolaan Tanah Kosong	**260.000.000,00**	0	0	-260.000.000,00
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	**10.000.000,00**	0	0	-10.000.000,00
Program Penatagunaan Tanah	**200.000.000,00**	111.818.000,00	0	-200.000.000,00
Uptd Spam Siantan	**319.371.142.392,00**	124.959.934.452,55	38.168.815.909,40	-281.202.326.482,60

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**318.821.142.392,00**	124.348.064.462,55	38.168.815.909,40	-280.652.326.482,60
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**311.191.142.392,00**	86.627.246.622,55	37.154.518.270,40	-274.036.624.121,60
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**19.957.547.870,90**	17.052.018.378,02	12.196.324.087,47	256.799.396,68
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	**5.700.000.000,00**	1.492.060.000,00	564.851.234,00	19.700.000.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	**11.234.734.549,00**	9.222.111.540,00	7.541.370.790,73	-3.693.363.758,27
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**11.234.734.549,00**	9.222.111.540,00	7.541.370.790,73	-3.693.363.758,27
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	**11.234.734.549,00**	9.222.111.540,00	7.541.370.790,73	-3.693.363.758,27
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**10.401.851.645,00**	8.441.687.749,00	7.165.443.279,73	13.270.579.911,00
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	**832.882.904,00**	780.423.791,00	375.927.511,00	1.231.697.296,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**14.889.586.568,00**	12.427.198.553,00	9.571.333.728,00	-5.318.252.840,00

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**14.889.586.568,00**	12.427.198.553,00	9.571.333.728,00	-5.318.252.840,00
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	**14.889.586.568,00**	12.427.198.553,00	9.571.333.728,00	-5.318.252.840,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**13.551.446.272,00**	11.731.591.164,00	9.373.896.728,00	1.005.484.248,00
Program Penanggulangan Bencana	**1.338.140.296,00**	695.607.389,00	197.437.000,00	711.859.704,00
Satuan Polisi Pamong Praja	**13.065.556.448,00**	12.783.760.215,00	9.980.408.613,23	-3.085.147.834,77
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**13.065.556.448,00**	12.783.760.215,00	9.980.408.613,23	-3.085.147.834,77
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	**13.065.556.448,00**	12.783.760.215,00	9.980.408.613,23	-3.085.147.834,77
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**12.578.897.448,00**	12.483.563.876,00	9.936.343.563,23	4.277.081.353,00
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	**486.659.000,00**	300.196.339,00	44.065.050,00	4.313.341.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	**9.294.548.961,00**	7.542.236.186,00	6.612.601.662,00	-2.681.947.299,00
Unsur Pemerintahan Umum	**9.294.548.961,00**	7.542.236.186,00	6.612.601.662,00	-2.681.947.299,00
Kesatuan Bangsa Dan Politik	**9.294.548.961,00**	7.542.236.186,00	6.612.601.662,00	-2.681.947.299,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**5.354.548.961,00**	5.007.677.758,00	4.698.295.944,00	-5.354.548.961,00
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	**1.750.000.000,00**	1.403.983.449,00	1.060.190.012,00	-1.750.000.000,00
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	**840.000.000,00**	442.071.589,00	488.058.589,00	-840.000.000,00
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**100.000.000,00**	0	0	-100.000.000,00
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	**200.000.000,00**	259.891.870,00	39.467.870,00	-200.000.000,00
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	**1.050.000.000,00**	428.611.520,00	326.589.247,00	-1.050.000.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	**10.774.090.710,00**	7.511.657.058,00	6.594.451.680,18	-4.179.639.029,82
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**9.131.300.710,00**	6.485.967.058,00	5.754.238.124,18	-3.377.062.585,82
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	**9.131.300.710,00**	6.485.967.058,00	5.754.238.124,18	-3.377.062.585,82

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**7.695.090.710,00**	5.966.279.407,99	5.420.447.466,18	-190.732.313,00
Program Pemberdayaan Sosial	**300.000.000,00**	0	3.850.000,00	187.000.000,00
Program Rehabilitasi Sosial	**400.000.000,00**	180.245.458,00	138.029.658,00	10.045.000,00
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	**975.000.000,00**	289.687.650,01	191.860.000,00	286.135.845,00
Program Penanganan Bencana	**250.000.000,00**	49.754.542,00	51.000,00	1.000.000,00
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**250.000.000,00**	49.754.542,00	51.000,00	-249.949.000,00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**1.642.790.000,00**	1.025.690.000,00	840.213.556,00	-802.576.444,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	**1.642.790.000,00**	1.025.690.000,00	840.213.556,00	-802.576.444,00
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	**500.000.000,00**	50.000.000,00	299.999.556,00	-28.000.000,00
Program Perlindungan Perempuan	**153.000.000,00**	333.640.000,00	333.640.000,00	-141.000.000,00
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	**250.000.000,00**	370.000.000,00	4.322.000,00	400.000.000,00
Program Perlindungan Khusus Anak	**251.000.000,00**	272.050.000,00	202.252.000,00	4.000.000,00
Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak	**10.774.090.710,00**	7.511.657.058,00	6.594.451.680,18	-4.179.639.029,82

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**1.642.790.000,00**	1.025.690.000,00	840.213.556,00	-802.576.444,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	**1.642.790.000,00**	1.025.690.000,00	840.213.556,00	-802.576.444,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**7.695.090.710,00**	5.966.279.407,99	5.420.447.466,18	-190.732.313,00
Program Perlindungan Perempuan	**153.000.000,00**	333.640.000,00	333.640.000,00	-141.000.000,00
Program Perlindungan Khusus Anak	**251.000.000,00**	272.050.000,00	202.252.000,00	4.000.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	**10.545.546.416,00**	10.811.094.828,00	8.442.567.727,15	-2.102.978.688,85
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**10.545.546.416,00**	10.811.094.828,00	8.442.567.727,15	-2.102.978.688,85
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	**10.545.546.416,00**	10.811.094.828,00	8.442.567.727,15	-2.102.978.688,85
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**9.378.992.866,00**	9.958.899.478,00	8.269.918.663,15	250.153.418,00
Program Pendaftaran Penduduk	**557.328.550,00**	458.103.950,00	109.298.064,00	38.484.569,00
Program Pencatatan Sipil	**236.000.000,00**	150.000.000,00	24.014.000,00	197.128.100,00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**301.687.000,00**	175.105.000,00	25.201.800,00	-121.000.000,00

Program Pengelolaan Profil Kependudukan	**71.538.000,00**	68.986.400,00	14.135.200,00	0
Penyusunan Profil Kependudukan	**71.538.000,00**	68.986.400,00	14.135.200,00	-57.402.800,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	**8.164.914.840,00**	5.670.382.123,00	5.144.521.811,70	-3.020.393.028,30
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**8.164.914.840,00**	5.670.382.123,00	5.144.521.811,70	-3.020.393.028,30
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	**8.164.914.840,00**	5.670.382.123,00	5.144.521.811,70	-3.020.393.028,30
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**4.014.914.840,00**	3.509.106.205,00	3.307.680.893,70	884.676.970,00
Program Penataan Desa	**700.000.000,00**	363.168.733,00	292.321.733,00	150.000.000,00
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	**250.000.000,00**	0	0	150.000.000,00
Program Administrasi Pemerintahan Desa	**2.100.000.000,00**	1.255.534.400,00	1.100.076.400,00	700.000.000,00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	**1.100.000.000,00**	542.572.785,00	444.442.785,00	500.000.000,00
Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup	**49.101.996.070,00**	30.892.292.073,05	13.832.656.622,13	-35.269.339.447,87
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**49.101.996.070,00**	30.892.292.073,05	13.832.656.622,13	-35.269.339.447,87

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	**1.436.282.266,00**	1.616.012.072,85	326.608.398,95	-1.109.673.867,05
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**150.000.000,00**	46.412.000,00	14.747.400,00	0
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	**5.000.000,00**	57.151.490,70	15.931.418,95	95.000.000,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	**175.000.000,00**	60.975.080,00	18.960.900,00	-25.000.000,00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	**5.000.000,00**	180.620.025,15	18.457.492,00	145.000.000,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	**200.000.000,00**	0	0	0
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	**100.000.000,00**	0	0	100.000.000,00
Program Pengelolaan Persampahan	**323.941.466,00**	338.588.000,00	4.634.000,00	131.058.534,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	**47.665.713.804,00**	29.276.280.000,20	13.506.048.223,18	-34.159.665.580,82
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**15.668.406.999,00**	15.526.526.070,00	11.446.397.723,17	-447.587.864,00

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	**2.400.000.000,00**	260.000.000,00	275.415.324,01	-600.000.000,00
Program Pengelolaan Pelayaran	**30.074.647.605,00**	14.422.019.407,20	2.038.112.364,00	30.452.000.000,00
Upt Pengelolaan Transportasi	**49.101.996.070,00**	30.892.292.073,05	13.832.656.622,13	-35.269.339.447,87
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**49.101.996.070,00**	30.892.292.073,05	13.832.656.622,13	-35.269.339.447,87
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	**47.665.713.804,00**	29.276.280.000,20	13.506.048.223,18	-34.159.665.580,82
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**15.668.406.999,00**	15.526.526.070,00	11.446.397.723,17	-447.587.864,00
Upt Pengelolaan Sampah	**49.101.996.070,00**	30.892.292.073,05	13.832.656.622,13	-35.269.339.447,87
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**49.101.996.070,00**	30.892.292.073,05	13.832.656.622,13	-35.269.339.447,87
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	**1.436.282.266,00**	1.616.012.072,85	326.608.398,95	-1.109.673.867,05
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**15.668.406.999,00**	15.526.526.070,00	11.446.397.723,17	-447.587.864,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	**29.112.820.349,00**	15.017.934.180,23	11.588.145.291,12	-17.524.675.057,88
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**29.112.820.349,00**	15.017.934.180,23	11.588.145.291,12	-17.524.675.057,88
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	**28.279.070.349,00**	14.633.370.284,23	11.517.740.487,02	-16.761.329.861,98

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**6.341.421.205,00**	6.518.162.508,24	5.730.424.737,40	-4.546.597.779,00
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	**3.827.612.230,00**	4.044.836.938,64	2.893.957.300,13	382.733.284,00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**18.110.036.914,00**	4.070.370.837,35	2.893.358.449,49	-14.479.116.309,00
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	**80.750.000,00**	188.132.000,00	5.701.994,50	-75.048.005,50
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**80.750.000,00**	188.132.000,00	5.701.994,50	8.075.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	**753.000.000,00**	196.431.896,00	64.702.809,60	-688.297.190,40
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	**753.000.000,00**	196.431.896,00	64.702.809,60	-584.700.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	**13.051.702.128,00**	12.632.379.782,81	8.137.035.806,66	-4.914.666.321,34
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**12.078.239.061,00**	11.541.105.345,04	7.350.429.307,49	-4.727.809.753,51
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	**1.778.550.000,00**	1.411.100.420,37	714.870.000,00	-1.063.680.000,00
Program Perencanaan Tenaga Kerja	**1.100.000,00**	0	0	-1.100.000,00
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	**1.400.000,00**	66.070.000,00	0	48.600.000,00

Program Penempatan Tenaga Kerja	**11.700.000,00**	6.730.000,00	0	298.738.172,00
Program Hubungan Industrial	**1.764.350.000,00**	1.338.300.420,37	714.870.000,00	205.650.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	**10.299.689.061,00**	10.130.004.924,67	6.635.559.307,49	-3.664.129.753,51
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**9.732.639.061,00**	9.291.221.481,67	6.527.544.413,49	2.308.877.368,00
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	**850.000,00**	0	0	-850.000,00
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	**46.200.000,00**	39.307.500,00	6.450.000,00	274.750.747,00
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	**10.000.000,00**	49.781.000,00	0	138.131.114,00
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	**99.000.000,00**	226.061.968,00	20.041.824,00	51.000.000,00
Program Pengembangan Umkm	**415.000.000,00**	527.632.975,00	83.642.574,00	10.000.000,00
Urusan Pemerintahan Pilihan	**973.463.067,00**	1.091.274.437,77	786.606.499,17	-186.856.567,83
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	**361.463.067,00**	562.498.845,00	84.888.654,80	-276.574.412,20
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	**115.000.000,00**	16.326.860,00	784.215,00	20.000.000,00
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	**20.000.000,00**	359.731.418,00	63.744.935,80	180.000.000,00
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	**156.100.000,00**	87.077.500,00	3.800.000,00	-36.100.000,00

Program Pengembangan Ekspor	**10.000.000,00**	0	0	-10.000.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	**599.000.000,00**	528.775.592,77	701.717.844,37	102.717.844,37
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	**579.000.000,00**	466.648.092,77	701.717.844,37	-129.000.000,00
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	**10.000.000,00**	0	0	-10.000.000,00
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	**10.000.000,00**	62.127.500,00	0	47.963.704,00
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	**13.000.000,00**	0	0	-13.000.000,00
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	**13.000.000,00**	0	0	-13.000.000,00
Upt Pengelolaan Dana Bergulir	**13.051.702.128,00**	12.632.379.782,81	8.137.035.806,66	-4.914.666.321,34
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**12.078.239.061,00**	11.541.105.345,04	7.350.429.307,49	-4.727.809.753,51
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	**10.299.689.061,00**	10.130.004.924,67	6.635.559.307,49	-3.664.129.753,51
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**9.732.639.061,00**	9.291.221.481,67	6.527.544.413,49	2.308.877.368,00
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	**99.000.000,00**	226.061.968,00	20.041.824,00	51.000.000,00
Upt Metrologi Legal	**13.051.702.128,00**	12.632.379.782,81	8.137.035.806,66	-4.914.666.321,34
Urusan Pemerintahan Pilihan	**973.463.067,00**	1.091.274.437,77	786.606.499,17	-186.856.567,83

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	**361.463.067,00**	562.498.845,00	84.888.654,80	-276.574.412,20
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**9.732.639.061,00**	9.291.221.481,67	6.527.544.413,49	2.308.877.368,00
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	**56.363.067,00**	95.363.067,00	14.440.000,00	88.636.933,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**5.717.879.676,00**	5.760.080.421,00	4.598.993.625,08	-1.118.886.050,92
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**5.717.879.676,00**	5.760.080.421,00	4.598.993.625,08	-1.118.886.050,92
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	**5.717.879.676,00**	5.760.080.421,00	4.598.993.625,08	-1.118.886.050,92
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**5.027.577.676,00**	4.930.542.864,00	4.374.386.625,08	2.228.768.672,00
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**3.700.000,00**	168.381.500,00	0	246.300.000,00
Program Promosi Penanaman Modal	**250.000.000,00**	204.762.057,00	0	25.000.000,00
Program Pelayanan Penanaman Modal	**431.602.000,00**	422.454.000,00	224.607.000,00	259.304.000,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**3.000.000,00**	33.940.000,00	0	112.838.000,00
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	**2.000.000,00**	0	0	-2.000.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	**3.980.316.003,00**	4.789.954.070,00	3.985.368.301,79	5.052.298,79

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**3.980.316.003,00**	4.789.954.070,00	3.985.368.301,79	5.052.298,79
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	**3.820.148.729,00**	4.628.326.909,00	3.904.417.305,79	84.268.576,79
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**3.032.724.669,00**	3.523.766.828,00	3.694.811.233,79	-381.179.702,00
Non Urusan	**3.980.316.003,00**	4.789.954.070,00	3.985.368.301,79	5.052.298,79
Urusan Pemerintahan Bidang Xx	**3.820.148.729,00**	4.628.326.909,00	3.904.417.305,79	84.268.576,79
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**3.980.316.003,00**	4.789.954.070,00	3.985.368.301,79	5.052.298,79
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	**3.820.148.729,00**	4.628.326.909,00	3.904.417.305,79	84.268.576,79
Program Pembinaan Perpustakaan	**787.424.060,00**	1.104.560.081,00	209.606.072,00	-245.133.470,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	**160.167.274,00**	161.627.161,00	80.950.996,00	-79.216.278,00
Program Pengelolaan Arsip	**160.167.274,00**	161.627.161,00	80.950.996,00	0
Dinas Perikanan, Pertanian Dan Pangan	**21.448.632.327,00**	22.922.919.100,00	12.585.993.889,29	-8.862.638.437,71
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**225.000.000,00**	208.393.531,00	3.581.000,00	-221.419.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	**225.000.000,00**	208.393.531,00	3.581.000,00	-221.419.000,00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**74.911.100,00**	80.265.700,00	3.179.500,00	25.088.900,00

Program Penanganan Kerawanan Pangan	**122.574.400,00**	113.567.931,00	1.500,00	27.425.600,00
Program Pengawasan Keamanan Pangan	**27.514.500,00**	14.559.900,00	400.000,00	22.485.500,00
Urusan Pemerintahan Pilihan	**21.223.632.327,00**	22.714.525.569,00	12.582.412.889,29	-8.641.219.437,71
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	**20.077.637.043,00**	21.457.166.655,00	12.495.679.009,29	-7.581.958.033,71
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**14.024.902.843,00**	14.632.032.455,00	12.379.811.509,29	241.951.921,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	**1.145.995.284,00**	1.257.358.914,00	86.733.880,00	-1.059.261.404,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	**448.995.284,00**	551.358.914,00	35.927.880,00	1.004.716,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**626.000.000,00**	435.000.000,00	3.000,00	14.000.000,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	**30.000.000,00**	230.000.000,00	25.001.500,00	370.000.000,00
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**26.000.000,00**	26.000.000,00	1.500,00	4.000.000,00
Program Penyuluhan Pertanian	**15.000.000,00**	15.000.000,00	25.800.000,00	23.550.000,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	**9.181.705.858,00**	7.884.335.482,00	5.534.974.687,00	-3.646.731.171,00

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**1.595.000.000,00**	865.716.680,00	56.850.000,00	-1.538.150.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	**1.595.000.000,00**	865.716.680,00	56.850.000,00	-1.538.150.000,00
Program Pengembangan Kebudayaan	**400.000.000,00**	512.450.000,00	55.850.000,00	-50.000.000,00
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	**1.095.000.000,00**	253.266.680,00	0	-1.065.000.000,00
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	**100.000.000,00**	100.000.000,00	1.000.000,00	50.000.000,00
Urusan Pemerintahan Pilihan	**7.586.705.858,00**	7.018.618.802,00	5.478.124.687,00	-2.108.581.171,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	**7.586.705.858,00**	7.018.618.802,00	5.478.124.687,00	-2.108.581.171,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**5.961.705.858,00**	5.984.786.726,00	5.071.596.377,00	-149.985.858,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	**450.000.000,00**	396.257.254,00	350.387.753,00	220.000.000,00
Program Pemasaran Pariwisata	**1.150.000.000,00**	637.574.822,00	56.140.557,00	-1.030.000.000,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	**25.000.000,00**	0	0	-25.000.000,00
Sekretariat Daerah	**53.010.733.386,00**	50.138.344.095,00	43.105.730.216,63	-9.905.003.169,37
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	**53.010.733.386,00**	50.138.344.095,00	43.105.730.216,63	-9.905.003.169,37
Sekretariat Daerah	**53.010.733.386,00**	50.138.344.095,00	43.105.730.216,63	-9.905.003.169,37

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**41.825.768.291,00**	37.879.202.301,07	35.780.363.795,70	-20.101.228.494,00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	**9.333.793.054,00**	9.659.091.118,93	6.179.964.216,93	-9.028.024.130,00
Program Perekonomian Dan Pembangunan	**1.851.172.041,00**	2.600.050.675,00	1.145.402.204,00	-1.851.172.041,00
Sekretariat Dprd	**38.950.697.025,00**	35.974.533.197,00	24.791.407.561,00	-14.159.289.464,00
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	**38.950.697.025,00**	35.974.533.197,00	24.791.407.561,00	-14.159.289.464,00
Sekretariat Dprd	**38.950.697.025,00**	35.974.533.197,00	24.791.407.561,00	-14.159.289.464,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**22.068.970.304,00**	20.375.898.010,00	18.445.156.512,00	28.045.000,00
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	**16.881.726.721,00**	15.598.635.187,00	6.346.251.049,00	1.187.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**15.686.795.791,00**	16.538.327.502,25	10.981.679.037,60	-4.705.116.753,40
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	**15.686.795.791,00**	16.538.327.502,25	10.981.679.037,60	-4.705.116.753,40
Perencanaan	**14.966.795.791,00**	14.729.212.889,25	10.981.479.037,60	-3.985.316.753,40
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**12.492.124.096,00**	11.540.982.054,12	8.255.118.451,20	1.661.864.174,00
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**1.518.491.185,00**	2.371.867.200,00	2.552.513.326,40	-96.635.285,00

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**956.180.510,00**	816.363.635,13	173.847.260,00	521.760.741,00
Penelitian Dan Pengembangan	**720.000.000,00**	1.809.114.613,00	200.000,00	-719.800.000,00
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	**720.000.000,00**	1.809.114.613,00	200.000,00	-220.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	**181.018.395.343,00**	145.343.397.673,51	131.258.840.343,21	-49.759.554.999,79
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	**181.018.395.343,00**	145.343.397.673,51	131.258.840.343,21	-49.759.554.999,79
Keuangan	**181.018.395.343,00**	145.343.397.673,51	131.258.840.343,21	-49.759.554.999,79
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**23.869.169.220,00**	23.845.144.851,99	13.885.389.346,57	-6.927.977.848,00
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**151.712.521.623,00**	119.099.484.722,52	116.737.616.037,83	-46.676.944.882,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**4.744.407.800,00**	1.814.301.440,00	315.124.900,81	-2.074.407.800,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**692.296.700,00**	584.466.659,00	320.710.058,00	993.631.550,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**43.496.285.849,00**	9.664.383.006,00	7.575.023.467,11	-35.921.262.381,89
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	**43.496.285.849,00**	9.664.383.006,00	7.575.023.467,11	-35.921.262.381,89
Kepegawaian	**41.288.771.649,00**	8.720.007.194,00	7.540.069.889,11	-33.748.701.759,89
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**38.875.874.762,00**	7.393.121.722,00	6.543.627.684,11	-29.972.951.961,00

Program Kepegawaian Daerah	**2.412.896.887,00**	1.326.885.472,00	996.442.205,00	2.569.323.449,00
Pendidikan Dan Pelatihan	**2.207.514.200,00**	944.375.812,00	34.953.578,00	-2.172.560.622,00
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	**2.207.514.200,00**	944.375.812,00	34.953.578,00	1.478.225.910,00
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional	**2.207.514.200,00**	944.375.812,00	34.953.578,00	-2.172.560.622,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	**4.055.698.085,00**	4.262.734.981,00	3.436.173.416,31	-619.524.668,69
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	**4.055.698.085,00**	4.262.734.981,00	3.436.173.416,31	-619.524.668,69
Pengelolaan Perbatasan	**4.055.698.085,00**	4.262.734.981,00	3.436.173.416,31	-619.524.668,69
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**3.759.782.443,00**	3.964.678.356,00	3.359.742.116,31	2.092.246.894,00
Program Pengelolaan Perbatasan	**295.915.642,00**	298.056.625,00	76.431.300,00	155.371.858,00
Inspektorat Daerah	**21.628.867.075,00**	15.337.001.351,00	12.388.366.387,76	-9.240.500.687,24
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	**21.628.867.075,00**	15.337.001.351,00	12.388.366.387,76	-9.240.500.687,24
Inspektorat Daerah	**21.628.867.075,00**	15.337.001.351,00	12.388.366.387,76	-9.240.500.687,24
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**17.902.957.313,00**	11.852.864.184,87	11.347.657.262,49	-2.404.557.311,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan	**2.282.500.152,00**	2.222.269.634,13	635.101.575,01	-882.500.152,00
	1.443.409.610,00	1.261.867.532,00	405.607.550,26	-153.409.610,00

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				
Kecamatan Siantan	**7.860.325.469,00**	8.257.579.031,00	4.976.249.577,41	-2.884.075.891,59
Unsur Kewilayahan	**7.860.325.469,00**	8.257.579.031,00	4.976.249.577,41	-2.884.075.891,59
Kecamatan	**7.860.325.469,00**	8.257.579.031,00	4.976.249.577,41	-2.884.075.891,59
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**4.034.569.321,00**	4.678.237.545,00	4.203.313.854,41	1.592.521.712,60
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**3.644.945.037,00**	3.433.203.333,00	724.753.723,00	-2.022.641.578,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**55.614.088,00**	55.614.088,00	13.827.000,00	-37.011.088,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**125.197.023,00**	90.524.065,00	34.355.000,00	-43.352.368,00
Kelurahan Tarempa	**7.860.325.469,00**	8.257.579.031,00	4.976.249.577,41	-2.884.075.891,59
Unsur Kewilayahan	**7.860.325.469,00**	8.257.579.031,00	4.976.249.577,41	-2.884.075.891,59
Kecamatan	**7.860.325.469,00**	8.257.579.031,00	4.976.249.577,41	-2.884.075.891,59
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**4.034.569.321,00**	4.678.237.545,00	4.203.313.854,41	1.592.521.712,60
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**3.644.945.037,00**	3.433.203.333,00	724.753.723,00	-2.022.641.578,00
Kecamatan Jemaja	**7.307.344.032,00**	7.069.987.444,00	5.750.494.836,80	-1.556.849.195,20
Unsur Kewilayahan	**7.307.344.032,00**	7.069.987.444,00	5.750.494.836,80	-1.556.849.195,20

Kecamatan	**7.307.344.032,00**	7.069.987.444,00	5.750.494.836,80	-1.556.849.195,20
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**5.512.901.832,00**	5.518.161.572,00	4.974.443.437,80	318.354.691,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**252.000.000,00**	52.000.000,00	2.000.000,00	-213.000.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**1.419.474.700,00**	1.366.493.472,00	742.858.999,00	-315.502.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**8.084.500,00**	1.250.000,00	0	-8.084.500,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**48.363.000,00**	61.812.400,00	31.092.400,00	24.000.000,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**66.520.000,00**	70.270.000,00	100.000,00	21.000.000,00
Kelurahan Letung	**7.307.344.032,00**	7.069.987.444,00	5.750.494.836,80	-1.556.849.195,20
Unsur Kewilayahan	**7.307.344.032,00**	7.069.987.444,00	5.750.494.836,80	-1.556.849.195,20
Kecamatan	**7.307.344.032,00**	7.069.987.444,00	5.750.494.836,80	-1.556.849.195,20
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**5.512.901.832,00**	5.518.161.572,00	4.974.443.437,80	318.354.691,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**1.419.474.700,00**	1.366.493.472,00	742.858.999,00	-315.502.000,00
Kecamatan Palmatak	**5.571.567.194,00**	5.800.958.785,00	4.278.725.103,11	-1.292.842.090,89
Unsur Kewilayahan	**5.571.567.194,00**	5.800.958.785,00	4.278.725.103,11	-1.292.842.090,89

Kecamatan	**5.571.567.194,00**	5.800.958.785,00	4.278.725.103,11	-1.292.842.090,89
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**4.301.144.849,00**	4.894.531.127,00	4.197.025.422,11	351.094.381,00
Non Urusan	**5.571.567.194,00**	5.800.958.785,00	4.278.725.103,11	-1.292.842.090,89
Urusan Pemerintahan Bidang Xx	**5.571.567.194,00**	5.800.958.785,00	4.278.725.103,11	-1.292.842.090,89
Unsur Kewilayahan	**5.571.567.194,00**	5.800.958.785,00	4.278.725.103,11	-1.292.842.090,89
Kecamatan	**5.571.567.194,00**	5.800.958.785,00	4.278.725.103,11	-1.292.842.090,89
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**300.000.000,00**	0	0	30.000.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**587.284.270,00**	655.776.154,00	38.632.000,00	-237.271.573,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**265.297.075,00**	195.125.504,00	37.043.681,00	17.429.707,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**117.841.000,00**	55.526.000,00	6.024.000,00	11.784.100,00
Kecamatan Siantan Timur	**3.851.777.086,00**	3.601.777.086,00	2.163.272.086,93	-1.688.504.999,07
Unsur Kewilayahan	**3.851.777.086,00**	3.601.777.086,00	2.163.272.086,93	-1.688.504.999,07
Kecamatan	**3.851.777.086,00**	3.601.777.086,00	2.163.272.086,93	-1.688.504.999,07
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**2.675.887.881,00**	2.727.089.761,99	2.009.607.973,93	-422.382.346,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**500.000.000,00**	581.279.376,01	45.251.520,00	50.000.000,00

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**515.023.194,00**	181.333.828,00	73.073.473,00	110.000.000,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**160.866.011,00**	112.074.120,00	35.339.120,00	68.830.389,00
Kecamatan Siantan Selatan	**3.397.684.073,00**	3.147.684.073,00	2.501.307.217,91	-896.376.855,09
Unsur Kewilayahan	**3.397.684.073,00**	3.147.684.073,00	2.501.307.217,91	-896.376.855,09
Kecamatan	**3.397.684.073,00**	3.147.684.073,00	2.501.307.217,91	-896.376.855,09
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**2.592.684.073,00**	2.474.258.801,00	2.441.572.277,91	731.276.837,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**370.000.000,00**	386.655.896,00	31.391.900,00	-70.000.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**195.000.000,00**	180.230.256,00	19.881.900,00	25.000.000,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**240.000.000,00**	106.539.120,00	8.461.140,00	-135.000.000,00
Kecamatan Jemaja Timur	**3.936.897.306,00**	3.686.897.306,00	2.752.855.036,71	-1.184.042.269,29
Unsur Kewilayahan	**3.936.897.306,00**	3.686.897.306,00	2.752.855.036,71	-1.184.042.269,29
Kecamatan	**3.936.897.306,00**	3.686.897.306,00	2.752.855.036,71	-1.184.042.269,29
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**3.152.166.506,00**	3.214.156.518,68	2.671.261.828,00	31.300.000,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**300.000.000,00**	50.000.000,00	0	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**265.515.400,00**	226.877.837,32	21.818.208,71	-100.000.000,00

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**37.600.000,00**	37.600.000,00	0	0
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**151.500.000,00**	142.147.550,00	59.775.000,00	-100.000.000,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**30.115.400,00**	16.115.400,00	0	0
Kecamatan Siantan Tengah	**4.037.858.600,00**	3.837.858.600,00	2.849.329.935,88	-1.188.528.664,12
Unsur Kewilayahan	**4.037.858.600,00**	3.837.858.600,00	2.849.329.935,88	-1.188.528.664,12
Kecamatan	**4.037.858.600,00**	3.837.858.600,00	2.849.329.935,88	-1.188.528.664,12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**3.211.382.100,00**	3.286.029.368,00	2.743.177.410,88	75.000.000,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**219.950.000,00**	21.050.000,00	0	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**350.000.000,00**	340.225.000,00	106.152.525,00	0
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**35.000.000,00**	12.252.000,00	0	0
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**155.000.000,00**	113.913.282,00	0	5.000.000,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**66.526.500,00**	64.388.950,00	0	0
Kecamatan Siantan Utara	**3.528.527.209,00**	3.278.527.209,00	2.337.489.852,05	-1.191.037.356,95
Unsur Kewilayahan	**3.528.527.209,00**	3.278.527.209,00	2.337.489.852,05	-1.191.037.356,95

Kecamatan	**3.528.527.209,00**	3.278.527.209,00	2.337.489.852,05	-1.191.037.356,95
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**2.398.793.854,00**	2.785.825.156,12	2.280.530.382,05	421.206.146,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**303.110.000,00**	0	0	-298.110.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**578.249.500,00**	387.473.275,88	26.750.000,00	-378.249.500,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**154.114.855,00**	92.878.777,00	30.209.470,00	20.885.145,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**94.259.000,00**	12.350.000,00	0	40.741.000,00
Kecamatan Jemaja Barat	**3.436.048.862,00**	3.236.048.862,00	2.096.520.790,63	-1.339.528.071,37
Unsur Kewilayahan	**3.436.048.862,00**	3.236.048.862,00	2.096.520.790,63	-1.339.528.071,37
Kecamatan	**3.436.048.862,00**	3.236.048.862,00	2.096.520.790,63	-1.339.528.071,37
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**2.689.698.862,00**	2.848.237.931,00	2.004.598.294,63	-2.450.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**513.000.000,00**	237.817.751,00	56.318.496,00	0
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**195.850.000,00**	114.630.000,00	31.404.000,00	-10.000.000,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**37.500.000,00**	35.363.180,00	4.200.000,00	-10.000.000,00
Kecamatan Kute Siantan	**4.878.364.930,00**	4.338.813.736,00	3.546.215.925,08	-1.332.149.004,92

Unsur Kewilayahan	**4.878.364.930,00**	4.338.813.736,00	3.546.215.925,08	-1.332.149.004,92
Kecamatan	**4.878.364.930,00**	4.338.813.736,00	3.546.215.925,08	-1.332.149.004,92
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**3.896.331.460,00**	3.898.121.240,00	3.344.119.186,86	0
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**135.182.400,00**	0	0	-135.182.400,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**530.286.616,00**	192.403.096,00	46.115.200,00	0
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**123.234.500,00**	65.322.000,00	30.018.100,00	0
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**117.232.854,00**	116.528.000,00	87.196.000,00	0
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**76.097.100,00**	66.439.400,00	38.767.438,22	-5.708.200,00
	1.395.871.930.542,00	1.040.859.314.973,00	847.118.199.810,74	-548.753.730.731,26

5.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Adapun yang menjadi Indikator Utama dan Indikator Kinerja daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel V- 3
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,43	74,81	75,19	75,57	75,94	76,32	
2	Indeks Pendidikan	Indeks	68,96	70,85	72,83	74,89	76,95	78,93	
3	Indeks Kesehatan	Indeks	74,48	74,34	75,54	75,88	76,38	76,83	
4	Indeks Pengembangan Kebudayaan	Indeks	53,7	55	56,3	57,6	58,9	60,1	
5	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	
6	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	90	90,2	90,4	90,6	90,8	90,99	
7	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	5,1*	5,2*	5,3*	5,4*	5,5*	5,55*	
8	IDSD pilar infrastruktur	Indeks	2,57	2,91	3,25	3,59	3,93	4,27	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	84,52	84,89	85,27	85,64	86,02	86,39	
10	Indeks Risiko Bencana	Indeks	84,37	83,65	82,93	82,22	81,5	80,78	
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (74,57)	BB (74,90)	BB (75,17)	BB (75,48)	BB (75,77)	BB (76)	
12	Nilai SAKIP	angka	B (63,66)	B (65,34)	B (67,05)	B (68,72)	BB (70,46)	BB (71,86)	
13	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	73,48	73,87	74,13	74,46	74,42	75,00	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,2	4,25	4,3	4,35	4,4	4,5	
15	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	41,5	41,8	42,1	42,3	42,5	42,8	
16	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,26	3,56	3,86	4,16	4,46	4,76	
17	Kontribusi Perikanan terhadap PDRB (%)	%	4,64	4,91	5,19	5,46	5,74	6,01	
18	Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	%	0,2	0,35	0,59	0,84	1,08	1,32	
19	Rasio PDRB industri pengolahan	%	0,17	0,18	0,2	0,21	0,22	0,24	
20	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	24,52	24,99	25,46	25,93	26,4	26,87	
21	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	2,19	2,16	2,13	2,09	2,06	2,02	
22	Tingkat Kemiskinan	%	6,65-5,75	6,37-5,49	6,08-5,23	5,80-4,98	5,52-4,72	5,24-4,46	
23	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,94	0,91	0,88	0,85	0,82	0,79	
24	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,18	0,172	0,15	0,123	0,093	0,059	
25	Indeks Desa	Indeks	0,7087	0,7277	0,7467	0,7657	0,7847	0,8037	

Tabel V- 4
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	55,34	55,4	55,51	55,65	55,72	55,83	55,91	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	9,04	9,04	9,75	10,75	11,75	12,75	13,75	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (IUP RPJPD)
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	790,94	702,29	733,4	764,51	795,61	826,72	857,83	BPS (IUP RPJPD)
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Layak	%	24,65	25,73	26,82	27,9	28,99	30,07	31,16	BPS
5	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih dan akses air minum layak	%	58,98	70,92	72,72	74,53	76,34	76,94	78,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (IUP RPJPD)
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	80,61	84,52	84,89	85,27	85,64	86,02	86,39	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (IUP RPJPD)
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%RT	6,45	6,45	12,3	18,14	23,99	29,84	35,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

										Permukiman (IUP RPJPD)
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg	9,13	14,77	17,53	20,28	23,03	25,78	28,53	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (IUP RPJPD)
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%RT	55,96	56,08	58,83	61,57	64,32	67,06	69,81	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (IUP RPJPD)
10	Kapasitas Air Baku	m^3/detik	0,068	0,070	0,071	0,072	0,074	0,074	0,075	IUP RPJPD
11	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	61,56	61,57	62,06	65,13	68,21	69,23	71,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (IUP RPJPD)
12	Persentase penurunan emisi GRK (Kumulatif)	%	0,03	0,04	0,09	0,14	0,198	0,25	0,29	IUP RPJPD/PROV
13	Persentase penurunan emisi GRK (Tahunan)	%	0,09	0,1	0,12	0,14	0,17	0,19	0,22	IUP RPJPD/PROV

14	Indeks Risiko Bencana	poin	90,50	84,37	83,65	82,93	82,22	81,5	80,78	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
15	Indeks Kapasitas Daerah	poin	0,38	0,39	0,42	0,45	0,5	0,55	0,6	BPBD
16	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,34	1,30	1,26	1,22	1,18	1,14	1,10	BPS
17	Rasio Penduduk terhadap Jenis kelamin	%	107,1	107	107	107	107	107	107	BPS
18	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	80,31	80,29	80,27	80,25	80,23	80,21	80,19	BPS
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**	II		II		II		II		II
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Dengan Migas)	%	-5,67	0,91-1,21	1,08-1,43	1,25-1,66	1,42-1,88	1,59-2,11	1,76-2,33	BPS

2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Tanpa Migas)	%	4,58	3,26	3,56	3,86	4,16	4,46	4,76	BPS
3	Tingkat Kemiskinan	%	6,67	6,65-5,75	6,37-5,49	6,08-5,23	5,80-4,98	5,52-4,72	5,24-4,46	BPS (IUP RPJPD)
4	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp Juta	362,07	395,98	399,49	403,00	406,51	410,02	413,53	BPS
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,38	2,19	2,16	2,13	2,09	2,06	2,02	BPS (IUP RPJPD)
6	Indeks Gini	angka	0,296	0,290	0,283	0,277	0,270	0,264	0,258	BPS
7	Indeks Pembangunan Manusia	angka	73,47	74,43	74,81	75,19	75,57	75,94	76,32	BPS
8	Usia Harapan Hidup	tahun	68,37	68,84	69,3	69,77	70,23	70,69	71,15	BPS (IUP RPJPD)

9	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,082	0,101	0,124	0,152	0,187	0,229	0,282	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Prevalensi Stunting	%	15,8	13,3	12,5	12,3	11,8	11,3	11,0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (IUP RPJPD)
11	Angka Kematian Ibu	kasus	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (IUP RPJPD)
12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	49,38	55,48	58,44	61,40	64,37	65,36	67,33	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (IUP RPJPD)
13	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	74,73	78,5	79,87	81,23	82,59	83,05	84,05	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (IUP RPJPD)

14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	92,23	98,74	98,80	98,85	98,91	98,93	98,97	BPJS Kesehatan (IUP RPJPD)
15	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,21	7,62	8,01	8,4	8,8	9,19	9,59	BPS (IUP RPJPD)
16	Harapan Lama Sekolah	tahun	11,82	13,2	13,3	13,39	13,49	13,59	13,68	BPS (IUP RPJPD)
	Angka Literasi Membaca									
17	SD	%	**17**	SD	%	**17**	SD	%	**17**	Dinas Pendidikan Pemuda dan
18	SMP	%	**18**	SMP	%	**18**	SMP	%	**18**	Olahraga (IUP RPJPD)
	Angka Numerasi									Dinas Pendidikan Pemuda dan

19	SD	%	**19**	SD	%	**19**	SD	%	**19**	Olahraga (IUP RPJPD)
20	SMP	%	**20**	SMP	%	**20**	SMP	%	**20**	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (IUP RPJPD)
21	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 5-6 Tahun	%	85,83	88,8	91,77	94,31	96,86	99,41	100,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (IUP RPJPD)
22	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	%	15,32	16,2	18,23	20,27	22,31	22,98	24,52	BPS (IUP RPJPD)
23	Persentase penduduk berumur 5 Tahun ke-atas yang mengakses internet	%	73,78	78,43	79,14	79,86	80,58	80,82	81,30	BPS (IUP RPJPD)
24	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	92,9	60,5	65,25	68,30	70,50	73,65	75,00	DISPUSIPDA
25	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	96,1	96,40	96,00	97,00	97,05	97,08	97,09	BPJS Ketenagakerjaan (IUP RPJPD)

26	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Skor	90	90	90,2	90,4	90,6	90,8	90,99	Kementerian Agama (IUP RPJPD)
	Indeks Pembangunan Kebudayaan									
27	a. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	%	0	4,35	8,26	1,22	1,61	17,39	20,87	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (IUP RPJPD)
28	b. Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	%	16,67	25	31,6	38,2	44,8	47	49,2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (IUP RPJPD)
29	Indeks Perlindungan Anak	angka	60,05	60,5	61,2	61,8	62,3	62,8	63	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	57,01	57,3	58,26	59,22	60,18	60,5	61,14	IUP RPJPD
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									

1	Angka Ketergantungan	%	47,93	48,30	48,68	49,06	49,44	49,82	50,21	BPS
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	0,15	0,17	0,18	0,2	0,21	0,22	0,24	BPS (IUP RPJPD)
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,12	0,2	0,35	0,59	0,84	1,08	1,32	BPS (IUP RPJPD)
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	BPS
5	Rasio Kewirausahaan	%	4,46	4,88	5,15	5,42	5,68	5,95	6,22	DATA BPS
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	53,67	54,56	55,45	56,34	57,23	58,12	59,01	BPS (IUP RPJPD)
7	Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah	Skor	0,86	2,22	2,33	2,44	2,55	2,66	2,77	BRIN (IUP RPJPD)

8	Indeks Inovasi Daerah	Skor	41,36	41,5	41,8	42,1	42,3	42,5	42,8	BRIN
9	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	101,76	106,24	107,41	108,58	109,75	110,92	112,09	BPS (IUP RPJPD)
10	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	104,49	107,68	109,27	110,87	112,46	114,05	115,65	BPS (IUP RPJPD)
11	Rasio PDRB Perikanan	Nilai	4,36	4,64	4,91	5,19	5,46	5,74	6,01	BPS (IUP RPJPD)
12	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	ribu orang	2,13	2,26	2,82	3,38	3,95	4,14	4,61	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (IUP RPJPD)
13	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level kabupaten (%)	%	3,15	3,28	3,38	3,48	3,58	3,61	3,71	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (IUP RPJPD)
14	proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten (%)	%	99,91	99,92	99,92	99,93	99,93	99,93	99,94	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (IUP RPJPD)

15	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	0,059	0,1517	0,3653225	0,578945	0,7925675	0,863775	100.619	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (IUP RPJPD)
16	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	%	0	0	0,135	0,27	0,405	0,45	0,54	IUP RPJPD
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%PDRB	24,05	24,52	24,99	25,46	25,93	26,4	26,87	BPS (IUP RPJPD)
18	Ekspor Barang dan Jasa	%PDRB	48,83	54,23	54,96	55,69	56,42	57,15	57,87	BPS (IUP RPJPD)
19	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	72,04	72,08	72,13	72,2	72,3	72,45	72,49	BPS
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	%	91,69	91,92	91,98	92,04	92,1	92,16	92,22	IUP RPJPD
21	Persentase Desa Mandiri	%	21,15%	25,00%	26,92%	28,85%	30,77%	32,69%	32,69%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (IUP RPJPD)

22	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,0081	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan Daerah (IUP RPJPD)
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	98	98,2	98,5	98,7	98,9	99,0	99,2	Sekretariat Daerah (IUP RPJPD)
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	3,04	3,07	3,19	3,31	3,43	3,55	3,67	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika (IUP RPJPD)
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,19	4,2	4,25	4,3	4,35	4,4	4,5	Sekretariat Daerah (IUP RPJPD)
4	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	77,3	80	81	82	83	84	85	Inspektorat Daerah (IUP RPJPD)
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja

6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	63,3	65	66	68	69	70	71	Sekretariat Daerah
7	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	angka	80,53	80,79	81,47	84,72	84,67	86,06	86,07	Satuan Polisi Pamong Praja
8	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	2,97	2,98	3,01	3,05	3,11	3,16	3,25	BRIN (IUP RPJPD)
9	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	%	87,16	88,27	88,94	89,61	90,28	90,50	91,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (IUP RPJPD)
10	Persentase potensi konflik terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja (IUP RPJPD)
INDIKATOR KINERJA KUNCI DAERAH										

1	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0,85	85	86	87	88	89	90	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka	11,82	13,2	13,3	13,39	13,49	13,59	13,68	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Angka	7,21	7,62	8,01	8,4	8,8	9,19	9,59	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum inklusif dan pembelajaran berbasis STEAM	%	0,75	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
5	Proporsi guru bersertifikasi dan terlatih kemampuan pedagogik pada seluruh jenjang pendidikan	%	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
6	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum inklusif dan pembelajaran berbasis STEAM	%	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

7	Persentase ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan	%	0,75	0,76	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
8	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	%	0,6	0,61	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0/10.000 KH	1/100.000 KH	1/100.000 KH	1/100.000 KH	1/100.000 KH	1/100.000 KH	1/100.000 KH	
3	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)	%	15,2 (riset SKI 2023)	12,5	12,5	12,3	11,8	11,3	11	
4	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	0,71	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	

5	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	%	0,66	0,67	0,67	0,68	0,78	0,82	0,85	
6	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	0,796	0,7963	0,7963	0,8	0,85	0,9	0,95	
7	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	83	83	86	88	93	95	95	
2	Persentase Cakupan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	%	80	80	85,06	91,58	94,75	96,07	100	
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih layak	%	61,56	61,56	67,87	74,18	80,49	86,8	93,11	

4	Jumlah Terbangunnya Unit Pengelolaan Persampahan	Unit	0	0	0	0	1	1	1	
5	Persentase Rumah Tangga yang terlayani air limbah yang aman	%	30,46	31,04	33,35	35,98	38,21	40,75	42,07	
6	Jumlah Panjang drainase yang dibangun/rehabilitasi		40	40	40	162	664	223	216	
7	Persentase Jumlah layanan penyelenggaraan bangunan gedung	%	85	85	88	88	90	93	95	
8	Persentase penataan bangunan gedung	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	%	1	1	4	4	1	2	2	
10	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	46,38	48,72	53,46	56,24	59,87	62,12	66,65	

11	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase cakupan penyelenggaraan penataan ruang	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi yang layak huni	%	54	54	54,8	55,4	56	57,2	57,8	
2	Persentase Cakupan kawasan permukiman dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	%	59	59	62,1	63,8	64,5	65,2	66,9	
3	Persentase Cakupan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	%	57	57	59,2	59,7	60,2	60,9	70,4	
5	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									

	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
1	Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	80	82	83	84,5	85,5	86,5	87,5	1
2	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	67	70,5	74,67	79,15	85,44	92, 33	100	2
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
3	Persentase penyelenggaraan Tibumtransmas	%	100	100	100	100	100	100	100	3
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN									
4	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	20	30	36	42	48	54	63	4

	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
4	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	20	30	36	42	48	54	63	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
5	Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	82	83	84	85,5	86,5	87,5	88,5	
6	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	75	76	77	78,5	79,5	80,5	81,5	
7	Persentase pendidikan politik pada Kader Partai Politik	%	60	62	63	64,5	65,5	66,5	67,5	
8	Presentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	70	71	72	73,5	74,5	75,5	76,5	

9	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dna penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	70	71	72	73,5	74,5	75,5	76,5	
10	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	70	71	72	73	74	75	76	
6	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
1	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	%	80	82	81	82	83,5	83	84	
2	Persentase jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	70	70	72	74	76	78	80	
3	Persentase pendampingan bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga	%	72	72	73	74	75	76	77	
7	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									

1	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	3,33	20	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	
2	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	10,24	11,5	13,64	13,64	15,38	15,38	17,19	
3	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	3.159	5231	3,17	3.175	3,18	3.185	3,19	
8	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	82	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Anggran Responsif Gender (ARG)	%	62,54	62,79	63,04	63,29	63,54	63,79	64,04	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Angka	0,1639	0,1655	0,1685	0,1739	0,1785	0,1835	0,1885	

4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Konperhensif	%	0,75	0,76	0,78	0,81	0,84	0,87	0,9	
5	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standart	Angka	0,75	0,76	0,77	0,79	0,81	0,83	0,85	
6	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	angka	0,81	0,82	0,83	0,85	0,87	0,89	0,91	
7	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	0,5657	0,5658	0,566	0,5663	0,5666	0,5669	0,5672	
8	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan konperhensif	%	0,8	0,81	0,82	0,84	0,86	0,88	0,9	
9	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
1	Skor pola pangan harapan	Skor	96,5	96,7	96,9	97,1	97,3	97,5	97,5	

2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu kemanan pangan	%	80	100	100	100	100	100	100	
10	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
1	Persentase cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum (3 Pengadaan Tanah)	%	-	-	100	100	100	100	100	
4	Persentase cakupan penatagunaan tanah	%	100	100	100	100	100	100	100	

11	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase rekomendasi kajian linngkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Kualitas air dan udara	Indeks	60	65	70	75	80	90	100	
4	Perrsentase RTH	%	80	82	85	87	92	95	100	
5	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH	%	80	82	85	87	92	100	100	

7	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	70	75	80	85	90	100	100	
8	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	75	75	80	85	90	95	100	
9	Persentase penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	25	30	35	40	60	80	100	
12	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	85	85	87	90	93	93	93	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	81,51	85	87	88	89	99,5	100	

	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	9,66	30	35	40	45	50	50	
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	50	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	16,67	16,67	33,33	50	66,67	83,67	100	
5	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	

13	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	1
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	0,81	0,83	0,85	0,86	0,87	0,88	0,91	2
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	24	25	27	27	30	34	36	3
4	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	80	90	91	92	93	94	95	4
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	38	39	40	42	44	46	48	5
14	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									

1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,42	2,38	2,37	2,32	2,23	2,18	2,1	
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rates/ ASFR 15-19)	Angka	29,3	29,3	29,2	29	28,8	28,6	28	
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	56,1	56,1	57,4	58,2	59	60	61	
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive(mCPR)	Angka	67,2	67,2	67,8	68,3	68,8	69	69,41	
5	Persentase Kebutuhan KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	3,1	3,1	2,85	2,7	2,65	2,5	2,45	
6	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	%	95,59	95,59	96,8	97,5	98,46	99,41	99,45	
7	Kehamilan Tidak direncanakan (KTD)	%	29,3	29,3	27,3	26,7	25,9	24,4	23,6	

8	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	80	80	82	82,5	83	84	85	
15	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									**15**
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	1
2	persentas kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	20	20	25	27	30	35	40	2
3	Konektifitas laut	%	50	55	60	65	70	80	100	3
16	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

2	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks SPBE	Indeks	3,04	3,07	3,19	3,31	3,43	3,55	3,67	
17	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
1	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	93	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	
3	Persentase Koperasi Aktif	%	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	
4	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	13	14	15	18,75	-	18,75	-	

5	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	1,25	1,25	2,5	3,75	-	-	-	
6	Pertumbuhan wirausaha	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	%	11,67	11,67	11,67	13,33	15	16,67	18,33	
18	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	80	80	85	87	90	93	93	
2	Rasio Peningkatan Investasi PMDN/PMA	%	60	60	1108	1200	82	100	100	
3	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi di Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

4	Tingkat penyelesaian Pelayanan Perizinan (PMDN/PMA)	%	22 PMDN dan 3 PMA	24 PMDN dan 3 PMA	24 PMDN dan 3 PMA	26 PMDN dan 3 PMA	28 PMDN dan 3 PMA	30 PMDN dan 3 PMA	32 PMDN dan 3 PMA	
5	Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam Menyampaiakn LKPM	%	80	85	90	91	92	95	96	
6	Persentase Ketersediaan Data berbasis Sistem Informasi	%	74	80	85	90	90	95	95	
19	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
1	Persentase pembinaan kapasitas kepemudaan	%	0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,7	
2	Persentase Cakupan Prestasi Keolahragaan	%	0,7	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	
3	Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas kepramukaan	%	0,6	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	

20	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	1,72	1,72	1,87	1,87	2,02	2,02	2,17	
21	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
1	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	45	47	48	50	55	58	60	
2	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	0,3	32	35	40	50	60	70	
3	Persentase warisan budayaa yang dilestarikan	%	10	15	20	40	60	80	1	
4	persentase kunjungan wisatawan ke museum	%	-	-	-	-	-	-	30	

23	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	81	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
24	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
1	Persentase tersusunnya arsip yang sesuai standar	%	15	17	18	20	23	25	27	
25	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	

2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	%	45	47	50	70	75	80	85	
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	%	45	47	50	70	80	90	100	
4	Angka Konsumsi Ikan	%	75	77	78	82	91	100	100	
26	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	%	20	20	20	40	60	80	1	
3	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	20	20	20	40	60	80	100	

4	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	70	75	80	85	90	95	100	
5	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	0,5	0,5	0,5	0,6	0,8	1	1	
27	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan komoditas peternakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	%	25	25	30	60	70	80	100	
4	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	20	20	20	40	60	80	100	

5	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
28	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	
3	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	0,71	100	0,71	0,69	0,67	0,65	0,63	

4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	-	100	100	100	100	100	100	
29	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Buah	3	3	3	3	3	3	3	
2	Jumlah tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Buah	1	1	1	1	1	1	1	
30	**3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**									
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Buah	1	1	1	1	1	1	1	
1	**4.01 - UNSUR SEKRETARIAT DAERAH**									

1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	88	88,5	89	89,5	90	90,5	91	
2	Persentase Indeks Kematangan Organisasi dengan Predikat Tinggi	%	0,2941	0,2941	0,5294	0,6765	0,8235	0,9118	1	
3	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Angka	0,7	0,7	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	
4	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Skor	3200 (Sedang)	3000 (Sedang)	3000 (Sedang)	3200 (Sedang)	3200 (Sedang)	3350 (Tinggl)	3400 (Tinggi)	
5	Persentase efektifitas pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Produk hukum yang dihasilkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	83	83	84	85	86	87	88	

8	Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor	45909	45909	45909	45909	45909	45909	45909	
9	Persentase efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	**4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100	
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	70	70	75	75	80	85	95	
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah	%	80	80	80	80	85	85	90	

3	**5.01 - UNSUR PERENCANAAN**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	83	86	100	100	100	100	100	
2	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	98	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	98	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	96	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	94	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	93	100	100	100	100	100	100	

4	**5.02 - UNSUR KEUANGAN**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase silpa terhadap APBD	%	50	50	50	40	30	20	10	
3	Cakupan pengelolaan asset daerah	%	72	72	73	74	75	76	77	
4	Persentase tingkat pertumbuhan PAD	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
5	**5.03 - UNSUR KEPEGAWAIAN**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

2	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Kebutuhan Formasi	%	65,25	67,25	69,75	72,63	75,5	78,5	81	
6	**5.04 - UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial, dan Fungsional	%	45	45	46	47	48	49	50	
7	**5.05 - UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
1	Persentase rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	30	33	35	37	39	43	45	
2	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	%	62	65	68	70	72	75	85	
8	**5.06 - UNSUR PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH**									

1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Lokpri perbatasan yang dikelola	%	40	50	60	70	80	90	100	
9	**6.01 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	87	100	100	100	100	100	100	
2	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	%	83,87	84,13	84,26	84,92	85,24	86,01	86,35	
3	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	80,65	80,96	81,34	82,46	83,12	83,96	84,63	
4	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	80,65	80,96	81,34	82,46	83,12	83,96	84,63	

10	**7.01 - UNSUR KEWILAYAHAN**									
	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI									
	KECAMATAN SIANTAN SELATAN									
1	cakupan layanan penungjang urusan pemerintah daerah	%	92%	92%	95%	97%	97%	98%	98%	
2	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	85%	85%	88%	91%	93%	95%	97%	
3	Persentase Program pemberdayaan masyarakat desan dan kelurahan	%	83%	83%	85%	87%	89%	91%	93%	
4	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	81%	81%	83%	85%	87%	89%	93%	

5	Pesentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	83%	83%	85%	87%	89%	94%	97%	
6	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	82%	84%	84%	87%	90%	93%	96%	
	KECAMATAN SIANTAN UTARA									
1	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	95%	95%	95%	95%	95%	97%	99%	
2	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	85%	85%	87%	89%	92%	95%	98%	
3	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	%	85%	85%	87%	89%	93%	97%	93%	
4	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	83%	85%	87%	89%	91%	93%	95%	

5	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	81%	82%	85%	88%	91%	93%	97%	
	KECAMATAN JEMAJA									
1	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	69%	72%	75%%	87%	89%	91%	92%	
2	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	70%	72%	74%	75%	77%	78%	78%	
3	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	%	50%	51%	52%	55%	56%	58%	65%	
4	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	75%	77%	0%	80%	80%	81,50%	82%	
5	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	70%	72%	73%	73,50%	75%	77%	79,50%	

6	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	50%	50,50%	52%	62%	65%	67,50%	70,00%	
7	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	69%	72%	75%%	87%	89%	91%	92%	
8	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	%	79%	80%	81%	83%	84%	85%	87%	
	KECAMATAN SIANTAN TIMUR									
1	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	80%	81%	82%	83%	85%	88%	89%	
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui digitalisasi Pelayanan dan Peningkatan kapasitas aparatur	%	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	
3	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	

4	Laporan Koordinasi dengan aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketentraman wilayah	Laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
5	Memastikan Keberlanjutan Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pembenahan tata kelola administrasi	Laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
6	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	60%	61,50%	62%	63%	63,50%	64%	65%	
	KECAMATAN SIANTAN TENGAH									
1	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
2	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
3	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	

4	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	85%	87%	88%	89%	90%	91%	92%	
5	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	81%	82%	83%	85%	87%	88%	89%	
6	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	68%%	69%	70%	73%	78%	85%	87%	
	7.01 KECAMATAN SIANTAN									
1	cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	90%	90%	92%	94%	96%	98%	98%	
2	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	%	84%	85%	88%	91%	93%	95%	98%	
3	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	87%	87%	89%	84%	87%	90%	93%	

4	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	88%	88%	89%	93%	95%	97%	99%	
	KECAMATAN JEMAJA TIMUR									
1	cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	85	87	89	90	90	90	90	
3	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	85	86	87	89	90	90	90	
4	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	84	85	87	89	90	90	90	
5	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	

	KECAMATAN KUTE SIANTAN									
1	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase partisipasi masyarakat dalam embangunan diwilayah kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	KECAMATAN PALMATAK									
1	cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100%	100	100	100	100	100	100	
	KECAMATAN JEMAJA BARAT									

1	cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	97%	97%	98%	98,5	99,0	99,5	100,0	
2	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	80%	80%	81%	81,5	82,0	82,5	83,0	
3	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	90%	90%	91%	91,5	92,0	92,5	93,0	
4	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	95%	95%	96%	96,5	97,0	97,5	98,0	

5.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian program pembangunan daerah dan terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar minimal.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan evaluasi hasil kinerja RPJMD dari periode sebelumnya serta mempertimbangkan prioritas dari pemerintah pusat dan provinsi, selaras dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Harapan dan kebutuhan masyarakat tersebut diajukan melalui forum Musrenbang, namun karena keterbatasan dana, tidak semua rencana program atau kegiatan yang diajukan dalam Musrenbang bisa dimasukkan dalam dokumen Perubahan RKPD. Oleh karena itu, dibuatlah skala prioritas untuk program dan kegiatan yang dapat didanai. Ringkasan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendidikan

Tabel V- 5
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pendidikan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Yang Terpenuhi	92%	• Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) • • Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Angka Partisipasi Sekolah SD/Mi/Paket A	100%	
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS/Paket B	100%	
		Persentase jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	
		Persentase jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	52%	
1 01 03	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	33%	Pengembangan Kurikulum
1 01 04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	74%	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1 01 05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Tersedianya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggaraka	30%	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		n oleh Masyarakat		
		Persentase Tersedianya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat	30%	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

2. Kepemudaan dan Olah Raga

Table V-3
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	18%	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		Persentase terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	18%	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 19 03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Tersedianya Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Daerah	21%	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Tersedianya Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Daerah	21%	

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Persentase Tersedianya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	19%	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	14%	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	18%	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
		Cakupan Prestasi Keolahragaan	53%	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	20%	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

3. Kesehatan

Table V-4
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kesehatan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan	77,24% 100%	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Kabupaten sehat	100%	
		Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
		Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
		Persentase jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
		Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Persentase jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
		Persentase jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
		Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
		Persentase jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan	100%	

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		layanan kesehatan		
		Persentase jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	183/100000 KH	
		Persentase jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	12,14	
		Persentase jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan		
		Persentase jumlah Warga		

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan layanan kesehatan Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita		
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDMK yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan	90% 100%	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pembinaan dan evaluasi SDMK Persentase SDMK yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan	90%	dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase ketersediaan farmasi alat kesehatan dan makanan dan minuman Jumlah Tenaga Kesehatan yang memilki perizinan praktik tenaga kesehatan	92%	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Persentase Sertifikat PIRT Yang di Terbitkan	65%	Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		persentase TPM dan Sentra Makanan Jajanan yang dilakukan pembinaan	65%	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
		persentase Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Pangan Yang Diawasi	65%	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pembinaan kesehatan masyarakat di desa Persentase peningkatan strata posyandu aktif dari madya ke purnama Persentase peningkatan strata posyandu aktif dari madya ke purnama	83,73% 88% 79,63%	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				Kabupaten/Kota

4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Table V-5
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Indeks advokasi dan pengendalian penduduk	65,75	• Pengendalian Penduduk:
		Laju pertumbuhan penduduk	2	
		Total Fertility Rate (TFR)	2,77	

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Indeks pembinaan keluarga berencana	65%	Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
		Contraceptive Prevalence Rate(CPR)	59,40 %	
		Unmet Need	7,35%	
		Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	22,20 %	
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Angka Fertilitas menurut umur/Age Specific Fertility Rates (ASFR)	13,51 %	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
		Usia Kawin Pertama (UKP)	22%	

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Persentase Mitra dan Organisasi yang dilakukan Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%	

5. Koperasi

Table V-6
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Koperasi
dan Usaha Mikro

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi aktif yang melakukan izin usaha simpan pinjam	100%	
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Presentase tingkat Kesehatan koperasi aktif	100%	
		Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penilaian Kesehatan KSP/USP	100%	

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase UMKM yang mendapatkan pembinaan	100%	
		Peningkatan jumlah usaha mikro yang mendapatkan pemberdayaan	100%	
	Program Pengembangan Umkm	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	100%	
		Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitasi	100%	

6. Tenaga Kerja

Table V-7
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Tenaga Kerja

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
1.01.01	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang direncanakan setiap tahun	100%	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase jumlah Tenaga Kerja yang dilatih berdasarkan Kompetensi dibagi target per tahun	90%	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan Koordinasi dan Pengembangan Bursa Kerja	100%	• Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota • Pengelolaan informasi pasar kerja

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Program Hubungan Industrial	Persentase besaran kasus yang diselesaikan	100%	Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan

7. Perdagangan

Table V-8
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perdagangan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
1.01.01	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko	100%	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Swalayan yang diterbitkan		
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik	90%	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha Yang mengikuti Pembinaan	100%	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri	100%	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase kestabilan harga barang	0,71%	• Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Pengendalian Harga dan Stok

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penti ng di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

8. Pariwisata dan Kebudayaan

Table V-9
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sdm Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Menerima	100%	Peningkatan Kapasita Sumber Daya Manusia Pariwisata

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Pengembangan Kompetensi		
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dilakukan peningkatan	100%	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase objek destinasi dan event pariwisata yang dipasarkan	100%	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

9. Kebudayaan

Table V-10
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
1.01.01	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya	100%	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pertunjukan kesenian tradisional di Kecamatan	100%	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pelestarian Dan	Persentase cagar budaya yang	100%	Penetapan Cagar Budaya

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Pengelolaan Cagar Budaya	dilestarikan dan dikelola		Peringkat Kabupaten/Kota

10. Perikanan, Pertanian Dan Pangan

Table V-11
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perikanan, Pertanian Dan Pangan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan prasarana pertanian	100%	Pengembangan Prasarana Pertanian Pembangunan Prasarana Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan	Persentase destinasi pariwisata yang	90%	Penjaminan Kesehatan Hewan,

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	dilakukan peningkatan		Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase kinerja pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	80%	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan konsumsi pangan	100%	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahu

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				n sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase rekomendasi pengawasan keamanan pangan yang diterbitkan	100%	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

11. Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Table V-12

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah Memiliki Focal Poin Aktif	90%	
		Indeks Pembangunan Gender (PPG)	90,62 %	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,75 %	
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	9%	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	75%	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				Luar Panti Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pendampingan bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga	73,40 %	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	86,54 %	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

12. Sekretariat Daerah

Table V-13

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sekretariat Daerah

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Sekretariat Daerah			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase tercapainya kegiatan kesejahteraan rakyat dalam membentuk akhlakul karimah	100%	Administrasi Tata Pemerintahan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	
		persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum	100%	

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam pengendalian perekonomian dan pembangunan	100%	• Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian • Pelaksanaan Administrasi Pembangunan • Pengelolaan Pengadaan • Barang dan Jasa • persentase pelaksanaan pemantauan kebijakan sumber daya alam

14. Lingkungan Hidup

Table V-15
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Lingkungan Hidup

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan	Cakupan layanan Penunjang urusan	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	daerah kabupaten/kota	pemerintah daerah		Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air((IKA)	100%	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pelaksanaan Penghijauan Sumber Air Baku	100%	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peran Serta Desa dan Kelurahan dalam Pengelolaan Persampahan	100%	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah • Persentase jumlah pengurangan timbulan sampah • Persentase jumlah penanganan	17,50 % 6%	Pengelolaan Persampahan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		timbulan sampah	18,78 %	

14. Perhubungan

Table V-15
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perhubungan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup			
1.01.01	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Ratio kejadian kecelakaan Persentase penekanan angka kecelakaan di jalan raya Persentase persediaan angkutan sekolah	0,80% 80% 100%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase ketersedian sarana dan prasarana transportasi Laut Jumlah ketersediaan angkutan laut Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana angkutan laut	58% 177 Kali	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

15. Penanaman Modal

Table V-16
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Penanaman Modal

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Ratio peningkatan investasi PMA dan PMDN	1,11 %	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi di daerah	100%	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tingkat penyelesaian Pelayanan Perizinan (PMA dan PMDN)	24 PMDN dan 3 PMA	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	90%	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data berbasis sistem informasi	96%	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

16. Perencanaan Pembangunan Daerah

Table V-17

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan	Cakupan layanan Penunjang urusan	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	daerah kabupaten/kota	pemerintah daerah		Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program Rpjmd Kedalam Rkpd	100%	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	100%	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan	100%	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
		Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan	82%	
		Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan	-	

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan	70%	

17. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Table V-18

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase silpa terhadap APBD	5%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	100%	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
		Persentase Pengelolaan Data dan		

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan asset daerah	100%	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tingkat pertumbuhan PAD	100%	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

18. Inspektorat Daerah

Table V-19

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Inspektorat Daerah			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				Urusan Pemerintahan Daerah.
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Terlaksanannya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	5% 100% 100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah Yang Sudah Di Nilai Spip	100%	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi

19. Keamanan dan Ketertiban

Table V-20

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Keamanana dan Ketertiban

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Satuan Polisi Pamong Praja			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani Persentase PPNS yang aktif	100% 95% 95% 70%	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

20. Penanggulangan Bencana Daerah

Table V-21

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan penanggulangan bencana	100%	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Persentase Terlaksananya Pelayanan Informasi Ranwan Bencana	100%	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Persentase terpenuhinya Pelayanan pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana	100%	Pelayanan Penyelamatandan Evakuasi Korban Bencana
		Persentase terpenuhinya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		Persentase terlaksananya Penataan Sistem		

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Dasar Penanggulangan Bencana		

21. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Table V-22

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				• Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi	100% 100%	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		korban kebakaran		

22. Kependudukan dan Catatan Sipil

Table V-23
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Kebijakan Pendaftaran Penduduk	100% 100%	Pelayanan Pendaftaran Penduduk Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Program Pencatatan Sipil	Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pencatatan Sipil	100%	Pelayanan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Tersusunnya Dokumen Tata Kelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang memadai Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100% 100%	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyediaan	100%	Penyusunan Profil Kependudukan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Buku profil Kependudukan		

23. Kesatuan Bangsa dan Politik

Table V-24
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	indeks kepuasan masyarakat bidang organisasi masyarakat	84%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Pemberdayaan Dan	Jumlah Kebijakan/ Peraturan/pedoman/	79%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	rekomendasi Bidang Ketahanan Ekonomi,		Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Sosial dan Budaya	77%	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase pencegahan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan aparatur dan masyarakat dalam rangka pemahaman akan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di daerah	85%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

24. Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Table V-25

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Badan Kegiatan Urusan Kepegawaian dan Pengembangan SDM			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Jumlah pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK Persentase Pemenuhan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional Jumlah ASN yang Menempuh Pendidikan Lanjutan Persentase Aparatur Berkinerja Baik	86% 82% 289 97%	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Mutasi dan Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi	68%	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Manajerial dan Fungsional		

25. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Table V-26
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
	Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa Persentase Pengentasan Desa tertinggal Persentase Peningkatan status desa mandiri	90,38% 0,00% 13,50%	Penyelenggaraan Penataan Desa

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan pemerintahan desa	100%	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	42	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100%	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

26. Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Table V-27

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan			

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Kawasan Permukiman			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				Pemerintahan Daerah.
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku, Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Jumlah embung yang dibangun Panjang Pembangunan Bangunan pengaman tebing, sungai dan pantai Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	100%	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	100%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	59,7%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase peningkatan bangunan gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana	100%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase peningkatan bangunan gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana	100%	

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	

27. Komunikasi, Informatika dan Statistik

Table V-28

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Dinas Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase keterbukaan informasi publik	100%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	100%	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah		Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

28. Kecamatan

Table V-29

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kecamatan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Kecamatan			
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
	KECAMATAN SIANTAN UTARA			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
				yang Ada di Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100% 100%	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	KECAMATAN SIANTAN TENGAH			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Masyarakat (PPKM)		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN KUTE SIANTAN			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN JEMAJA			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Program Pemberdayaan	Persentase Koordinasi Kegiatan	100%	Koordinasi Kegiatan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Desa		Pemberdayaan Desa
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100% 100%	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN JEMAJA			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Dan Pelayanan Publik	Kegiatan Pemerintahan		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Pemerintahan Desa		
	KECAMATAN SIANTAN			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100% 100%	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
		Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa
	KECAMATAN SIANTAN SELATAN			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100% 100%	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Pemerintahan Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa
	KECAMATAN SIANTAN TIMUR			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Pemerintahan Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa
	KECAMATAN JEMAJA BARAT			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100% 100%	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Pemerintahan Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa
	KECAMATAN JEMAJA TIMUR			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Pemerintahan Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa
	KECAMATAN PALMATAK			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100%	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Kode	Program	Kinerja		Kegiatan
		Indikator	Target	
	Pemerintahan Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa

TABEL V-30

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

BERDASARKAN URUSAN

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai pedoman utama bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2025. Dokumen ini memiliki peran sentral dalam mengarahkan berbagai upaya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selain itu, perubahan RKPD ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Tahun Anggaran 2025, sehingga memastikan kesinambungan perencanaan fiskal yang sejalan dengan prioritas pembangunan.

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 mengadopsi beberapa pendekatan strategis untuk memastikan kualitas perencanaan yang tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan daerah. Pendekatan teknokratik, misalnya, menekankan pentingnya analisis berbasis data dan kajian empiris dalam merumuskan arah pembangunan, sehingga keputusan yang diambil lebih akurat dan berbasis bukti. Pendekatan ini diperkuat dengan penggunaan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*) untuk mengukur pencapaian tujuan pembangunan secara objektif.

Selain itu, pendekatan partisipatif diterapkan untuk menjamin bahwa suara dan aspirasi masyarakat terakomodasi secara optimal dalam setiap tahap perencanaan. Ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, serta mekanisme dialog dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk tokoh masyarakat, dunia usaha dan organisasi non-pemerintah. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat partisipasi masyarakat sebagai salah satu prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pendekatan politis juga berperan penting dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan selaras dengan visi dan misi kepala daerah, serta mendukung realisasi janji-janji politik yang menjadi dasar legitimasi pemerintahan. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik daerah.

Sementara itu, pendekatan *top-down* dan *bottom-up* diintegrasikan untuk menciptakan keseimbangan antara arahan kebijakan dari tingkat pusat dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat lokal. Pendekatan top-down memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional dan regional, sementara pendekatan *bottom-up* memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kondisi spesifik wilayah mereka. Dengan menggabungkan kelima pendekatan ini, diharapkan perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025.

Selain aspek metodologis, perubahan RKPD ini juga memperhatikan berbagai kaidah pelaksanaan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program pembangunan. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran yang transparan, pengukuran kinerja yang jelas, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, perubahan RKPD ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat akuntabilitas publik dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 terlaksana secara terarah, efektif dan efisien, maka ditetapkan sejumlah kaidah pelaksanaan sebagai panduan bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Kaidah ini dirancang untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan

akuntabilitas, serta memastikan keselarasan antara berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran. Adapun kaidah-kaidah tersebut meliputi:

1. Sinergi dan Integrasi Pelaksanaan Program

Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas serta para pemangku kepentingan terkait wajib melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 secara sinergis dan terintegrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan saling mendukung dan memperkuat, sehingga mampu menghasilkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

2. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban untuk menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Untuk itu, Perubahan RKPD Tahun 2025 harus diterjemahkan secara lebih rinci dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025. Konsistensi ini penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

3. Sinkronisasi Sumber Pendanaan

Untuk mencapai sinergi yang maksimal, setiap perangkat daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025. Dokumen ini harus berpedoman pada Perubahan RKPD dan mencakup rencana penggunaan sumber pendanaan yang beragam, termasuk APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta sumber lain yang sah. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap sumber dana dapat dimanfaatkan secara efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan.

4. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025. Langkah ini diperlukan

untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai rencana, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama proses implementasi.

5. Pengendalian dan Pelaporan Berkala

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah diwajibkan melakukan pengendalian internal terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian ini mencakup pemantauan kinerja, koreksi terhadap penyimpangan, serta pelaporan secara berkala setiap tiga bulan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai target pembangunan.

6. Pengelolaan Data dan Analisis Kinerja

Kepala Bappeda bertanggung jawab untuk menghimpun, menganalisis dan menilai hasil pemantauan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah. Data dan analisis ini akan menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan serta memastikan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan di seluruh sektor.

7. Masa Berlaku dan Prinsip Pelaksanaan

Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir tahun 2025. Untuk memastikan keberhasilan implementasinya, langkah-langkah persiapan harus dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

8. Pengelolaan Risiko dan Responsif terhadap Perubahan

Selain kaidah-kaidah di atas, setiap perangkat daerah juga diwajibkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dan kegiatan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pembangunan terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan yang tidak terduga.

9. Penguatan Inovasi dan Teknologi

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, perangkat daerah diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan inovasi dalam manajemen data serta pengambilan keputusan. Ini termasuk penggunaan sistem informasi berbasis digital untuk mempercepat proses pengumpulan data, analisis, serta pelaporan kinerja.

10. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi SDM

Untuk mendukung pencapaian target pembangunan, pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di setiap perangkat daerah perlu diperkuat. Hal ini meliputi peningkatan keterampilan teknis, manajerial, serta penguasaan teknologi untuk memastikan pelaksanaan program yang lebih efektif dan berkelanjutan.

11. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil

Untuk memperluas dampak pembangunan, pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat kerja sama dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga internasional dalam mendukung berbagai program pembangunan prioritas.

Dengan menerapkan kaidah-kaidah di atas, diharapkan Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dapat berfungsi sebagai panduan yang komprehensif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Semoga seluruh target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai, sehingga sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2025 dapat terwujud secara optimal.

Tarempa, 20 Juni 2025
Bupati Kepulauan Anambas,

Aneng